



BOOK CHAPTER

**KEBANGKITAN EKONOMI
BANGKA BELITUNG
ERA COVID-19 TAHUN 2020**



Penerbit : CV. AA. RIZKY
Alamat : Jl. Raya Ciruas Petir,
Puri Citra Blok B2 No. 34 Pipitan
Kec. Walantaka - Serang Banten
E-mail : aa.rizkypress@gmail.com
Website : www.aa rizky.com

ISBN 978-623-6942-74-1



Hasil Pemikiran Dosen

**KEBANGKITAN EKONOMI
BANGKA BELITUNG TAHUN 2020**

*Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)
Kepulauan Bangka Belitung*

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KEBANGKITAN EKONOMI BANGKA BELITUNG TAHUN 2020

**Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)
Kepulauan Bangka Belitung**



**PENERBIT
CV. AA. RIZKY
2020**

KEBANGKITAN EKONOMI BANGKA BELITUNG TAHUN 2020

© Penerbit CV. AA RIZKY

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kepulauan
Bangka Belitung

Editor:
Ayu Wulandari

Desain Cover & Tata Letak:
Tim Kreasi CV. AA. Rizky

Cetakan Pertama, Desember 2020

Penerbit:
CV. AA. RIZKY

Jl. Raya Ciruas Petir, Puri Citra Blok B2 No. 34
Kecamatan Walantaka, Kota Serang - Banten, 42183
Hp. 0819-06050622, Website : www.aarizky.com
E-mail: aa.rizkypress@gmail.com

Anggota IKAPI
No. 035/BANTEN/2019

ISBN : 978-623-6942-74-1
xii + 172 hlm, 23 cm x 15,5 cm

Copyright © 2020 CV. AA. RIZKY

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa ijin tertulis dari penulis dan penerbit.

Isi diluar tanggungjawab Penerbit.

SAMBUTAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh



Puji dan Syukur kepada Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayahnya, Taufiq dan Inayahnya Penyusunan *Book Chapter* ISEI Kepulauan Bangka Belitung dengan tema Kebangkitan Ekonomi Bangka Belitung Era Covid-19 telah dapat diselesaikan. Hal ini tidak terlepas dari kontribusi penulis yang berasal dari berbagai instansi dan profesi, dalam memberikan ide orisinal dan strategi-strategi bermanfaat dalam menghadapi Covid-19.

Penyusunan *Book Chapter* ini diatrabelakangi oleh *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang menjadi polemik kesehatan global dan berdampak kepada perekonomian global, terkhusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu cara untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini adalah memutuskan mata rantai virus corona, dengan cara membatasi interaksi sosial hingga terciptanya kebijakan *lockdown* di China dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Indonesia. Hal ini menyebabkan perubahan perilaku sosial masyarakat, dari sering keluar rumah, kini hampir semua aktivitas dilakukan di rumah, hingga akhirnya memaksa masyarakat untuk beraktivitas online dengan menggunakan teknologi *video conference*. Kemudian ada pemberlakuan *work from home* (WFH) dan *work from office* (WFO), merubah pola jam kerja di setiap instansi baik swasta maupun negeri. Moda transportasi udara pun sampai dihentikan sementara waktu, untuk menghentikan mobilitas masyarakat dari zona merah (pasien Covid-19 tertinggi) ke zona hijau (zero pasien Covid-19).

Dampak paling dirasakan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah menurunnya *supply demand* sektor pariwisata sekitar 40 sampai 45 persen, diiringi dengan penurunan sektor industri pengolahan sebesar minus 2,86 persen serta pertambangan dan penggalian minus 7,91 persen. Sisi lain dampak Covid-19 mampu meningkatkan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial hingga 15,38 persen, sektor informasi dan komunikasi sebesar 13,98 persen, serta pengadaan air sebesar 13 persen. Sedangkan sektor perikanan tangkap tidak terdampak Covid-19, karena tidak ada hambatan dalam proses produksi dan pemasaran, mengingat ikan merupakan kebutuhan pangan masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung, menyebabkan pangsa pasar domestik ikan paling tinggi. Sektor pertanian pada triwulan I masih tumbuh meski terkendala dengan rendahnya harga lada, sawit dan karet, serta ada pembatasan ekspor menyebabkan turunnya produksi tiga komoditas tersebut.

Konsumsi masyarakat di masa Covid-19 memang tidak berubah, malah ada kecenderungan menurun, tetapi ada efek positif terhadap pengalihan pemenuhan kebutuhan melalui digitalisasi. Hal ini mendorong semua pelaku usaha, harus berinovasi dan menyesuaikan diri memanfaatkan teknologi tersebut, mereka harus berlomba membuat aplikasi *e-commerce* agar tetap bertahan di masa Covid-19. Berbagai kebijakan pemulihan perekonomian telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agar perekonomian tetap berjalan, dengan tetap berusaha memutus mata rantai virus corona, supaya kesehatan masyarakat terjamin.

Adanya *Book Chapter* ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan solusi perekonomian di masa-masa Covid-19 maupun dimasa *pandemic disase* lainnya. Semoga buku ini juga dapat berguna bagi tambahan *literasi* penelitian tentang Covid-19.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

DR. H. Erzaldi Rosman
Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SAMBUTAN DEWAN PENASIHAT ISEI BANGKA BELITUNG

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh



Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya *Book Chapter* ISEI Babel 2020 dapat dipublikasikan. Tema yang diambil dalam publikasi ini adalah “Kebangkitan Ekonomi Bangka Belitung Era COVID-19 Tahun 2020”, sebuah tema yang sangat relevan

dengan kondisi yang terjadi saat ini. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 telah berdampak signifikan terhadap laju pertumbuhan perekonomian global, nasional dan bahkan Bangka Belitung. Pembatasan mobilitas dalam rangka memitigasi penyebaran COVID-19 telah berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. *International Monetary Fund* (IMF) memprakirakan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 akan mengalami kontraksi sebesar 4,4%, sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan mengalami kontraksi sebesar 1,5% (yoy) (proyeksi Oktober 2020).

Menurunnya permintaan global akibat kebijakan pembatasan operasional industri dan lock down di sejumlah negara menyebabkan harga komoditas global mengalami penurunan. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap kegiatan perdagangan luar negeri (ekspor-impor) yang mengalami penurunan tajam. Pembatasan mobilitas masyarakat dan kebijakan efisiensi usaha menyebabkan penurunan permintaan masyarakat. Demikian halnya dengan pertumbuhan ekonomi Prov Kep Bangka Belitung yang diprakirakan mengalami kontraksi pada tahun 2020. Kontraksi terjadi hampir di seluruh sektor perekonomian utama seperti sektor industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi. Aktivitas pariwisata sebagai salah satu lapangan

usaha potensial di Bangka Belitung juga menurun tajam tercermin dari kontraksi pertumbuhan sektor transportasi dan sektor penyedia akomodasi dan makan minum.

Penurunan kinerja perekonomian perlu dibendung supaya tidak terlalu tajam. Berbagai upaya telah dilakukan antara lain melalui implementasi kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menysasar bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan kegiatan UMKM. Pemulihan ekonomi juga dilakukan dengan menysasar pada sektor potensial yang memiliki dampak terhadap perekonomian tinggi dengan risiko yang relatif rendah terhadap penyebaran COVID-19. Sinergi dan kolaborasi yang kuat antar lembaga menjadi kunci dalam keberhasilan program pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, kontribusi pemikiran, ide dan gagasan dari akademisi maupun praktisi khususnya yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bangka Belitung sangat diperlukan dalam menunjang efektivitas program pemulihan ekonomi.

Buku ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi para pengambil keputusan dalam merumuskan strategi pemulihan ekonomi dan dapat memperkuat peran ISEI sebagai partner Pemerintah Daerah dalam memajukan perekonomian Bangka Belitung. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan buku ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah, dan karunia-Nya, serta kemudahan kepada kita semua dalam upaya menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan ekonomi regional dan pengembangan ekonomi nasional pada umumnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Tantan Heroika S.

**Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung**

DAFTAR ISI

SAMBUTAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	v
SAMBUTAN DEWAN PENASIHAT ISEI CABANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.....	vii
DAFTAR ISI	ix
URGENSI <i>FRUGAL INNOVATION</i> UNTUK UMKM DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI ERA NEW NORMAL <i>Reniaty</i>	1
AKSELERASI KEBIJAKAN : DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SEKTOR PARIWISATA <i>Devi Valeriani</i>	11
AKSELERASI PEMULIHAN PEREKONOMIAN DAN STABILITAS KEUANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PASCA PANDEMI COVID-19 <i>Nizwan Zukhri</i>	21
<i>RECOFUSING</i> DAN REALOKASI ANGGARAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG <i>Rulyanti Susi Wardhani</i>	31
MASA DEPAN <i>CORONANOMICS</i> : SEHAT DULU ATAU PERTUMBUHAN EKONOMI DULU? <i>Aning Kesuma Putri</i>	41
MITIGASI PANDEMI: BENARKAH TERJADI <i>TRADE OFF</i> ? <i>Farida Rahmawati</i>	51

TIPPING POINT EKONOMI BANGKA BELITUNG: PENDEKATAN NON LINIER BUSINESS MODEL <i>Sumiyati</i>	59
MENDUKUNG PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI PARIWISATA DI PROVINSI BANGKA BELITUNG: PENERAPAN MODIFIKASI KONSEP EKOWISATA BERBASIS PENDEKATAN PENTA- HELIX <i>Arif Darmawan</i>	71
STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM BERDAYA SAING DI ERA NEW NORMAL PANDEMI COVID-19 <i>Juhari</i>	79
MENDORONG EKONOMI BANGKA BELITUNG KE PUNCAK PARIWISATA BARU <i>Berlian Sitorus</i>	91
NORMA BARU UNTUK EKONOMI BARU <i>Dwi Haryadi Dan Muhammad Syaiful Anwar</i>	97
BANGKITAN EKONOMI BABEL DI ERA COVID-19 MELALUI SEKTOR PERTANIAN <i>Ismed Inonu</i>	108
STRATEGI PENGUATAN EKONOMI DI ERA NORMAL BARU PANDEMI COVID-19: OPTIMALISASI POTENSI KELAUTAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG <i>Lovaditya Dhika Primaganis</i>	109
MENUMBUHKEMBANGKAN EKONOMI KREATIF DALAM MASA NEW NORMAL <i>Muhammad Syaiful Anwar</i>	123
USAHA PENGUATAN EKONOMI MELALUI TEKNOLOGI TEPAT GUNA PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI PROVINSI BANGKA BELITUNG DIMASA PANDEMI COVID-19 <i>R. Priyoko Prayitnoadi Dan Firly Rosa</i>	133

SEKTOR INFORMAL SEBAGAI BATU LONCATAN KEBANGKITAN EKONOMI BABEL PASCA PANDEMI COVID-19 <i>Royhan Faradis</i>	145
MITIGASI PEREKONOMIAN ERA COVID-19 BERBASIS POTENSI LOKAL BABEL <i>Uswatun Nurul Affah</i>	153
BAYANG-BAYANG KEJAYAAN TIMAH DAN GELIAT WISATA PULAU BELITUNG (<i>SUCCESS STORY</i> AKTIVIS LINGKUNGAN KPLB DALAM EKSPLORASI WISATA ALAM DAN MEMBINA KOMUNITAS WISATA DI BELITUNG SAAT PANDEMI COVID-19) <i>Irvani</i>	163

URGENSI *FRUGAL INNOVATION* UNTUK UMKM DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI ERA *NEW NORMAL*

Reniaty

Ketua ISEI Cabang Bangka Belitung
r3ni4ti@yahoo.com

A. Fakta Pentingnya Inovasi bagi UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi

Terminologi inovasi, sudah sering diungkapkan dalam berbagai konsep akademis maupun dalam bisnis. Tetapi akhir-akhir ini *concern* terhadap inovasi semakin sering diungkapkan oleh beberapa pakar di tengah pandemi. Ini mengindikasikan bahwa konsep inovasi tetap relevan dalam kondisi *old normal*, *pandemic*, *new normal* bahkan nanti untuk *next normal* maupun *post normal*. Mengapa konsep inovasi lebih sering digunakan dibandingkan kreativitas. Hal ini dikarenakan kreativitas lebih mengacu kepada ide-ide yang belum diimplementasikan, akan tetapi inovasi lebih nyata karena sudah diimplementasikan dan layak dijual. Ini relevan dengan apa yang dikatakan oleh Peter Cook (1998) serta dikonfirmasi oleh Stijn Smisman dan Elen Stokes (2017).

Steven Jobs Founder Apple Computer pernah menyatakan "*Innovation distinguishes between a leader and follower*" seperti yang dinyatakan oleh Jay Elliot dan William Simon, dengan bukunya berjudul *The Steve Jobs Way : iLeadership for A New Generation*, ini menekankan bahwa seorang inovator mencirikan seorang pemimpin, bukan pengikut. Inovasi sendiri adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan gagasan dan pengetahuan baru dan transformasinya ke dalam hasil yang dapat menciptakan nilai tambah dalam mengelola organisasi. Keberhasilan ekonomi berkat adanya inovasi berupa pengenalan/penerapan teknologi atau kombinasi teknologi yang sudah ada dalam mentransformasi input menjadi output mampu menghasilkan perubahan besar dalam hubungan antara

nilai yang dipersepsikan oleh konsumen atas kegunaan atau manfaat suatu produk (barang/jasa)".

Peluang inovasi memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat pendapatan dan kualitas hidup manusia. Selain itu inovasi produk dan layanan baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidup manusia. Disisi lain tantangan inovasi adalah meningkatkan pengangguran karena pekerjaan manusia akan digantikan mesin otomatis. Dan yang menguasai teknologi dan inovasi bisa juga menimbulkan kesenjangan ekonomi.

Global Innovation Index Report (2019) melansir angka Indeks Inovasi Global Indonesia (Databoks.katadata.co.id-2019). Jika dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia, Indonesia masih membutuhkan dukungan kelembagaan, sumber daya manusia, dan kecanggihan bisnis. Rendahnya indeks daya saing global dan Indeks Inovasi Global Indonesia disebabkan oleh kurangnya sumberdaya manusia (SDM) Indonesia yang berkapasitas inovasi dan memanfaatkan teknologi dan informatika. Indeks Inovasi Global Indonesia 2019 posisinya berada di posisi dua terendah se-ASEAN. Negara tetangga di ASEAN tertinggi adalah Singapura dan Malaysia.

Berdasarkan latar-belakang diatas sangat penting mengimplementasikan inovasi dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Isu-isu strategis yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya adalah terkait pertumbuhan ekonominya yang selalu dibawah rata-rata nasional sejak tahun 2012-2020 ini mengindikasikan ada sebuah persoalan serius dengan pertumbuhan ekonominya. Padahal pertumbuhan ekonomi adalah indikator penting dalam sebuah pembangunan ekonomi suatu daerah maupun negara. Ini sesuai yang disampaikan oleh Rappana Patta dan (2019) bahwa Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan berkelanjutan dalam potensi produktif suatu negeri dan output riil nasional.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2020 dibanyak negara mengalami penurunan yang sangat tajam karena meluasnya pandemi Covid-19 dan disertai berbagai upaya penanggulangan pembatasan aktivitas masyarakat. Bank Indonesia memperkirakan ekonomi global mencatat

pertumbuhan negatif 2,2% pada tahun 2020. Jika kita lihat di tingkat Nasional, perekonomian pada Q1'20 tetap tumbuh positif ditengah kinerja perekonomian dunia yang melambat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q1'20 sebesar 2,97% (Yoy) lebih rendah dibandingkan Q4 sebesar 4,97C% (yoy) dan lebih rendah dibandingkan Q1'19 sebesar 5,07% (yoy). Dari sisi pengeluaran penurunan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh pertumbuhan melambat dari kelompok konsumsi Rumah Tangga dan investasi. Dari sisi lapangan usaha, sekotr industri pengolahan, perdagangan, pertanian dan konstruksi juga tercatat tumbuh melambat.

Kinerja pertumbuhan ekonomi Babel pada triwulan I Tahun 2020, masih positif sebesar 1,35% (yoy) ditengah. Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2012, terus mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan ketergantungannya kepada komoditas timah yang cukup signifikan yaitu dari sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan yang didominasi oleh Timah hampir 31 persen. Selain itu sektor unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sektor pertanian, perkebunan dan perikanan kelautan, perdagangan besar dan eceran, serta sektor pertambangan.

B. Potensi Sumberdaya Indonesia dan Bangka Belitung

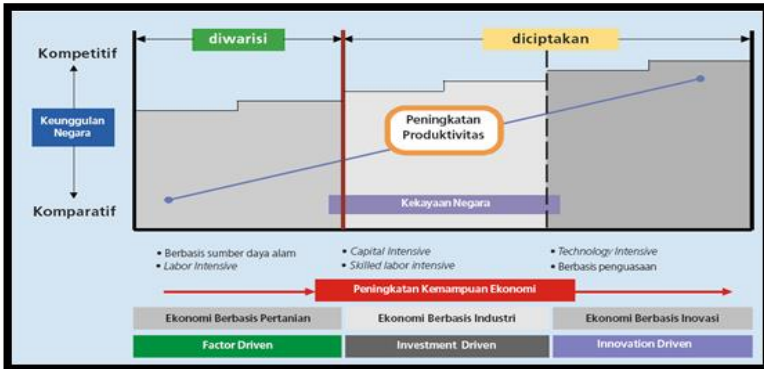
Potensi Indonesia sebagai penghasil SDA di dunia sudah lama diakui dunia. Dari sederetan sumber daya alam itu, sebut saja No. 1. Penghasil kelapa sawit terbesar dunia, 465 ton. No. 2 Penghasil karet terbesar dunia, 2,80 juta. No. 2 Penghasil timah terbesar dunia 102.000 ton. No.3 Penghasil beras terbesar dunia, 35,8 juta ton No. 3 penghasil nikel terbesar dunia 229.000 ton. No. 3 penghasil kakao terbesar dunia 545.000 ton. No. 4 Penghasil kopi terbesar dunia 465.000 ton. No. 6 output pertanian terbesar dunia. US\$60 Milyar. No.6 Penghasil tembaga terbesar dunia 789.000 ton. Dilihat dari potensial laut sangat luar biasa, karena 62 persen wilayah Indonesia adalah perairan.

Dari data diatas untuk timah, karet, kelapa sawit dan produk-produk perikanan sangat melimpah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apalagi untuk timah, Babel adalah Provinsi terbesar penghasil timah di Indonesia.

Untuk sawit menempati ranking pertama untuk komoditas ekspor non timah, sedangkan untuk karet merupakan tanaman yang banyak dimiliki oleh masyarakat petani di Bangka Belitung.

Akan tetapi masih minimnya inovasi yang dilakukan menjadikan kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki tidak mampu memberikan nilai tambah yang maksimal agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain inovasi, produktivitas bisnis maupun tenaga kerja menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Inovasi membutuhkan kompetensi dan budaya kreatif ; tidak ada inovasi tanpa budaya kreatif dan tidak ada kreatifitas tanpa kompetensi". Selain Kompetensi perlunya ada ekosistem demi terjaminnya tumbuhnya inovasi yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi.

Gambar 1. menunjukkan Inovasi mampu menciptakan Keunggulan Kompetitif dan Komparatif dalam mengelola kekayaan Negara, sehingga mampu memberikan sebesar-besarnya kemakmuran kepada Rakyat. Penggerak utama dari pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah tingginya produktivitas, kemajuan inovasi dan peningkatan pendapatan riil. Kunci penggerak pertumbuhan ekonomi adalah : memperluas modal, meningkatkan pasokan tenaga kerja aktif, mengekstraksi dan mengolah sumberdaya alam, meningkatkan faktor produktivitas dan mendorong inovasi dan komersialisasi. Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam (*resource driven economy*) sekarang harus melakukan *innovation driven economy* agar menjadi bangsa Inovatif yang menguasai IPTEK, mandiri dan berdaya saing global. Inovasi menjadi penting di UMKM karena perannya yang tinggi dalam perekonomian nasional, sebagai tulang punggung dan urat nadi perekonomian nasional.



Gambar 1. Peningkatan Kemampuan Ekonomi Melalui Inovasi

Sumber : Kemenristekdikti (2020)

C. Solusi *Frugal Innovation*

Covid-19 merubah secara radikal perilaku konsumsi. Berdasarkan Data dari Survey Nielsen (2020) kepercayaan diri konsumen dalam melihat perekonomian Indonesia menurun ke level terendah selama 3 (tiga) tahun terakhir. Masyarakat sebagai konsumen resah akan kondisi ekonomi dan kesehatan. Bahkan dibandingkan dengan masyarakat negara Asia Tenggara pada umumnya, level keresahannya meningkat hampir sama. Walaupun ada yang beranggapan Covid 19 akan berakhir 2-3 bulan lagi.

Secara umum mencari hiburan dan mengunjungi Mall frekuensinya makin berkurang dan masyarakat menghindari makan ditempat umum, sehingga rumah sudah menjadi pusat dari segalanya. Pusat bekerja, sekolah, *shopping* bahkan pusat produksi oleh karena itu mulai tumbuh industri rumah tangga yang saat ini semakin eksis

Dalam kaitannya dengan menjaga stamina olahraga juga dilakukan di dalam rumah, untuk yang diluar rumah trend penggunaan sepeda sebagai alat untuk berolah raga dan rekreasi semakin meningkat. Sama halnya dengan tumbuhnya permintaan alat-alat memasak saat ini karena rumah tangga sudah banyak melakukan kegiatan memasak di rumah dengan bahan baku yang siap saji sehingga permintaan produk-produk *frozen food* saat ini sangat digemari oleh konsumen

Produk-produk kesehatan saat ini sangat dicari oleh konsumen. Hal ini karena pendapat para pakar yang menyatakan bahwa sampai akhir tahun 2020 obat virus covid 19 belum bisa ditemukan. Sehingga mau tidak mau kita harus hidup bersama Covid-19. Yang berarti ketahanan tubuh adalah segalanya untuk terhindar dari virus mematikan tersebut. Dari berbagai kelompok konsumen baik yang berpendapatan rendah, menengah maupun tinggi terjadi trend penurunan berbelanja (*household spending*). Segmen Upper SES adalah segmen yang paling terdampak dalam mengurangi belanja rumah tangganya, terutama untuk *Leisure*.

Frugal innovation is a local phenomenon through which entrepreneurs try to make the most of what they control to fulfil local needs, needs which have been for too long neglected by mainstream businesses. There is no concern on how the profits are used or shared. Contohnya seperti: baju Asmat, Masker, Ventilator, face shield yang dikerjakan oleh UKM dan lain-lain sebagai solusi untuk mengatasi kepanikan Pandemi Covid 19.

Frugal Innovation sering disebut juga sebagai Inovasi ughari juga mewujud dalam bentuk lain, seperti mobilisasi sumber daya. Gerakan Sambatan Jogja (Sonjo), misalnya, menjadi tempat bertemunya aktor dari beragam latar belakang secara informal untuk mencari solusi bersama. Sonjo juga memfasilitasi diskusi konsep sampai eksekusinya dan bahkan menyediakan tempat UKM menayangkan produknya.

Inovasi Frugal atau yang lebih dikenal dengan *Frugal Innovation* dapat dilakukan dengan dua dimensi yaitu (1) Menjalin Kemitraan dengan indikator : menjadi bagian komunitas, dan memperbesar jaringan bisnis (rantai nilai), dimensi yang ke (2) Meningkatkan literasi digital (digitalisasi UMKM) dengan cara : meningkatkan akses informasi, meningkatkan visibilitas, menjangkau potensi pasar baru, dan meningkatkan transaksi penjualan. Frugal Innovation memiliki karakteristik *scare resources, ingenuity, simple dan leverage*.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sendiri, manakah yang lebih cocok kita terapkan. Seperti diketahui bahwa dalam jumlah UMKM kita 161.000 dimana 99%

didominasi oleh usaha mikro dan kecil. Maka frugal innovation memiliki urgensi yang tinggi?. Karakteristik *scarc resources* yang mengindikasikan sumberdaya yang terbatas, *ingenuity* yang berarti kecerdikan, *simple* berarti sederhana dan *leverage* artinya memiliki daya ungkit. Pelanggan adalah orang-orang yang memutuskan nilai dari suatu inovasi dengan cara membeli produk tersebut (Sawney, et al, 2006 p.76). Kenapa Babel harus melakukan *frugal innovation* ?, beberapa argumentasinya adalah sebagai berikut : (1). Kaya dengan sumberdaya alam. (2) Perubahan perilaku konsumen, perubahan perilaku konsumen membutuhkan inovasi-inovasi baru dalam produk dan jasa. (3) Nilai tambah akan meningkatkan pendapatan (4). Meningkatkan daya saing, inovasi sangat erat hubungannya dengan daya saing, (5) Kondisi pandemi, diperlukan frugal innovation.

D. Penguatan Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi di Era New Normal

Hubungan antara pengetahuan dan inovasi sangatlah erat. Pembentukan *attitude* dan *behaviour* SDM inovatif harus dimulai dari penguatan ekosistem pengetahuan yang terdiri dari : ***knowledge enablers*** adalah pendorong pengetahuan, pembuat kebijakan, badan pendanaan, industri. ***Knowledge intermediaries*** penghubung pengetahuan, media, organisasi masyarakat sipil , ***knowledge producers*** penghasil pengetahuan, universitas, lembaga penelitian, dan ***knowledge users*** pengguna pengetahuan : kementerian, lembaga pemerintah. Sehingga akan merubah *new mindset* dan *new attitude* dan *behaviour* serta *the way of doing things*. *New Attitude* dan *Behaviour* yang diperlukan di era new normal ini adalah : jujur, inovatif, fleksibel, kemampuan mengambil resiko, kreatif, tangguh, pemikiran yang terbuka, visioner dan memiliki kualitas kepemimpinan, peduli dan cerdas. Kesemua unsur dalam ekosistem pengetahuan bisa melakukan sebuah kolaborasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan sinergi program kerjasama R&D lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi dan dunia usaha.

2. Implementasi teknologi baru melalui pilot project/plant.
3. Pemberian jaminan risiko atas teknologi hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri.
4. Memberikan Insentif bagi industri yang R&D nya bekerjasama dengan perguruan tinggi.
5. Memberikan insentif kepada bagian R& D dan peneliti yang produknnya komersial di industri.
6. Melaksanakan audit teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri.
7. Mendirikan Pusat-pusat inovasi pada wilayah pusat pertumbuhan industri.
8. Mendirikan Science Techno Park di Tiap Kabupaten/Kota

Sehingga, ekosistem pengetahuan dan inovasi akan berputar sesuai dengan fitrahnya karena sumberdaya manusia yang dimiliki memiliki *new mindset* sehingga memiliki *new attitude and behaviour*, sehingga memiliki *new way of doing things*. Sehingga mereka memiliki karakter : peduli, jujur, fleksibel, tangguh, kreatif, inovatif, cerdas, pemikiran yang terbuka, kemampuan mengambil resiko, visioner dan memiliki kualitas kepemimpinan. Kedelapan langkah diatas diyakini mampu meningkatkan kinerja bisnis UMKM dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi.



Gambar 2 Penguatan Ekosistem Pengetahuan & Inovasi Serta Kesiapan SDM Indonesia
Sumber : Kemenristekdikti 2020

E. Kesimpulan

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup dalam dalam pertumbuhan perekonomian Bangka Belitung. Kebijakan terkait work from home, social distancing, physical distancing menurunkan semua kinerja ekonomi.

Frugal innovation menjadi kata kunci untuk meningkatkan kembali aktivitas ekonomi. Inovasi frugal menjadikan semua aktivitas bisnis lebih efisien, berbasis kearifan lokal dan berdaya saing. Sinergi antara akademisi, dunia usaha, pemerintah, komunitas dan media, menjadi kata kunci. Perlu insentif bagi Research dan Development bekerjasama dengan perguruan tinggi. implementasi teknologi baru melalui pilot plant dan hilirisasi sehingga memberikan penguataan ekosistem pengetahuan dan inovasi. Sehingga lahir SDM Indonesia yang mumpuni dalam New Normal, menciptakan produk, proses dan organisasi yang inovatif sehingga mampu meningkatkan kinerja UMKM sebagai tonggak perekonomian yang mampu mengekselerasi pertumbuhan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (2020), *Release Bangka Belitung Triwulan I, Tahun 2020*
- Elliot, Jay and Simon, William, *The Steve Jobs Way : iLeadership for A New Generation*, Vanguard Press, March 8, 2011, Business & Economics, 256 pages.
- Cook, Peter (1998), *The Creativity Advantage-Is Your Organization The Leader of The Pack?*, Industrial and Commercial Training Journal Vol.30 No.5 MCB, University Press.
- Rappana, Patta, dan Sukarno Zulfikry, *Ekonomi Pembangunan (2017) CV Sah Media*, Makasar. ISBN 978-602-6928-15-3.
- Reniati (2012), *Kreativitas Organisasi dan Inovasi Bisnis, Implementasinya Pada IKM Berbasis Kreativitas dan Budaya Menuju Keunggulan Bersaing Global*. Penerbit Alfabeta, Bandung. ISBN : 978-602-9328-89-9
- Robbins, P. Stephen dan Judge, A. Timothy (2015), *Perilaku Organisasi*, Edisi 16, Penerbit Salemba Empat-Jakarta.
- Sawney, Mohanbir, Wolcott, Robert C and Arroniz, Inigo (2006), *The 12 Different Ways For Companies to Innovate*. MITSloan Management Review-Spring, 2006, Vol.47. No.3 p.76

Sminsman, Stijn and Stokes, Elen (2017), *Innovation Types and Regulation :The Regulatory Framing Of Nanotechnology As “Incremental” or “Radical” Innovation*. Published Online By Cambridge. Vol. 8, special issue 2, June 2017 pp.364-386. <https://doi.org/10.1017/err.2017.g><https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-risk-regulation/article/innovation-types-and-regulation-the-regulatory-framing-of-nanotechnology-as-incremental-or-radical-innovation/BB3790217A139301C79C8BB5C2184A67>

Website

- (1) <https://klc.kemenkeu.go.id/seri-ekonomi-makro-teori-pertumbuhan-ekonomi/>
- (2) <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/29/indeks-inovasi-indonesia-peringkat-kedua-terbawah-di-asean>

AKSELERASI KEBIJAKAN : DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SEKTOR PARIWISATA

Devi Valeriani

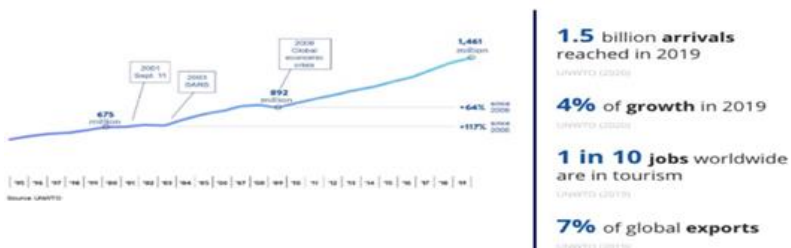
Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung
deviyono92@gmail.com

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 merupakan wabah yang menyebabkan banyak negara terganggu aktivitas, sosial, ekonomi, pemerintahan dan terkhususnya masalah kesehatan. Bermula dengan penyebaran Covid 19 di negara Cina, kemudian pandemi meluas dengan cepat ke 210 negara termasuk Indonesia. Ekonomi dan kesehatan merupakan bidang yang paling berdampak dari hadirnya wabah tersebut. Sektor-sektor ekonomi yang memiliki *high impact* diantaranya adalah sektor pariwisata.

History sebelum terjadinya pandemic Covid 19 diketahui perkembangan pariwisata dunia kurun waktu 10 tahun (2009-2019) mengalami peningkatan yang sangat signifikan, terlihat dari pertumbuhan sebesar 4 persen dan 1 dari sepuluh lapangan kerja di dunia diisi pekerja dari sektor pariwisata serta kontribusi sektor pariwisata 7 persen dari ekspor global. Sedangkan tingkat kunjungan Wisatawan internasional (*international tourist*) meningkat dari 892 juta orang pada saat masa krisis tahun 2009 menjadi 1.461 juta orang pada tahun 2019.

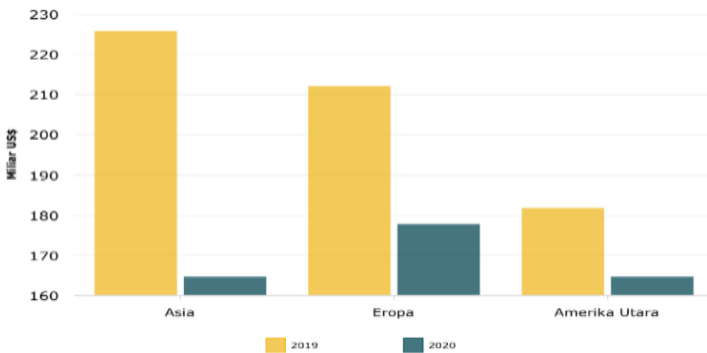
The most resilient economic sector



Gambar 1 Perkembangan Pariwisata Dunia Tahun 2009-2019

Sumber : UNWTO, dalam Sugihamretha

Kontraksi yang paling besar dirasakan sektor pariwisata dunia adalah, terganggunya mata rantai pada tingkat kunjungan wisatawan, baik melalui penurunan pemesanan maupun pembatalan pemesanan sehingga memberikan pengaruh yang terhadap pendapatan industri pariwisata dunia pada 3 kawasan negara yaitu Asia, Eropa dan Amerika Utara seperti pada gambar berikut



Gambar 2 Perkembangan Pendapatan Pariwisata Dunia Maret 2020

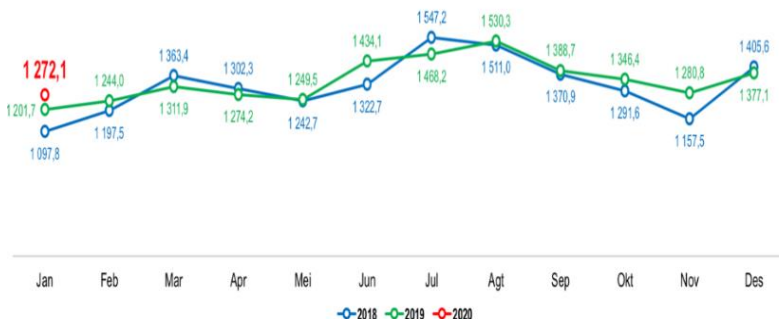
Sumber :Statista, Maret 2020

Penurunan pendapatan pariwisata terbesar terjadi di wilayah Asia dari US\$ 225,9 miliar pada Tahun 2019 menjadi US\$ 164,7 miliar di Tahun 2020, artinya Pariwisata di Wilayah Asia turun hingga 27 persen. Demikian halnya dengan Wilayah Eropa dan Wilayah Amerika Utara mengalami hal yang sama, dengan hasil prediksi penurunan sebesar 16,2 persen dari Tahun 2019, dengan rincian US\$ 212 miliar menjadi US\$ 177,7 di Tahun 2020. Tekanan industri pariwisata yang paling rendah terjadi di Wilayah Amerika Utara jika dibandingkan dengan Wilayah Eropa dan Wilayah Asia dengan tingkat penurunan 9,4 persen dari nilai dari US\$ 181,8 miliar menjadi US\$ 164,7 miliar.

Bagaimana Pariwisata Indonesia ??

Pandemic Covid 19 memberi dampak paling tinggi bagi sektor pariwisata. Kondisi pariwisata Indonesia sebelum terjadinya serangan covid sangat memberikan harapan yang besar dalam pertumbuhan ekonomi,

kontribusi devisa, penciptaan lapangan pekerjaan, peluang usaha pendukung pariwisata dan pemberdayaan masyarakat seluas-luasnya. Situasi ini tercermin dari perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada gambar berikut:



Gambar 3 Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2018- 2020

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan Gambar 3 diketahui bahwa pada bulan Januari 2018 sampai dengan Januari tahun 2020 terlihat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Mulai bulan April 2020 kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan, hal ini tercermin dari pintu masuk wisatawan mancanegara dari seluruh Indonesia, pada bulan April 2020 hanya sejumlah 160.042 atau mengalami penurunan sebesar 86,44 persen, sedangkan kondisi pada Maret 2020 masih sebesar 243.750 kunjungan wisatawan mancanegara. Dengan rincian pintu masuk Ngurah Rai turun hingga -99,94 persen; Soekarno Hatta turun sebesar -99,79 persen dan Batam sebesar -99,27 persen. Secara kumulatif, pada periode Januari-Maret 2020, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia mencapai 2,61 juta kunjungan atau turun 30,62 persen dibanding jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 3,76 juta kunjungan.

Dampak dari penurunan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara sedikit banyak akan

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Gubernur Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2020 lebih rendah dari 2,3 persen. Hal tersebut disebabkan karena realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2020 hanya sebesar 2,97 persen. Sementara di tahun sebelumnya pada kurun waktu yang sama berada pada angka 4,97 persen. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2020 masih positif dan merupakan salah satu negara dengan PDB yang tertinggi dibanding negara maju lainnya, seperti China yang berkontraksi -6,8 persen dari sebelumnya 6 persen, AS dari 2,3 persen menjadi 0,3 persen, dan Eropa dari 1,3 persen jadi berkontraksi -3,3 persen. Selain itu Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II atau Q2 2020 juga akan mengalami kontraksi. Penurunan ini terjadi sebagai imbas dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berjalan penuh sepanjang April-Mei 2020 dan sebagian dari bulan Juni 2020, dengan prediksi minus 3,1 persen. Seoptimal mungkin pemerintah tetap mempertahankan target tahun 2020 dengan rentang pertumbuhan ekonomi minus 0,4 sampai 2,3. *The Economist* merevisi prediksi pertumbuhan ekonomi untuk semua negara-negara anggota G20 diprediksi mengalami pertumbuhan ekonomi negative dengan hanya 3 negara G20 yang masih menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sepanjang 2020 yaitu Indonesia, Cina, dan India. Untuk Indonesia, *The Economist* memprediksi pertumbuhan PDB riil pada tahun 2020 berada di angka 1 persen, sementara prediksi pertumbuhan PDB Indonesia sebelum Covid- 19 adalah 5,1 persen.

Mati surikah pariwisata Bangka Belitung?

Kondisi pariwisata Bangka Belitung sejak mulai tersebarnya Covid 19 seperti pada gambaran berikut:



Gambar 4. Perkembangan Jumlah Wisatawan Bangka Belitung Tahun 2019-2020 (dalam ribu orang)

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan gambar 4 terlihat bahwa hampir sepanjang Tahun 2019 tingkat kunjungan wisatawan ke Bangka Belitung mengalami peningkatan. Awal tahun 2020 bulan januari dan februari tingkat kunjungan sangat baik bahkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya pada periode yang sama, yaitu bulan januari 30,71 ribu dan bulan februari 33,64 ribu, jika dibandingkan bulan januari tahun 2019 sebanyak 26,45 ribu dan februari 27,39 ribu. Optimisme selama tahun 2020 akan terjadi peningkatan signifikan jika dibandingkan tahun 2019. Namun awal bulan maret 2020 semuanya menjadi berubah dan *under estimate*, ketika covid 19 mulai menyebar. Hal ini terlihat ketika bulan maret jumlah sampai dengan bulan mei Tahun 2020, penurunan tingkat kunjungan hingga mencapai 75 persen. Kondisi ini memberi dampak panjang bagi elemen pendukung sektor pariwisata, seperti tenaga kerja, kuliner, industri oleh-oleh, transportasi dan lain-lainnya.

B. Permasalahan

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah:

1. Langkah atau kebijakan apa yang perlu difokuskan saat ini
2. Upaya apa yang perlu dilakukan agar wisatawan dapat berwisata kembali di new normal

C. Analisis dan Pembahasan

1. Fokus langkah atau Kebijakan Sektor Pariwisata

Menyimak apa yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama yang memprediksi bahwa 50 persen dari total devisa Indonesia hilang akibat COVID-19. Asumsi tersebut dihitung jika pandemi COVID-19 berakhir pada bulan Juni 2020. Pariwisata Indonesia harus optimistis akan kembali pada tahun 2021. Hal tersebut memaksa pemerintah pusat dan daerah harus menentukan beberapa langkah atau kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah baik dalam pemerintahan, swasta maupun berbagai asosiasi industri pariwisata pada tingkat pusat sampai ke tingkat daerah agar segala kebijakan dan arahan dari pusat maupun dari daerah dapat tersampaikan serta mudah dilakukan akselerasinya.
- b. Pemerintah perlu mengembalikan konektivitas pesawat dari dan ke berbagai destinasi agar wisatawan kembali ke Indonesia.
- c. Sektor pendukung pariwisata dan ekonomi kreatif harus memiliki keterhubungan terhadap lembaga atau instansi pada daerah masing-masing, agar pemerintah daerah berperan membantu menyerap produk-produk industri makanan dan souvenir maupun oleh-oleh.
- d. Perlunya realisasi dari rencana dari pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran insentif guna menyelamatkan pariwisata dengan Rp298,5 miliar dengan rincian untuk maskapai dan travel agent sebesar Rp98,5 miliar, anggaran promosi wisata Rp103 miliar, kegiatan pariwisata Rp25 miliar, dan influencer Rp72 miliar.
- e. Perlu penguatan dan implementasi yang cepat untuk tata kelola tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dampak wabah/bencana di sektor pariwisata termasuk transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan responsibility dalam sinergitas *stakeholder* agar upaya memasuki era new normal semakin optimis.
- f. Kebutuhan dukungan dana bagi tenaga kerja dan UMKM pariwisata yang terdampak covid 19 agar tetap

berjalan sampai kondisi para tenaga kerja tersebut dan UMKM dapat beraktifitas kembali, namun perlu dikuatkan dengan identifikasi dan pemetaan dalam satu data agar jumlah kebutuhan dana dapat diketahui dan tidak terjadi *double funding*.

- g. Penguatan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah baik dalam pemerintahan, swasta maupun berbagai asosiasi industri pariwisata pada tingkat pusat sampai ke tingkat daerah agar segala kebijakan dan arahan dari pusat maupun dari daerah dapat tersampaikan serta mudah dilakukan akselerasinya.
- h. Belajar dari pengalaman Covid-19 maka pemerintah pusat maupun daerah perlu membentuk kelembagaan khusus menangani bencana yang memberikan dampak bagi sektor pariwisata, serta melakukan perencanaan anggaran khusus bencana, mengingat selama ini kemungkinan pendanaan untuk penanggulangan bencana pada sektor pariwisata belum optimal.
- i. Semua upaya dalam bentuk kebijakan dan implementasi kebijakan mengikutsertakan atau dilakukan sinergitas dengan kementerian terkait dan asosiasi-asosiasi terkait, dengan harapan percepatan sosialisasi kebijakan tersampaikan dengan cepat dan tepat sasaran.
- j. Perpanjangan masa relaksasi kredit bagi pelaku usaha pariwisata, sampai dengan minimal akhir tahun 2020 dan selanjutnya dikemas kebijakan bentuk baru dalam membantu permasalahan bagi kreditor sektor pariwisata yang terdampak Covid 19.

2. Upaya yang perlu dilakukan agar wisatawan dapat berwisata kembali di *the new normal*

Berdasarkan beberapa *lesson learn* dari berbagai negara dalam menyikapi bagaimana menggiring kembali wisatawan ke destinasi-destinasi yang ada di Indonesia termasuk Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan tambahan alokasi anggaran sektor pariwisata dan industri kreatif baik di tingkat pusat maupun daerah khusus untuk membangun kembali aktifitas sektor pariwisata dan alokasi dana bencana.

- b. Melakukan promosi secara simultan masing-masing organisasi transportasi melalui *travel-travel agent*, dengan memberikan banyak insentif dan promo *hot price* serta keamanan dan kenyamanan saat melakukan wisata.
- c. Penerapan perlakuan protokol kesehatan tetap diutamakan namun dengan kondisi yang lebih nyaman, dimana setiap pelaku usaha pariwisata, baik transportasi, hotel, UMKM menyediakan perlengkapan minimal 3 APD (Masker, Face sheelt, Handsanitizer)
- d. Adanya insentif untuk pajak hotel, restoran dan UMKM pendukung sektor pariwisata.
- e. Mendorong pergerakan wisatawan nusantara dengan terus melakukan kampanye promosi wisata dalam negeri, mendorong dilakukannya pertemuan-pertemuan dari instansi pemerintah dan korporasi pada destinasi-destinasi wisata dalam negeri.
- f. Mempromosikan even-even budaya, seni, music dan olah raga dalam upaya untuk menarik potensi MICE dan event internasional agar dapat dilaksanakan di dalam negeri khususnya daerah-daerah yang menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulannya.
- g. Selektif dalam memberikan dana hibah dari pusat bagi daerah yang memiliki dampak covid lebih besar dengan daerah yang dampak covidnya rendah.

D. Penutup

Kesadaran, tanggungjawab dan kerjasama antara seluruh elemen seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, pelaku usaha dan asosiasi-asosiasi industri pariwisata termasuk kalangan akademisi dan media massa dalam membangkitkan kembali sektor pariwisata dan bagaimana secara bersama-sama juga memutuskan rantai penyebaran Covid-19. Model Pentahelix dalam akselerasi kebijakan sangat tepat di terapkan dalam pemulihan sektor pariwisata dengan mengkolaborasi, Pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat. Mari berwisata di Indonesia saja.

Daftar Pustaka

BPS, Neraca Satelit Pariwisata Nasional (NESPARNAS) 2017.

Sugihamretha, 2020, Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *The Indonesian Journal of Developing Planning*. Vol IV No 2- Juni 2020

Website:

- (1) <https://www.bps.go.id/website/images/Pariwisata-Rilis-Januari-2020-ind.jpg>
- (2) <https://www.bps.go.id/website/images/Pariwisata-Rilis-Maret-2020-ind.jpg>
- (3) [https://www.bps.go.id/BRS Mei 2020](https://www.bps.go.id/BRS%20Mei%202020)
- (4) www.bbc.com di akses tanggal 29 juni 2020

AKSELERASI PEMULIHAN PEREKONOMIAN DAN STABILITAS KEUANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PASCA PANDEMI COVID-19

Nizwan Zuhri

*Ketua Bidang Kajian/Penelitian ISEI Bangka Belitung/ Dosen
Fakultas Ekonomi UBB
nizwan_ubb@yahoo.com*

A. Fakta/Data/Informasi

Pandemi Covid-19 yang datang bagaikan banjir bandang, dalam sekejap telah meluluhlantakkan perekonomian global. Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang rentan terhadap pengaruh eksternal, dimana kegiatan sektor-sektor perekonomian lebih ditujukan untuk pasaran ekspor, sedangkan kebutuhan masyarakat masih didominasi oleh produk-produk yang didatangkan dari luar daerah sangat merasakan dampak dari mewabahnya Covid-19 ini.

Pandemi Covid-19 telah menghambat atau menyebabkan terganggunya aktivitas perekonomian, baik aktivitas produksi, distribusi, maupun konsumsi. Terganggunya aktivitas perekonomian akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran terbuka, dan selanjutnya berdampak pada meningkatnya tingkat kemiskinan.

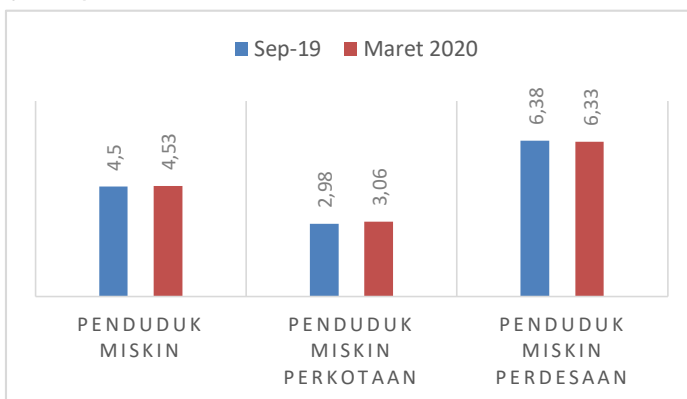
Dampak pandemi covid-19 lebih berbahaya dibandingkan dengan krisis ekonomi yang terjadi pada akhir dekade 1990-an. Pada krisis ekonomi tahun 1997-1999, ekspor komoditas dari Indonesia pada umumnya dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada khususnya cenderung meningkat dengan harga yang sangat tinggi, hal ini disebabkan terjadinya defresiasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing yang sangat signifikan. Pada situasi ini tentu sangat menguntungkan para petani atau eksportir Indonesia, sedangkan situasi dan kondisi ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 ini menyebabkan permintaan terhadap komoditi ekspor dari Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan yang sangat drastis. Data BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa nilai ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode Mei 2020 bernilai US\$73,2 juta, mengalami penurunan sebesar 52,49 persen dibanding nilai ekspor pada bulan Mei 2019. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, nilai ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bulan Mei 2020 mengalami kenaikan sebesar 2,23 persen. Demikian juga halnya dengan realisasi komoditi yang sampai saat ini masih merupakan andalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menggerakkan roda perekonomian yaitu komoditi timah, dimana nilai ekspor timah turun 54,67 persen (y-on-y), namun jika dibandingkan dengan bulan April 2020, ekspor komoditi timah ini naik 8,97 persen (m-to-m). Jika dilihat berdasarkan negara tujuan, selama Bulan Januari-Mei 2020, negara Singapura menyerap 22,44 persen (US\$86,9 juta) pangsa ekspor timah dari Indonesia.

Untuk ekspor nontimah yang merupakan komoditi hasil pertanian, perikanan, dan komoditi ekspor non timah lainnya mengalami penurunan sebesar 42,51 persen (y-on-y), dibandingkan dengan bulan sebelumnya (m-to-m), ekspor nontimah Bulan Mei 2020 mengalami penurunan sebesar 16,41 persen. Dari jumlah ekspor nontimah ini, Malaysia menyerap sebesar 21,09 persen (US\$19,4 juta) (BPS Provinsi Kep. Babel, 2020).

Turunnya aktivitas perekonomian dipastikan akan menyebabkan meningkatnya angka tingkat pengangguran terbuka, dan selanjutnya berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Data BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2020) menunjukkan bahwa pada Bulan Maret 2020, persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 4,53 persen, naik sebesar 0,03 poin persen dibandingkan dengan kondisi September 2019 yang sebesar 4,50 persen. Angka tingkat kemiskinan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 menarik untuk dicermati, meningkatnya persentase tingkat kemiskinan di daerah perkotaan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perdesaan. Persentase penduduk miskin di daerah

perkotaan pada September 2019 sebesar 2,98 persen naik menjadi 3,06 persen pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 6,38 persen, justru mengalami penurunan menjadi 6,33 persen pada Maret 2020. Perbandingan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dibandingkan dengan periode September 2019 disajikan pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Di Provinsi Kep. Bangka Belitung

Sumber: BPS Provinsi Kep. Babel. 2020

Fenomena tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi menarik untuk dianalisa, hal ini disebabkan meningkatnya persentase penduduk miskin yang jauh lebih besar di daerah perkotaan, sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan yang justru mengalami penurunan dari sisi persentase. Dari sisi jumlah, selama periode September 2019–Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,91 ribu orang (dari 24,62 ribu orang pada September 2019 menjadi 25,53 ribu orang pada Maret 2020), sementara di daerah perdesaan naik sebanyak 0,12 ribu orang (dari 42,75 ribu orang pada September 2019 menjadi 42,87 ribu orang pada Maret 2020). Kondisi ini merupakan kondisi pada awal muncul pandemi covid-19.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang mulai berupaya menjadikan sektor pariwisata

sebagai lokomotif penggerak perekonomian daerah sebagai pengganti sektor pertambangan yang diperkirakan akan semakin mengalami penurunan. Namun akibat pandemi covid-19 ini, sektor yang baru berada pada fase pertumbuhan ini, juga mengalami guncangan yang sangat hebat. Berdasarkan data statistik, Jumlah penumpang angkutan udara yang datang ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan angkutan udara pada Mei 2020 sebanyak 0,42 ribu orang, turun sebesar 92,52 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Demikian juga halnya dengan penumpang angkutan laut, Jumlah penumpang angkutan laut antar pulau yang berangkat dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Mei 2020 tercatat sebanyak 1,37 ribu orang, turun 12,40 persen dibanding April 2020. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Januari-Mei 2019), jumlah penumpang yang berangkat turun sebesar 49,93 persen (BPS Provinsi Kep. Babel, 2020).

Demikian juga jika dilihat dari Jumlah tamu yang menginap pada hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bulan Mei 2020 tercatat sebanyak 2.720 orang. Jumlah ini turun sebesar 8,34 persen dibandingkan jumlah tamu bulan sebelumnya yang sebanyak 2.968 orang. Jumlah tamu asing turun 85,71 persen dan jumlah tamu domestik turun 8,16 persen. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga cenderung mengalami penurunan. Pada bulan Mei 2020 rata-rata mencapai 15,89 persen, turun sebesar 0,74 poin dibandingkan dengan TPK April 2020 yang tercatat sebesar 16,63 persen. Pada Mei 2020, rata-rata lama menginap tamu total keseluruhan pada hotel klasifikasi bintang selama 1,80 hari, terjadi penurunan 0,18 hari dibandingkan bulan sebelumnya (BPS Provinsi Kep. Babel, 2020).

Dari sisi kemampuan fiskal daerah, berdasarkan laporan perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bulan Mei 2020 (Bank Indonesia, 2020), menunjukkan bahwa stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran masih terjaga dengan baik pada triwulan I 2020, meskipun beberapa indikator menunjukkan perlunya kewaspadaan lebih lanjut. Indikator pertumbuhan kinerja perbankan

secara umum menunjukkan adanya perlambatan pada penghimpunan dana dan penyaluran kredit di tengah pertumbuhan aset perbankan yang menurun. Rasio intermediasi perbankan tercatat masih tinggi namun dengan risiko kredit bermasalah yang juga sudah mulai meningkat termasuk risiko kredit bermasalah UMKM yang perlu untuk mendapat perhatian. Eksposure risiko dari korporasi dan rumah tangga juga perlu mendapat perhatian seiring dengan tekanan kondisi perekonomian akibat pandemi COVID-19.

Realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari APBN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 ini diperkirakan juga mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan APBN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp3,72 triliun, atau meningkat sebesar 70,23 persen dibandingkan 2018 (Rp2,19 triliun) (Kanwil DJPB Babel, 2020). Demikian juga jika dikaitkan dengan tingkat kemandirian daerah, ketergantungan daerah, dan desentralisasi fiskal. Hasil penelitian Zukhri (2020) menunjukkan bahwa dari aspek kemandirian, kemampuan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada kategori rendah dengan pola hubungan konsultatif. Berdasarkan derajat ketergantungan daerah berada dalam kategori sangat tinggi, sedangkan ditinjau dari derajat desentralisasi fiskal, kemampuan keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada dalam kategori sedang sampai dengan cukup (29,47 - 33,26 persen). Akibat dari pandemi Covid-19 ini diprediksi tingkat kemandirian keuangan daerah pada tahun 2020 ini akan semakin menurun, artinya tingkat ketergantungan terhadap dana dari pusat akan semakin meningkat, demikian juga halnya dengan kemampuan fiskal daerah juga akan semakin menurun akibat dari menurunnya aliran dana dari pusat kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena dalam situasi melemahnya aktivitas perekonomian dari semua sektor yang ada, pemerintah daerah akan kesulitan dalam menaikkan penerimaan daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak daerah, retribusi daerah, maupun dalam bentuk lain-lain penerimaan daerah yang syah.

B. Upaya/Strategi Kebangkitan

Memasuki semester kedua tahun 2020 pandemi covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Sementara itu pemerintah mulai menerapkan era baru dalam upaya persiapan pemulihan ekonomi. Pemerintah memang menghadapi pilihan yang sulit antara kesehatan dengan pertumbuhan ekonomi, tidak bisa memilih salah satu untuk dijadikan prioritas, karena keduanya sama-sama penting, keduanya memiliki prioritas yang sama. Langkah pemerintah menerapkan “era new normal” merupakan suatu pilihan yang harus didukung oleh segenap elemen, baik pemerintah, BUMN, dunia usaha, swasta, unsur pendidikan, maupun elemen lainnya.

Modal utama yang harus dimiliki oleh segenap komponen untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi saat ini adalah rasa “Optimis”, dengan optimis semua permasalahan akan dapat dihadapi secara Bersama. Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2020 menyatakan rasa optimisnya bahwa tahun 2021 tahun *recovery* dan tahun *rebound* (kebangkitan) ekonomi nasional, demikian juga halnya dengan perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tentu kita tidak perlu menunggu tahun 2021 untuk dapat memulihkan perekonomian. Perlu disiapkan *Grand Design* pemulihan dan kebangkitan ekonomi. Strategi dan upaya yang nyata harus disiapkan, dan secepat mungkin untuk dilaksanakan. Strategi-strategi yang dapat dilaksanakan adalah:

1. Identifikasi dan Klasifikasi

Pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung segera melakukan identifikasi dan klasifikasi atau pengelompokan sektor atau bidang usaha dari yang besar terkena dampak sampai ke yang terkecil terkena dampak pandemi covid-19.

2. Akselerasi Realisasi Investasi

Dampak pandemi covid-19 yang telah menyebabkan meningkatnya angka tingkat pengangguran terbuka, yang berdampak pada meningkatnya tingkat kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus segera mempercepat realisasi

investasi yang sempat tertunda, dan harus lebih gencar mempromosikan potensi dan peluang investasi yang dapat dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik berskala nasional, maupun internasional.

3. Akselerasi Realisasi Serapan Anggaran

Percepatan realisasi serapan anggaran, baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN diyakini juga akan mampu menggerakkan perekonomian daerah, pelaksanaan proyek-proyek pembangunan akan mampu banyak menyerap tenaga kerja, dan juga memberikan *mutiflier effect* pada sektor-sektor yang lain, seperti rumah makan, toko bangunan, dan usaha-usaha lainnya, yang selanjutnya dapat memperkecil angka kemiskinan.

4. Prioritas *Recovery* UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini dikenal tahan terhadap krisis, juga mengalami keterpurukan saat menghadapi pandemi covid-19, oleh karena itu diperlukan upaya dan strategi yang tepat dari pemerintah daerah untuk dapat segera memulihkan kinerja UMKM ini. Sunarso (2020), mengungkapkan bahwa upaya mempercepat pemulihan ekonomi pasca covid-19 adalah dengan menyalurkan kredit yang menasar segmen UMKM. Harapannya, ini menjadi pengungkit bagi bergerakinya sektor riil seperti distribusi, transportasi dan perdagangan.

5. Fokus pada Sektor Unggulan

Pemerintah sudah harus mulai memberikan prioritas kepada sektor-sektor unggulan seperti pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terkena dampak dari pandemi covid-19. Perlu Langkah-langkah dan strategi khusus untuk membangkitkan sektor pariwisata. Pada tahun pertama setelah pandemi covid-19 akan menjadi tantangan berat bagi sektor pariwisata (Assaf & Scudery, 2020). Pada tahap pertama pemulihan sektor pariwisata pemerintah harus lebih memprioritaskan pembangunan sektor pariwisata dengan sasaran utama wisatawan dalam negeri. Seiring dengan semakin kondusifnya situasi dan kondisi, sasaran wisatawan mulai ditujukan pada wisatawan mancanegara.

6. Stabilitas Keuangan Daerah

Pemerintah daerah harus cermat dalam menyusun rancangan APBD pada waktu yang akan datang. Kondisi perekonomian daerah yang saat ini masih sangat tergantung pada dana pusat baik itu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun dana perimbangan lainnya, menuntut pemerintah daerah harus cermat dalam menyusun APBD, sehingga kondisi ekonomi yang sudah terpuruk akibat pandemi covid-19 tidak menjadi semakin parah. Pemerintah daerah harus tetap optimis dalam meningkatkan derajat kemandirian daerah, dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Saat ini banyak daerah yang mulai mengarahkan kepada dana pinjaman untuk memulihkan perekonomian, Langkah ini dapat ditempuh sebagai pilihan terakhir, karena jika hal itu terpaksa dilakukan harus dengan pertimbangan yang cermat. Salah dalam pengambilan keputusan, justru akan semakin memperparah kondisi perekonomian. Memburuknya kondisi perekonomian justru akan menyebabkan kemampuan daerah dalam mengelola pinjaman, baik jangka pendek, maupun jangka panjang mengalami penurunan (Santoso, 2003).

7. Optimalisasi IT

Untuk mempercepat pemulihan perekonomian pasca pandemi covid-19, mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan fungsi IT atau teknologi informasi. Tanpa penggunaan IT yang optimal, berbagai rencana dan target yang telah ditetapkan akan sulit tercapai. Abiodun & Sundai (2013) mengungkapkan pentingnya peran teknologi informasi dalam perekonomian sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Nigeria. Hal ini tentunya dapat menjadi inspirasi untuk dapat diterapkan di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

C. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang akselerasi pemulihan perekonomian dan stabilitas keuangan daerah pasca Covid-19 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah yang sangat terpuukul perekonomiannya yang diakibatkan pandemi covid-19. Pandemi Covid-19 menyebabkan melambat atau terhentinya aktivitas perekonomian yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran, menurunnya pendapatan masyarakat dan sektor usaha, menurunnya penerimaan pemerintah baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun penerimaan lainnya, menurunnya kapasitas fiskal daerah, meningkatnya tingkat kemiskinan, dan dampak-dampak negatif lainnya terhadap perekonomian.
- b. Pemerintah daerah harus menyiapkan berbagai strategi dalam pemulihan perekonomian daerah, seperti: Identifikasi dan klasifikasi sektor-sektor yang terdampak, akselerasi realisasi investasi, akselerasi realisasi serapan anggaran, perhatian pada sektor unggulan, prioritas pemulihan UMKM, stabilitas keuangan daerah, dan optimalisasi penggunaan teknologi Informasi.

2. Saran

- a. Pemerintah daerah bersama stakeholders terkait seperti DPRD, Akademisi, Pengusaha, BUMN, dan stakeholders lainnya harus bersinergi secara totalitas untuk mempercepat memulihkan perekonomian, dengan langkah-langkah taktis dan implementatif.
- b. Pemerintah bersama DPRD harus benar-benar mencermati kinerja APBD, dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi.
- c. Pemerintah harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam menangani upaya mempercepat pemulihan ekonomi.
- d. Pemerintah daerah dapat memberikan stimulus berupa relaksasi pajak terhadap sektor usaha yang terdampak Covid-19, dengan tujuan agar perusahaan tetap dapat memberikan penghasilan bagi pekerjanya secara wajar, yang selanjutnya dapat mempercepat pemulihan UMKM.
- e. Daerah perdesaan tetap perlu diperhatikan dengan mencermati realisasi alokasi dana desa, karena daerah perdesaan terbukti lebih mampu

mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan perkotaan.

Daftar Pustaka

- Abiodun, O.O., dan Sundai, A, I (2013). Poverty Alleviation Through Information and Communication Technology: A case Study of Nigeria. *International Journal of Multidisciplinary Sciences and Engineering*, 4 (7), 20-24.
- Assaf A & Scudery R (2020). Covid-19 and The Recovery of The Tourism Industry. *Tourism Economic, The business and Finance. Journal. Sagepub.com/home/teu*
- Santoso, R, P (2003). Analisis Pinjaman Sebagai Potensi Pembiayaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan. Kajian Ekonomi Negara Berkembang*, 8 (2), 147-158
- Sunarso (2020). *Langkah BRI Dorong Akselerasi Pemulihan Ekonomi Lewat Kebangkitan UMKM*. Jawa Pos.com
- Zuhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143-149. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.213>

Website/Literatur Lain :

- (1) BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2020
- (2) BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2020
- (3) Bank Indonesia (2020). *Kajian Ekonomi Regional*. Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (4) DJPB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2020

RECOFUSING DAN REALOKASI ANGGARAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Rulyanti Susi Wardhani

*Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung
rulyantiwardhani67@gmail.com*

A. Pendahuluan

Akibat dari pandemi Covid-19 yang sangat luar biasa adalah perekonomian nasional dan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini menyebabkan Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk melindungi masyarakat dan perekonomian yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden No.54/2020. Upaya terus dilakukan dalam penanganan Covid-19 secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan realokasi dan *refocusing* anggaran belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2020.

Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor:119/2813/Sj dan 117/KMK.07/2020 terkait dengan Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan COVID-9, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Hasil Penyesuaian tersebut dicantumkan dalam Laporan Penyesuaian APBD (Laporan APBD) dan wajib dilaporkan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran dalam suatu usaha pencapaian sasaran anggaran. Proses ini ditetapkan siapa yang akan berperan dalam melaksanakan sebagian kegiatan pencapaian sasaran anggaran dan ditetapkan pula sumber daya yang disediakan bagi pemegang peran

tersebut. Berdanus (2012), Brownell (1983) serta Wardhani dan Suhdi (2020) mengemukakan bahwa partisipasi anggaran sebagai suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun terkait refocusing dan realokasi anggaran pemerintah daerah dalam rangka penanganan Covid-19 menurut data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri tahun 2020 memaparkan alokasi anggaran penanganan Covid-19 dengan nominal Rp56.571.490.043.798,50 (56,57T). Alokasi tersebut terdiri dari 3 pos yaitu pos penanganan kesehatan dengan jumlah Rp 24.099.526.126.034,40 (24,10T), atau 42,60%; kemudian pos penanganan dampak ekonomi dengan jumlah Rp 7.129.338.158.132,32 (7,13T), atau 12,60%; serta pos penyediaan jaring pengaman sosial berjumlah Rp 25.342.625.759.637,70 (25,34T) atau 44,80% dari keseluruhan alokasi anggaran penanganan Covid-19.

Terdapat 5 daerah terbesar serta 5 daerah terkecil dalam pengalokasian anggaran penanganan Covid-19 yaitu sebagai berikut :

No	Daerah Terbesar		Daerah Terkecil	
	Provinsi	Penanganan Covid-19 (Rp)	Provinsi	Penanganan Covid-19 (Rp)
1.	Prov. DKI Jakarta	10.640.901.596.980	Prov. Jambi	49.276.705.321
2.	Prov. Jawa Barat	8.013.708.790.648	Prov. Sulawesi Barat	36.655.766.744
3.	Prov. Jawa Timur	2.391.097.521.006	Prov. Bengkulu	30.800.000.000
4.	Prov. Jawa Tengah	2.126.915.747.000	Prov. Nusa Tenggara Barat	23.045.474.320
5.	Prov. Aceh	1.792.367.796.000	Prov. Maluku Utara	10.246.072.328

Sumber : Data Kemendagri (Pengalokasian Anggaran Penanganan Covid-19)

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwasanya untuk daerah yang memiliki alokasi anggaran penanganan Covid-19 yang tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta yaitu

sebesar Rp 10.640.901.596.980. Sedangkan daerah dengan alokasi anggaran penanganan Covid-19 yang terendah ada di Provinsi Maluku Utara yakni sebesar Rp 10.246.072.328.

Pada alokasi penanganan kesehatan di Indonesia memiliki jumlah sebesar Rp24.099.526.126.034,40 (24,10T). Alokasi tersebut 40,23% atau sekitar Rp 9.695.687.043.903,08 (9,70T) dialokasikan menjadi anggaran belanja dalam bentuk kegiatan, 12,21% atau sekitar Rp2.941.633.990.482,00 (2,94T) sebagai dana hibah atau bantuan sosial; serta 47,56% atau sekitar Rp11.462.205.091.648,30 (11,46T) dialokasikan untuk anggaran belanja tidak terduga.

No	Daerah Terbesar		Daerah Terkecil	
	Provinsi	Penanganan Kesehatan (Rp)	Provinsi	Penanganan Kesehatan (Rp)
1.	Prov. Jawa Barat	2.884.378.868.798	Prov. Sulawesi Barat	31.908.272.744
2.	Prov. DKI Jakarta	2.672.612.485.796	Prov. Jambi	31.114.475.440
3.	Prov. Jawa Timur	948.160.228.050	Prov. Nusa Tenggara Barat	23.045.474.320
4.	Prov. Jawa Tengah	455.865.362.000	Prov. Bengkulu	15.200.000.000
5.	Prov. Sumatera Utara	352.142.452.285	Prov. Maluku Utara	10.246.072.328

Sumber : Data Kemendagri (Pengalokasian Anggaran Penanganan Kesehatan)

Adapun Pemerintah Daerah Jawa Barat menjadi daerah yang mengalokasikan anggaran penanganan kesehatan tertinggi di Indonesia yakni sebesar Rp 2.884.378.868.798,00. Sedangkan Pemerintah Daerah Maluku Utara menjadi yang terendah yaitu sebesar 10.246.072.328,00.

Selanjutnya perihal alokasi penanganan dampak ekonomi karena Covid-19 memiliki nominal anggaran sebesar Rp 7.129.338.158.132,32 (7,13T). Alokasi ini terdiri dari alokasi dalam bentuk kegiatan senilai Rp 1.619.316.751.351,26 (1,62T), alokasi dalam bentuk hibah

atau bantuan sosial senilai Rp 1.421.289.643.054,00 (1,42T), serta alokasi belanja tak terduga senilai Rp4.088.731.763.733,06 (4,09T).

No	Daerah Terbesar		Daerah Terkecil	
	Provinsi	Penanganan Dampak Ekonomi (Rp)	Provinsi	Penanganan Dampak Ekonomi (Rp)
1.	Prov. Jawa Barat	690.560.000.000,00	Prov. Gorontalo	9.407.570.004
2.	Prov. DKI Jakarta	500.000.000.000,00	Prov. Sumatera Selatan	8.678.920.000
3.	Prov. Jawa Tengah	329.843.068.000,00	Prov. Sulawesi Barat	8.023.988.000
4.	Prov. Jawa Timur	269.937.292.956,00	Prov. Jambi	3.000.000.000
5.	Prov. Aceh	219.400.000.000,00	Prov. Bengkulu	600.000.000

Sumber : Data Kemendagri (Pengalokasian Anggaran Penanganan Dampak Ekonomi)

Provinsi Jawa Barat menjadi Pemerintah Daerah yang mengalokasikan anggaran penanganan dampak ekonomi paling tinggi yaitu sebesar Rp 690.560.000.000,00. Ada sekitar 138 Pemerintah Daerah yang belum menganggarkan untuk penanganan dampak ekonomi akibat Covid-19.

Kemudian mengenai alokasi anggaran penyediaan jaring pengaman sosial memiliki jumlah sebesar Rp 25.342.625.759.637,70 (25,34T). Alokasi ini terdiri dari alokasi dalam bentuk kegiatan sebesar Rp2.946.856.785.729,13 (2,95T), alokasi hibah atau bantuan sosial Rp13.202.324.487.914,00 (13,20T), serta alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp9.193.444.486.012,60 (9,19T).

No	Daerah Terbesar		Daerah Terkecil	
	Provinsi	Penyediaan JPS (Rp)	Provinsi	Penyediaan JPS (Rp)
1.	Prov. DKI Jakarta	7,603,926,654,399	Prov. Jambi	15.162.229.881,00
2.	Prov. Jawa Barat	4.438.769.921.850	Prov. Bengkulu	15.000.000.000,00

3.	Prov. Aceh	1.393.079.866.946	Prov. Kalimantan Utara	15.000.000.000,00
4.	Prov. Jawa Tengah	1.341.207.317.000	Prov. Sulawesi Utara	9.000.000.000,00
5.	Prov. Jawa Timur	1.173.000.000.000	Prov. Sulawesi Barat	915.500.000,00

Sumber : Data Kemendagri (Pengalokasian Anggaran Penanganan Dampak Ekonomi)

Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah yang mengalokasikan anggaran Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tertinggi di Indonesia yakni sebesar Rp 7.603.926.654.399 (7,63T). Terdapat 93 daerah yang belum menganggarkan anggaran Penyediaan Jaring Pengaman Sosial.

Berbicara soal alokasi anggaran untuk penanganan dan pencegahan Covid-19. Hal ini juga berlaku di salah satu Provinsi yang ada di Indonesia yakni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) merealokasikan APBD 2020 sebesar Rp 72,8 miliar untuk penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19.

Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diketahui bahwa total anggaran penanganan Covid-19 yang direalokasikan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 72,8 miliar dengan rincian Rp 32,8 miliar untuk penanganan kesehatan, sedangkan refocusing untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp 40 miliar, dan selanjutnya melaksanakan program yang sudah terjadwal, seperti padat karya dan sejenisnya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan refocusing kegiatan dan realokasi APBD tahun 2020. Hal ini sesuai dengan arahan dari Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 dengan memperhatikan Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020.

Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan bahwa refocusing kegiatan dan realokasi

anggaran tahun 2020 akan fokus pada penanganan pandemi Covid-19, program Jaring Pengaman Sosial dan program kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berdampak.

B. Strategi Kebangkitan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perpu ini dikeluarkan sebagai antisipasi dalam menghadapi risiko yang berdampak pada perekonomian nasional maupun stabilitas sistem keuangan. Dengan terbitnya peraturan ini, Pemerintah Pusat maupun daerah akan melakukan preferensi penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*Refocusing*), penyesuaian alokasi pemotongan maupun penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan kriteria tertentu. Dalam kondisi seperti ini pemerintah telah mengambil langkah yang cepat yaitu melakukan relaksasi keuangan yang dibuktikan dengan keluaran Peraturan Pemerintah serta diperlukan sejumlah strategi yang tepat dalam pengelolaan alokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19.

Strategi pertama, kebijakan relaksasi dalam konteks *good governance*. Adanya peraturan yang detail serta terperinci dalam pengelolaan bantuan dari pihak ketiga oleh pemerintah daerah perlu diberlakukan. Peralnya pemerintah perlu menetapkan ukuran sinergitas antara penggunaan sumber daya dengan tingkat kinerja keberhasilan penanganan darurat untuk pandemi Covid-19 mulai dari tujuan sampai proses dari kinerja tersebut.

Tidak hanya itu, dengan adanya kebijakan tertulis atau aturan dalam alokasi anggaran penanggulangan pandemi Covid-19 serta menetapkan kebijakan tertulis perihal pencatatan dan pelaporan keuangan tentunya akan meningkatkan sinergitas antara auditor eksternal dan pengawasan internal dalam pengawalan serta post audit anggaran keuangan yang digunakan dalam penanganan Covid-19.

Strategi kedua, fokus kegiatan *Refocusing* kegiatan serta realokasi anggaran tahun 2020 tersebut akan

difokuskan pada kegiatan penanganan pandemi Covid-19, program Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) dan program kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berdampak.

Adapun dalam alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu didorong untuk melaksanakan optimalisasi pemakaian anggaran hasil refocusing secara efisien contohnya yaitu dengan melakukan pengurangan belanja rutin sebesar 50%, pengurangan belanja perjalanan dinas sebesar 50%, penghentian aktivitas belanja barang yang tidak memiliki relevansi dengan upaya penanganan Covid-19, dan sasarannya tidak menyentuh masyarakat akan dihentikan.

Strategi ketiga, pemanfaatan teknologi dan informasi secara optimal. Pembatasan sosial yang diberlakukan untuk pencegahan penularan Covid-19 ini juga mengakibatkan kegiatan yang bersifat rapat serta beberapa kegiatan tatap muka juga akan dihentikan dan digantikan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini tentunya akan meminimalisir pengeluaran anggaran belanja negara yang awalnya untuk kegiatan rapat tatap muka sekarang dapat dilakukan secara online.

Tidak hanya dapat mencegah penularan Covid-19 dengan tanpa tatap muka, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menghemat anggaran negara. Selain itu, pemerintah juga ikut melakukan negosiasi belanja modal yang sudah kontrak dan perpanjangan masa kerja sampai tahun 2021 dan dibayarkan pada tahun 2021.

C. Kesimpulan dan Saran

Keterpurukan ekonomi Bangka Belitung sebagai dampak dari pandemi Covid-19 harus segera ditemukan strategi yang tepat dalam penanganannya. Salah satunya adalah dengan melakukan refocusing dan realokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19. Refocusing dan Realokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Dengan terbitnya peraturan ini, Pemerintah Pusat maupun daerah akan

melakukan preferensi penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*Refocusing*), penyesuaian alokasi pemotongan maupun penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan kriteria tertentu. Oleh karena itu, dalam alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 pemerintah daerah perlu melaksanakan optimalisasi pemakaian anggaran hasil refocusing secara efisien serta dapat difokuskan pada kegiatan penanganan pandemi Covid-19, program Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) dan program kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak.

Daftar Pustaka

- Aryska Ninda Safitri, Sri Wahyu Apsari, Nurwahidah, 2020, *Komitmen Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan.
- Henny Juliani, 2020, *Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Kementerian Dalam Negeri RI. 2020. *Refocusing dan Realokasi Anggaran Pemerintah Daerah dalam Rangka Penanganan Covid-19*. Jakarta : Kementerian Dalam Negeri RI.
- Kementerian Keuangan RI. 2020. *Pemantauan dan Evaluasi atas Realokasi dan Refocusing APBD untuk Penanganan COVID-19 di Daerah*. Jakarta : Kementerian Keuangan RI.
- Perpu Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2020 *Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penganganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas sistem Keuangan*.

Rulyanti Susi Wardhani. 2020. Relaksasi Keuangan Daerah Khususnya di Era Covid-19. Media online Bangka Pos. Link : <https://bangka.tribunnews.com/2020/05/18/relaksasi-keuangan-daerah-khususnya-di-era-covid-19>

Rulyanti Susi Wardhani. 2020. Tata Kelola Perguruan Tinggi. Scopindo Media Pustaka. Link : https://books.google.co.id/books/about/TATA_KELOLA_PERGURUAN_TINGGI.html?id=GnfhDwAAQBAJ&redir_esc=y

MASA DEPAN *CORONANOMICS* : SEHAT DULU ATAU PERTUMBUAH EKONOMI DULU?

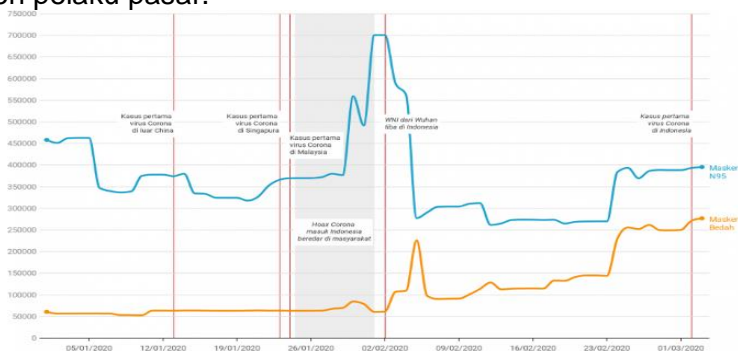
Aning Kesuma Putri

*Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Bangka Belitung
aning@ubb.ac.id*

A. Fakta *Corononomics*

Sejarah masker di Indonesia menjadi barang superior itu terjadi setelah virus corona menjelajah Indonesia pada Februari 2020. Masyarakat yang tidak terbiasa dengan masker, kemudian harus memaksakan diri terbiasa menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Permintaan yang tinggi terhadap masker menyebabkan kelangkaan masker di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan data iprice catalog 2020, harga masker mulut melonjak dari bulan Januari- Maret 2020. Penyebab harga tinggi bukan saja disebabkan oleh tingginya permintaan tetapi disebabkan beberapa stok masker mulut sudah mulai menipis diiringi permainan menumpuk masker oleh pelaku pasar.



Gambar 1. Trend Harga Masker Mulut dari Januari-Maret 2020

**Sumber: Iprice Catalog, 2020 (diunduh pada
<https://iprice.co.id/trend/insights/grafik-harga-masker-medis-n95-covid-19/>)**

Fakta berikutnya adalah dibuatnya skema bekerja dan belajar dari rumah, yang merupakan kebijakan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dan melahirkan istilah pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan ini pertama kali diberlakukan di Jakarta, diikuti beberapa daerah yang memiliki penyebaran tertinggi Covid-19 seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan kota besar lainnya. Fenomena ini menyebabkan berbagai aplikasi komunikasi berbasis online merajai sistem sosial masyarakat yang diberi nama *social distancing* (jaga jarak). Media tersebut diantaranya Zoom, Google Meeting, WhatsApp, Skype dan Slack, sedangkan aplikasi Zenius, Google Class, Ruang Guru, dan Quipper menjadi primadona bagi anak-anak sekolah untuk belajar di rumah. Perputaran uang di masyarakat pun beralih ke pembayaran online, hingga jasa keuangan digital mengalami peningkatan permintaan, diantaranya seperti OVO, Link Aja, dan lainnya. Sistem belanja online menjadi alternative utama dalam memenuhi kebutuhan di masa-masa PSBB.

Penggunaan komunikasi online, jasa keuangan online dan pembelajaran online menyumbang pertumbuhan yang besar bagi Indonesia selama masa pandemi. Selama triwulan I tahun 2020 pertumbuhan jasa keuangan dan asuransi sekitar 10,67 persen sedangkan informasi dan komunikasi tumbuh 9,81 persen.

Fakta ketika adalah tumbuhnya jasa kesehatan dan asuransi pada triwulan I tahun 2020 sebesar 10,39 persen. Covid-19 meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Asuransi mulai merancang tawaran primier untuk penderita Covid-19. Jasa penjahit baju alat pelindung diri (APD) yang digunakan tenaga medis untuk merawat pasien Covid-19 juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jasa kesehatan yang diminta masyarakat.

Coronanomics berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi mitra dagang Indonesia yang terdiri dari Tiongkok, Amerika Serikat, Singapura, Korea Selatan, Vietnam, Hongkong dan Uni Eropa. Pada triwulan I tahun 2020 pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada mitra dagang Hongkong sebesar 8,9 persen dan Tiongkok sebesar 6,8 persen, disebabkan diberlakukannya *lockdown* di

Negara tersebut, khususnya daerah Wuhan yang merupakan daerah penyebaran pertama Covid-19 dan salah satu pusat perdagangan di Tiongkok.

Kebijakan *lockdown* berakibat pada menurunnya sektor pariwisata Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang 12 persen dari total kunjungan wisatawan berasal dari Tiongkok. Kerugian sektor pariwisata sekitar 500 juta USD atau Rp 7,2 triliun (kurs Rp 14.547 per dollar US). Devisa Indonesia hilang sekitar 4 miliar USD atau Rp 54,8 triliun seiring ditutupnya jalur penerbangan Tiongkok selama setahun.

Fakta lainnya seputar coronanomics adalah meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia, maupun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peningkatan pengangguran disebabkan oleh banyaknya perdagangan besar dan eceran seperti perdagangan, reparasi, perawatan mobil, sepeda motor dan bukan mobil dan motor mengalami penurunan penjualan, yang mengakibatkan mereka mengurangi biaya produksi. Jasa transportasi seperti angkutan udara, aktivitas pos dan kurir mengalami penurunan aktivitas yang sangat tajam. Industri pengolahan seperti industri kertas dan barang dari kertas, serta penyediaan akomodasi, makanan dan minuman (penginapan, hotel-hotel, dan lainnya) mengalami penurunan permintaan.

Upaya pemerintah mengatasi coronanomics dilakukan dengan merefocusing anggaran sekitar Rp 434,1 triliun, sudah cukup optimal. Anggaran tersebut sebesar 34,55 persen dipergunakan untuk pemulihan ekonomi, 25,34 persen untuk *social safety net* berupa jaringan pengaman social lainnya, cadangan pemenuhan pokok dan operasi pasar, penyesuaian anggaran pendidikan, insentif sembako, insentif pra kerja, penyaluran PHK, subsidi listrik dan subsidi bunga perumahan. Kemudian 17,28 persen digunakan untuk stimulus kesehatan, 16,15 persen dianggarkan untuk mendukung industry dan sisanya untuk relaksasi PPH 21, PPn 22 Impor, PPh 25 badan serta restitusi PPN. Akan lebih baik lagi jika anggaran ini diawasi pengeluarannya, sehingga tidak muncul kasus-kasus korupsi baru.

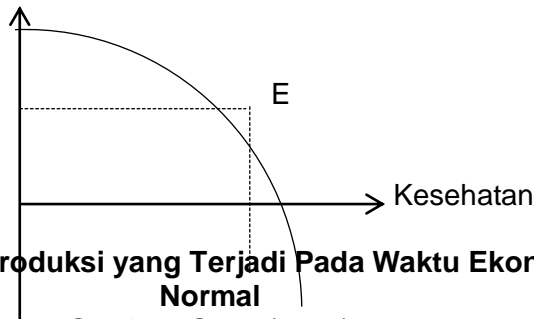
B. Sehat Dulu atau Pertumbuhan Ekonomi dulu

Pertanyaan sehat dulu atau pertumbuhan ekonomi dulu muncul ketika Presiden Ghana memberikan pidato tentang Covid-19, sebagai berikut:

"We know what to do to bring back our economy back to life. What we do not know how to do is to bring people back to life" - His Excellency William Addo Dankwa "Nana" Akufo-Addo President of Ghana, 26 March 2020

Berdasarkan pernyataan tersebut Presiden Ghana, William Addo Dankwa menyatakan bahwa perekonomian bisa dipulihkan tetapi manusia tidak ada yang bisa menghidupkannya kembali. Maka berdasarkan pernyataan tersebut, dibuatlah kesimpulan oleh Gans (2020) dengan kurva berikut:

Ekonomi



Gambar 2. Produksi yang Terjadi Pada Waktu Ekonomi Normal

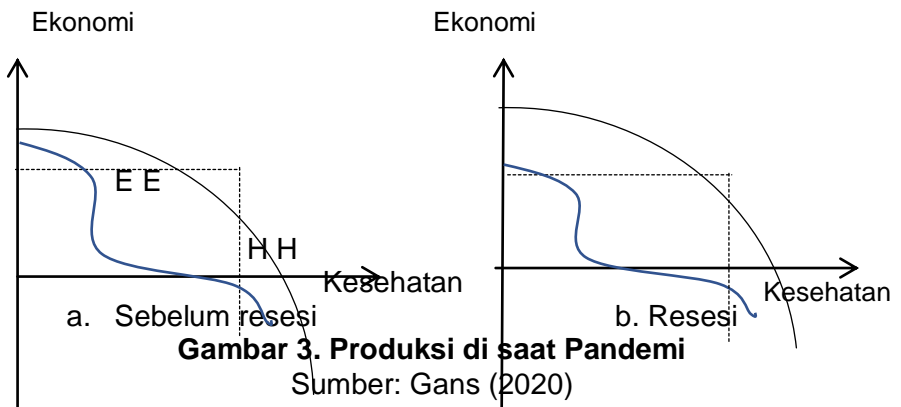
Sumber: Gans (2020)

Gambar 2 menunjukkan kombinasi ekonomi dan kesehatan yang dapat kita capai. Kita bisa, tentu saja, mendapatkan tingkat ekonomi dan kesehatan yang lebih rendah daripada ini tetapi diasumsikan kita tidak melakukannya. Pilihan maksimal kita berada pada titik keseimbangan (E), dengan sejumlah ekonomi dan sejumlah kesehatan.

Kurva berbentuk cekung, berlaku seperti hukum diminishing return. Artinya pada tahap perekonomian normal, ketika yang sehat banyak artinya yang sakit sedikit,

maka perekonomian akan berjalan sangat tinggi, barang yang diproduksi untuk pertumbuhan akan banyak.

Perekonomian akan sangat berbeda ketika terjadi krisis akibat pandemi, seperti Covid-19. Perekonomian dan kesehatan secara beriringan akan mempengaruhi permintaan barang dan jasa di suatu Negara. Keseimbangan pada perekonomian dan kesehatan tidak tercapai, sehingga akan terjadi *trade-off* baik pada sisi perekonomian maupun kesehatan. Baik perekonomian maupun kesehatan tidak bisa dicapai secara bersamaan. Ilustrasi kondisi ini dijelaskan pada gambar 3.



Gambar 3. Produksi di saat Pandemi

Sumber: Gans (2020)

Gambar 3.a menjelaskan pada saat pandemi, keseimbangan antara kesehatan dan perekonomian berada di titik E. Jika ingin lebih sehat (titik H) maka perekonomian yang dikorbankan banyak, karena ada kebijakan *social distancing* untuk memutus mata rantai Covid-19, menyebabkan kegiatan produksi berhenti dan tidak ada kegiatan perekonomian.

Gambar 3.b adalah keadaan dimana jika tidak ada kebijakan *social distancing*, kegiatan perekonomian justru akan semakin menurun di bawah garis keseimbangan E, yang berakibat munculnya resesi ekonomi. Jika dibiarkan terus menerus, titik keseimbangan E akan mendekati keseimbangan kesehatan pada titik H yang akhirnya, akan mengalami penurunan dari segi ekonomi dan kesehatan.

Sehingga dapat disimpulkan perlu dilakukan kebijakan-kebijakan *social distancing* untuk memutus rantai

Covid-19 dan mengembalikan kondisi perekonomian. Langkah yang selanjutnya harus dilakukan adalah menyiapkan diri dari berbagai sektor untuk menghadapi bencana pandemi ini jika belum bisa diselesaikan dalam jangka satu tahun.

C. Strategi Kebangkitan Yang Efektif

Jika dilihat dari alur siklus ekonomi makro, penulis menyusun beberapa strategi kebangkitan yang efektif dalam berdamai dengan Covid-19, antara lain:

Tabel 1. Strategi Berdamai dengan Covid-19

Pelaku Ekonomi	Aktivitas	
	Jangka Pendek	Jangka Panjang
Rumah Tangga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menabung untuk mitigasi bencana pandemi. 2. Konsumsi buah dan jamu. 3. Melek IT, sudah harus mulai menggunakan uang digital. 4. Sadar kesehatan, paling tidak lindungi diri sendiri dan keluarga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mulai melakukan investasi jangka panjang. 2. Mulai menggunakan produk dalam negeri.
Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberdayakan RT, Kepala Desa dalam mitigasi awal bencana pandemi. 2. Efektifkan puskesmas, dokter keluarga dan klinik-klinik. 3. Anggaran yang sudah dikururkan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membenahi <i>Consumens Ignorence</i>, yaitu ketidakpedulian masyarakat terhadap kesehatan, dengan melibatkan RT, Kepala Desa untuk sosialisasi dan pendampingan.

Pelaku Ekonomi	Aktivitas	
	Jangka Pendek	Jangka Panjang
	<p>harus diawasi dan dikawal ketat, agar tepat sasaran.</p> <p>4. Menggunakan produk-produk industri kecil.</p>	<p>2. Meningkatkan jumlah tenaga medis dan alat tekhnis kesehatan.</p> <p>3. Buat peraturan kerjasama industri besar untuk bekerjasama dengan industri kecil dalam penyiapan bahan baku.</p>
Perusahaan	<p>1. Persiapkan basis digitalisasi, mulai dari sistem perekrutan, keuangan, pemasaran, dll.</p> <p>2. Perlu menysihkan anggaran khusus bencana.</p> <p>3. Buat bagian manajerial yang menangani kasus-kasus indikasi persiapan menghadapi kebencanaan alam dan non-alam.</p>	<p>1. Lebih inovatif dalam membaca pasar.</p> <p>2. Perkuat kerjasama dan melibatkan industri-inudistri kecil dalam negeri, khususnya dalam menyediakan bahan baku perusahaan.</p>

Pelaku Ekonomi	Aktivitas	
	Jangka Pendek	Jangka Panjang
Perbankan	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki tim manajemen yang handal dalam membaca pasar keuangan, sehingga bisa bertindak cepat mengatasi perputaran uang di masyarakat. Respon cepat terhadap perubahan teknologi keuangan. 	<ol style="list-style-type: none"> Mengedepankan kucuran kredit kepada usaha-usaha atau industri-industri kecil. Memperkecil terjadinya peluang <i>cyber crime</i> keuangan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyimpan uang.

Sumber: Disusun oleh penulis, 2020

D. Kesimpulan dan Saran

Corononomics akan kita hadapi setahun bahkan lebih dari itu. Pola kehidupan akan berubah, begitu juga pola perekonomian. Bantuan yang diberikan pemerintah untuk mengatasi Covid-19 membuktikan keseriusan pemerintah dalam berdamai dengan pandemi ini. Tinggal peningkatan kesadaran di lini rumah tangga, perusahaan dan sektor lainnya.

Berdamai dengan Covid-19 artinya menghilangkan ego pribadi dengan menahan diri berkerumun, tidak berbelanja berlebihan hingga membuat stok makanan habis, hentikan menumpuk barang dan memperkaya diri sendiri. Berbagi rezeki dan makanan kepada yang kurang mampu. Kuncinya adalah bekerjasama dan bergotong royong.

Daftar Pustaka:

Jurnal:

Gans, Joshua S. (2020). Economics in the age of big data. *Science*, 346(6210). <https://doi.org/10.1126/science.1243089>

Website:

<https://iprice.co.id/trend/insights/grafik-harga-masker-medis-n95-covid-19/>

MITIGASI PANDEMI: BENARKAH TERJADI *TRADE OFF*?

Farida Rahmawati

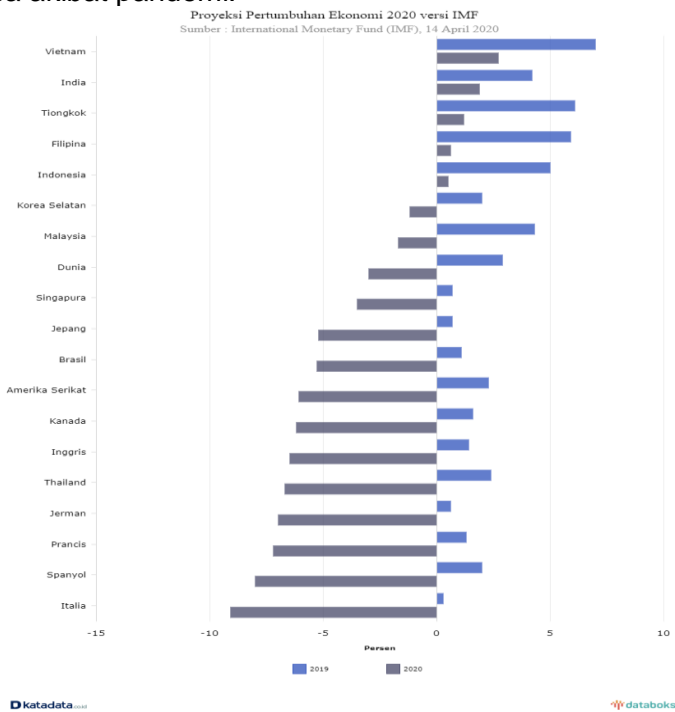
Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang
farida.rahmawati.fe@um.ac.id

Pandemi bukanlah persoalan kesehatan semata, dampaknya dirasakan oleh seluruh aspek kehidupan manusia. Dampak pandemi bukan saja dialami oleh negara berkembang, negara maju sekalipun mengalami kontraksi yang luar biasa. Berbagai pilihan kebijakan diambil untuk menekan penyebaran COVID-19, diantaranya kebijakan penguncian (*lockdwon*) ataupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pilihan kebijakan yang diambil berimplikasi terhadap perekonomian, baik aktivitas produksi, konsumsi maupun distribusi. Beberapa orang meyakini bahwa pilihan kebijakan yang diambil akan memunculkan *trade off*, yakni pilihan antara upaya perbaikan kesehatan dengan upaya perbaikan ekonomi. Tulisan ini mencoba menguraikan mengenai benarkah terjadi *trade off* yang menyertai pilihan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tersebut dan bagaimana meminimalkan risikonya.

A. Fenomena Global Pandemi

Kemunculan pandemic Covid-19 menimbulkan berbagai persoalan di seluruh belahan negara di dunia. Tak hanya pada aspek kesehatan, aspek lainnya juga ikut mengalami guncangan akibat pandemi tersebut, seperti aspek ekonomi, politik, sosial, budaya. Pada aspek ekonomi misalnya, ilustrasi suram bagaimana dampak ekonomi suatu negara akibat pandemi telah banyak dipublikasikan. Sebut saja Amerika Serikat (AS), pada awal terjadinya pandemi, Gubernur The Fed, Jerome Powell menyampaikan bahwa kondisi ekonomi AS akibat pandemi saat ini tengah mencatatkan rekor sebagai pengangguran tertinggi seiring penutupan kegiatan ekonomi pada beberapa sektor. Lebih

lanjut, sejak bulan Maret lalu, terdapat pengajuan klaim pengangguran sebanyak 30 juta orang lebih di negeri paman sam tersebut. Pada kuartal pertama tahun 2020, AS mengalami kontraksi ekonomi sebesar 4,8 persen, angka tersebut merupakan kontraksi terdalam sejak tahun 2008 dan kontraksi pertama sejak tahun 2014. Tak hanya AS, namun juga Italia, Perancis, Spanyol, Inggris dan negara anggota G 20 lainnya mengalami kontraksi ekonomi yang luar biasa. Berikut adalah *display* data yang menunjukkan bahwa tidak hanya negara sedang berkembang, sejumlah negara maju juga mengalami kontraksi ekonomi yang luar biasa akibat pandemi.



Sumber:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/01/negara-g20-terancam-resesi-akibat-serangan-virus-corona>

Mengacu pada data *Trading Economics*, kontraksi perekonomian Eropa sebesar 3,3% pada kuartal pertama tahun 2020. Kontraksi ekonomi di negara-negara tersebut

tentunya akan berdampak dampak besar bagi perekonomian global. Dalam kondisi ideal, output perekonomian nasional negara-negara G 20 menyumbang lebih dari 80% Produk Domestik Bruto (PDB) perekonomian global, sehingga bisa dibayangkan bagaimana suramnya perekonomian global akibat penurunan nilai PDB dari negara anggota G20 tersebut.

B. Kondisi Indonesia

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Keterpurukan ekonomi, baik wilayah regional maupun nasional dirasakan merata hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Beberapa lembaga keuangan merilis **prediksi penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia**, diantaranya *International Monetary Fund (IMF)*, *Organization for Economic Cooperation dan Development (OECD)*, *World Bank*. Lembaga-lembaga keuangan tersebut memberikan proyeksi yang cenderung pesimis seiring berjalannya waktu. Sebut saja IMF misalnya, pada awal April 2020 lembaga ini memprediksi perekonomian Indonesia masih mengalami pertumbuhan sebesar 0,5%, namun 2 bulan berikutnya prediksi tersebut dikoreksi menjadi sebesar minus 0,35%. Koreksi (penurunan sebesar 0,8 poin) ini disebabkan karena semakin tingginya jumlah penduduk Indonesia yang terinfeksi virus tersebut dalam jangka waktu dua bulan terakhir. Lebih lanjut, OECD memprediksi kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2,8 hingga 3,9 persen, sedangkan World bank meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stagnan di level 0 persen. Terhadap proyeksi tersebut, berapapun angkanya, apabila pada dua kuartal pertumbuhan ekonomi negatif secara berturut-turut maka sebenarnya sudah masuk kedalam kategori resesi.

Selain terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi, indikator memburuknya perekonomian akibat pandemi adalah membengkaknya defisit anggaran. Sebelumnya, defisit anggaran diproyeksikan sebesar 5,07% dari PDB. Namun kini, defisit anggaran meningkat menjadi 6,44% dari PDB atau sekitar Rp 903,46 triliun. Melebarnya defisit anggaran terjadi karena berkurangnya penerimaan negara baik dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak.

Sementara di sisi pengeluaran, pemerintah menambahkan anggaran secara besar-besaran untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi. Sesuai kesepakatan bersama, maka beban tersebut akan dibagi antara pemerintah dengan bank Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Kementerian keuangan selaku otoritas fiskal, sedangkan Bank Indonesia selaku otoritas moneter.

Indikator lainnya adalah kemiskinan. SMERU *Research Institute* memprediksi bahwa dampak paling ringan COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi akan menaikkan tingkat kemiskinan dari 9,2% pada September 2019 ke 9,7% pada akhir 2020. Hal ini berarti bahwa akan ada 1,3 juta orang yang jatuh miskin akibat pandemi tersebut. Darii proyeksi itu, maka tingkat kemiskinan akan meningkat menjadi 12,4%, yang artinya 8,5 juta orang akan menjadi miskin. Kontraksi pertumbuhan ekonomi, meningkatnya defisit anggaran dan bertambahnya jumlah penduduk miskin menjadi indikator kuat terpuruknya fundamental ekonomi negeri ini akibat pandemi.

C. Pilihan Kebijakan (*Trade off*): Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Sejumlah negara merumuskan kebijakan guna memutus penyebaran virus, diantaranya kebijakbn penguncian (*lockdown*). di Indonesia sendiri, setidaknya terdapat 3 opsi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pembatasan sosial Berskala Besar (PSBB), Karantina Wilayah (KW), Karantina Kesehatan (KK). Secara legal formal, karantina kewilayahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Sederhananya, karantina kewilayahan atau *lockdown* adalah membatasi perpindahan orang, membatasi kerumunan orang, membatasi gerakan orang demi keselamatan bersama. Namun demikian, dalam penerapan karantina wilayah tersebut diharuskan untuk tetap menjamin akses pendistribusian kebutuhan pokok secara lancar.

Sebuah survei dilakukan oleh oleh IRSA (*International Regional Science Association*) mengenai respon ekonom terkait kebijakan yang diambil pemerintah saat Covid 19 menunjukkan hasil bahwa sebagian besar responden berpendapat bahwa kebijakan ekonomi yang

perlu dilakukan oleh pemerintah seiring dengan penerapan PSBB, KW dan KK adalah jaminan sosial berupa bantuan langsung tunai, bantuan bahan pangan dan subsidi listrik. Hal ini mutlak diperlukan terutama bagi masyarakat miskin, masyarakat rentan, pekerja harian lepas dan pekerja di sektor informal lainnya. Kebijakan lain yang juga diperlukan oleh masyarakat (saat pemberlakuan PSBB, KW dan KK) adalah penyediaan logistik bahan pokok, insentif pajak dan relaksasi kredit untuk sektor bisnis dan rumah tangga.

Kebijakan untuk memutus penyebaran COVID-19 memunculkan permasalahan *trade off* antara kesehatan (*health*) dan kekayaan (*wealth*). Kenapa disebut *trade off*? Secara sederhana, *trade off* didefinisikan sebagai situasi dimana pembuat kebijakan dihadapkan pada sebuah dilema, dikarenakan pilihan kebijakan tersebut bersifat saling meniadakan. *Trade off* tersohor dalam bahasan ekonomi makro adalah pilihan antara kebijakan mengendalikan inflasi dengan pengangguran. Pengendalian inflasi, umumnya dilakukan melalui peningkatan suku bunga agar kecenderungan orang untuk menyimpan uang meningkat. Namun di sisi lain kenaikan suku bunga ini akan direspon dengan penurunan kecenderungan investasi. Pada akhirnya, penurunan investasi akan menyebabkan meningkatnya pengangguran. Begitulah gambaran sederhana dari *trade off*.

Kebijakan yang ditempuh untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, baik itu pihan *lockdwon* ataupun PSBB akan menghentikan laju aktivitas ekonomi, baik itu produksi, konsumsi, distribusi. Namun demikian, fenomena ini hanya akan terjadi dalam jangka pendek. Artinya, membatasi mobilitas orang sama juga dengan membatasi aktivitas ekonomi. Itulah mengapa sebagian orang meyakini terjadi *trade off* antara kesehatan dengan kesejahteraan. Kesehatan menjadi penentu tinggi rendahnya produktivitas perekonomian. Semakin baik kondisi kesehatan, maka semakin tinggi pula produktivitas sehingga berpeluang besar meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karenanya, pemerintah meyakini bahwa kebijakan untuk melonggarkan PSBB bisa berjalan beriringan, sehingga tidak akan terjadi *trade off*. Membangun optimisme seperti ini memang penting dilakukan, terutama sebagai modal pembentukan

sentimen positif pasar. Terbentuknya sentimen positif pasar akan mampu meningkatkan investasi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang komprehensif untuk mencegah penyebaran virus korona untuk menyelamatkan nyawa dan kesehatan manusia perlu diambil dengan kesadaran bahwa aktivitas ekonomi memang akan berkurang secara signifikan dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, justru faktor kesehatan tersebutlah yang akan berdampak besar terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi.

D. Pengembangan Sektor Wisata Bangka Belitung dalam Menyongsong *New Normal*

Pariwisata merupakan motor penggerak (*engine of growth*) perekonomian daerah. Sektor pariwisata juga diyakini sebagai sektor andalan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan (Setijawan, 2018). Bahkan, beberapa sektor pariwisata strategis mampu menjadi penggerak perekonomian nasional, salah satunya Bangka Belitung. Memiliki pesona keindahan alam dan potensi pendukung sektor pertanian yang sangat berlimpah, perkembangan wisata Bangka Belitung diyakini akan semakin pesat. Bangka Belitung berkontribusi sebesar 0,47 persen terhadap total PDB Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Bangka Belitung tahun 2020, maka penyumbang PDRB terbesar adalah sektor industri pengolahan (sebesar 19,59 persen), disusul kemudian oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 17,94 persen. Artinya, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga termasuk sektor potensial dalam prioritas pengembangan perekonomian daerah.

Salah satu pendekatan dalam pengembangan wisata adalah wisata berkelanjutan dengan mensinergikan tiga pilar, yakni ekonomi, sosial dan lingkungan. Tidak jarang ditemukan fakta bahwa pengembangan pariwisata guna meningkatkan pendapatan daerah ternyata justru berpotensi merusak lingkungan setempat (Haryanto, 2014). Karena itulah, pariwisata tidak hanya dilihat sebagai sebuah bentuk aktivitas ekonomi namun juga dilihat sebagai aktivitas sosial yang harus bisa dipertanggungjawabkan (Teguh, 2008). Lebih lanjut, disebutkan bahwa konsep pariwisata

berkelanjutan tersebut setidaknya terdiri dari kriteria *environmental responsibility, local economic vitality, cultural sensitivity, experiential richness*.

Dalam hal menghadapi persiapan *new normal*, maka daerah memegang peranan penting untuk mempersiapkan sektor pariwisata yang sesuai dengan kriteria protokol pencegahan covid 19. Dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyusun program CHS (*Cleanliness, Health and Safety*) sebagai tatanan *new normal* pada destinasi wisata dengan melibatkan para aktif para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Tidak hanya produktif dan bernilai ekonomi tinggi, nantinya diharapkan pariwisata juga aman dari covid-19. Program tersebut akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yakni simulasi, sosialisasi dan publikasi kepada publik, lalu terakhir adalah uji coba pelaksanaan.

E. Kesimpulan dan Saran

Kontraksi ekonomi akibat pandemi merupakan fenomena global, tidak satupun negara bisa menghindarinya. Pilihan kebijakan yang diambil dipastikan akan memunculkan biaya (*cost*) yang memang harus ditanggung sebagai sebuah resiko. Termasuk di dalamnya adalah *trade off* antara memprioritaskan kesehatan ataukah memprioritaskan ekonomi. Keduanya sama-sama faktor yang sangat fundamental dalam kelangsungan hidup manusia, tak ada satupun yang layak untuk dikorbankan. Fakta terjadinya *trade off* antara keduanya merupakan fenomena yang terjadi dalam jangka pendek, bukan jangka panjang. Memahami bahwa kesehatan merupakan determinan utama penentu produktivitas, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, penting dilakukan. Karenanya, yang bisa diupayakan adalah meminimalkan biaya (*cost*) yang muncul, salah satunya adalah jaminan terhadap kelancaran distribusi barang dan jasa, termasuk distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak, baik bantuan yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah. Berikutnya, segala upaya perlu dilakukan untuk menyiapkan masa normal baru (*the new normal*), termasuk pengembangan sektor pariwisata yang sesuai dengan protokol kesehatan, dimana sektor ini

diperediksi mampu menggiatkan (kembali) perekonomian secara masif, baik penyerapan tenaga kerja, konsumsi, investasi dan lainnya.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2020. Potret Perekonomian Makro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019. <https://babel.bps.go.id/publikasi.html>
- Haryanto, Joko Tri., 2014. Model Pengembangan Ekowisata dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Daerah Studi Kasus Provinsi DIY. *Kawistara*. Vol 4. No. 3
- Setijawan, Arief. 2018. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perspektif Sosial Ekonomi. *Jurnal Planoearth*. Vol. 3. No. 1

Website:

- (1) <https://www.google.com/search?q=hasil+survei+IRSA+covid&oq=hasil+survei+IRSA+covid&aqs=chrome..69i57j33.9719j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#>
- (2) <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/01/negara-g20-terancam-resesi-akibat-serangan-virus-corona>
- (3) <https://katadata.co.id/berita/2020/06/04/lima-negara-maju-yang-terancam-resesi-ekonomi-akibat-pandemi-corona>
- (4) <https://money.kompas.com/read/2020/06/29/134200026/suramnya-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-ri-versi-lembaga-dunia-?page=all>
- (5) <https://mediaindonesia.com/read/detail/314048-covid-19-defisit-apbn-2020-diprakirakan-capai-627>
- (6) <https://www.smeru.or.id/id/content/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-kemiskinan-estimasi-bagi-indonesia>
- (7) <https://katadata.co.id/infografik/2020/05/01/ancaman-kemiskinan-akibat-krisis-covid-19>

TIPPING POINT EKONOMI BANGKA BELITUNG: PENDEKATAN NON LINIER BUSINESS MODEL

Sumiyati

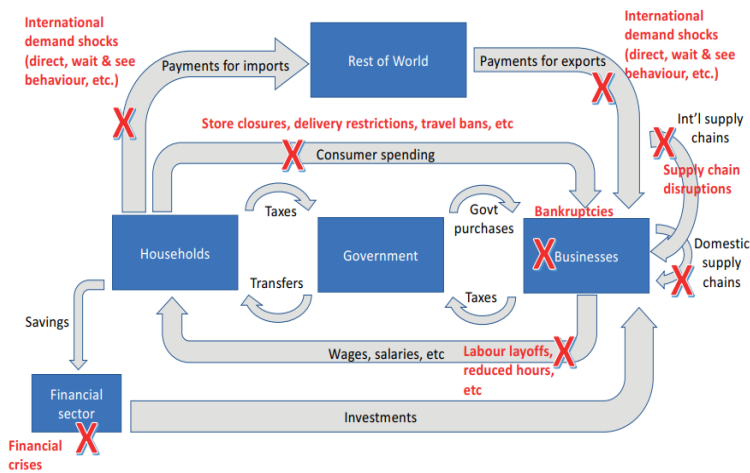
*Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung
sumiyati@ubb.ac.id*

A. Pendahuluan

Sebuah virus mampu mengubah wajah ekonomi dunia yang dimulai sejak akhir tahun 2019 hingga saat ini merebak dari Wuhan, sebuah daerah industri di China ke seluruh dunia dan wabah ini belum menunjukkan akan berakhir sehingga korban jiwa baik yang terinfeksi maupun yang meninggal belum mencapai jumlah final. Meskipun demikian, menurut WHO terdapat 11.327.790 jiwa yang terinfeksi dan korban meninggal sebanyak 532.340 jiwa per tanggal 7 Juli 2020.

Indonesia merupakan salah satu Negara “Red Zone” atau zona merah yang merupakan tanda bahwa masyarakat suatu Negara tersebut terinfeksi Covid-19. Tercatat 64.958 jiwa terindikasi positif Covid-19 dan sebanyak 3.241 orang meninggal dunia (6 Juli 2020). Sementara untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri terdapat 169 kasus dengan 31 orang positif, 2 meninggal dunia dan sisanya sudah dinyatakan sembuh.

Pandemi ini mengubah hampir seluruh wajah dunia dari segala segi baik dari ekonomi, politik, sosial dan budaya. Banyak sistem dan aturan yang kemudian diberlakukan untuk menyesuaikan kondisi yang terjadi saat ini. Misalnya pemberlakuan *lockdown* di beberapa Negara atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa provinsi Indonesia, *social distancing*, karantina, penutupan tempat-tempat pusat bisnis dan kebijakan lainnya. Akibatnya kondisi ekonomi mengalami kejutan tidak terduga dan terkena dampak paling besar seperti yang dikemukakan oleh Baldwin dan di Mauro (2019) dalam diagram ilustrasi berikut:



Source: Based on Baldwin (2020b).

Saat masa pandemi berlangsung, pemerintah memberlakukan *lockdown* yang dalam diagram disebut juga “*rest of world*” dimana seluruh aktivitas manusia di luar rumah dibatasi secara ketat. Dalam kondisi demikian, *supply demand chain* menjadi terputus karena penghentian kegiatan ekonomi seperti ekspor impor yang pada akhirnya mempengaruhi kegiatan bisnis. Akibatnya banyak bisnis mengalami kebangkrutan atau menuju bangkrut. Tentunya pelaku bisnis akan mengurangi tenaga kerja ataupun penundaan pembayaran upah. Jika tidak ada pendapatan, maka pekerja akan mengurangi konsumsi. Pengurangan konsumsi akan mempengaruhi berbagai sektor.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa pandemi ini diprediksi mencapai -3,1 persen (*Bloomberg Economic Growth Forecast*, Juni, 2020). Dampak ekonomi dalam masa pandemi ini mempengaruhi kegiatan ekonomi di wilayah kepulauan seperti Bangka Belitung. Pemberlakuan kebijakan larangan penerbangan dan pelayaran mempengaruhi sektor pariwisata dimana menjadi salah satu sektor andalan Bangka Belitung yang sangat bergantung transportasi laut dan udara. Kondisi ini merupakan titik pergolakan/kritis (*tipping point*) perubahan ekonomi yang terjadi di Bangka Belitung. Tulisan ini mengemukakan tentang perubahan ekonomi di Bangka Belitung dengan

pendekatan beberapa teori untuk memberikan gambaran strategi yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi “*economic shock*”.

B. Tipping Point Ekonomi Bangka Belitung

Ekonomi Bangka Belitung di masa pandemi Covid-19 mengalami yang disebut sebagai *tipping point*. Pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung pada triwulan I tahun 2020 menunjukkan angka penurunan yang signifikan dari 3,99 persen pada triwulan III tahun 2019 menjadi 1,35 persen (BI, Mei 2020). Bangka Belitung yang sebagian besar masih bergantung pada komoditas ekspor logam timah, sawit, karet dan lada. Akibat Covid-19, ekspor komoditas tersebut menjadi terhambat karena beberapa Negara sebagai tujuan ekspor memberlakukan *lockdown*. Tipping point yang diuraikan dalam bab ini adalah tipping point saat terjadi pandemi dan perubahannya menuju masa “*new normal*”.

Malcolm Gladwell menyebutkan bahwa tipping point merupakan peristiwa dramatis dalam suatu epidemi ketika segala sesuatu dapat berubah total secara sekaligus. Artinya, tipping point adalah titik dimana segala sisi berubah karena adanya wabah yang secara cepat menular. Covid-19 tidak hanya epidemi tetapi pandemic karena menyebar secara global.

Malcolm Gladwell menuliskan epidemi yang sangat cepat menular dimulai dari komunitas yang paling kecil dalam suatu tempat. Dia mengilustrasikan bagaimana sepatu kuno merek “Hush Puppies” yang telah lama dilupakan orang tiba-tiba menjadi sangat digemari oleh orang di seluruh dunia dan menjadi tren hanya karena ada sekelompok anak muda yang menggunakannya untuk melengkapi gaya berpakaian. Ada juga ilustrasi dimana epidemi sifilis menyebar di Baltimore pada pertengahan tahun 1990-an dimana bayi yang lahir dengan penyakit ini meningkat secara drastis hingga 500 persen. Banyak teori yang menjelaskan mengapa penyakit ini dapat menular. Mulai dari peredaran narkotik, pengurangan subsidi kesehatan hingga kebijakan meruntuhkan bangunan kumuh diindikasikan sebagai penyebab penyebaran penyakit ini.

Ada tiga kaidah terjadinya suatu epidemi. Pertama, ada orang yang bertindak sebagai agen penginfeksi disebut sebagai Hukum tentang Yang Sedikit (*the Law of the few*). Hukum tentang Yang sedikit ini harus melibatkan tiga pelaku yakni para penghubung (*connectors*), para bijak bestari (*mavens*) dan para penjaja (*salesmen*). Para penghubung ini syarat utamanya adalah kenal banyak orang. Sistem “ketok tular” dalam masa pandemi sosial, peran penghubung hanya sebagian kecil. Ada para bijak bestari yakni orang yang berpengetahuan paling banyak.

Orang yang lebih banyak tahu maka memudahkan memunculkan epidemi. Para mavens tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi mereka mampu menyebarkan pengetahuan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan para bijak bestari ini adalah orang-orang yang tidak mudah terkecoh oleh suatu informasi yang disampaikan. Sekelompok orang yang lain berperan sebagai penjaja. Mereka ini memiliki keterampilan untuk membujuk dan tidak mudah menyerah.

Kedua, agen penginfeksi itu sendiri yang dinamakan sebagai Faktor Kelekatatan (*the Stickiness Factor*). Dalam faktor kelekatan, bagaimana kemudian orang dapat memanfaatkan momen tertentu dengan melakukan berbagai penyesuaian mampu mengatasi permasalahan. Cara mengatasinya dapat dilakukan menyematkan informasi sehalus mungkin dan menemukan pemecahan permasalahan yang dihadapi.

Ketiga, lingkungan tempat beroperasinya agen penginfeksi yang dijelaskan dengan teori Kekuatan Konteks (*the Power of Context*). Prinsip kekuatan konteks adalah bahwa kita lebih sekedar peka terhadap perubahan kontekstual yang memicu sebuah epidemi sangat berbeda dengan perubahan biasa yang terjadi. Ketika pandemi disampaikan dengan bentuk pesan yang mudah diingat dan melekat dalam pikiran akan mampu menggerakkan orang untuk bertindak.

Kesimpulan dari teori tipping point adalah perubahan yang cepat dan radikal bisa saja terjadi karena peristiwa yang tidak terduga. Seperti yang terjadi dengan pandemi Covid-19 yang mengubah kondisi dunia, mengatasinya tentu saja sangat bergantung pada orang dan lingkungan

sekitar kita dan juga oleh kemampuan kita mencerna informasi dan menemukan solusi. Pandemi ini menjadi momen tipping point untuk kita mengatasi hal-hal yang tidak terduga dan penuh ketidakpastian.

Tipping point pandemi covid-19 menjadi momen yang mengubah banyak hal. Dari sisi budaya dan sosial dimana banyak orang yang kemudian memiliki kebiasaan mencuci tangan yang jauh sebelum pandemi sudah sering dikampanyekan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Dari sisi bisnis dan ekonomi, pelaku bisnis serta merta mengubah konsep bisnisnya yang tadinya B2B (*business to business*), sekarang menjadi B2C (*business to consumer*) via aplikasi berbasis website bahkan android. Momen ini harus mampu ditangkap sebagai peluang bisnis baru bagi UMKM di Bangka Belitung. Dimana masa kritis dalam pandemi menjadi tipping point baru untuk melanjutkan aktivitas bisnis (*going concern*).

Tipping point ekonomi dalam era pandemi merupakan fenomena yang kompleks yang muncul secara spontan (Arulanandam, 2020) dapat dinyatakan dengan model nonlinier sebagai berikut:

$$y = f(X_1\beta_1) + \dots + \varepsilon$$

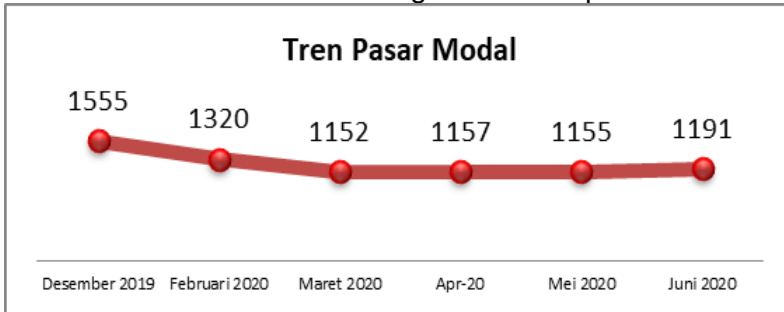
Banyak faktor yang diprediksi mempengaruhi bisnis akibat pandemi dengan β_1 merupakan parameter yang belum diketahui dan ε adalah *error* untuk menyatakan bahwa adanya kesalahan prediksi yang mungkin terjadi. Berdasarkan teori tipping point, maka β_1 kaidah pertama dalam tipping point dengan menerapkan teori Hukum tentang Yang Sedikit, β_2 kaidah kedua yakni faktor kelekatan dan β_3 adalah kaidah ketiga tentang kekuatan konteks. Dalam model dinyatakan sebagai berikut:

$$y = f(X_1\beta_1) + (X_2\beta_2) + (X_3\beta_3) + \varepsilon$$

C. Titik Balik Menuju New Normal

Pasca tipping point pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia pada medio Maret 2020, trend pasar modal Indonesia juga mengalami fase kritis dimana rata-rata harga saham menurun hingga 50% dan bertahan hingga bulan Mei 2020. Sementara memasuki bulan Juni 2020 dimana

banyak Negara yang sudah mencabut kebijakan *lockdown* dan termasuk di Indonesia yang memberikan kelonggaran di sejumlah daerah “*red zone*” yang dinamakan dengan “Era *New Normal*”, pasar modal Indonesia mulai mengalami kenaikan tren yang artinya secara rata-rata kegiatan ekonomi Indonesia kembali bergeliat secara positif.



Sumber: data diolah dari idx.co.id, Juni 2020

Bagaimana hubungan pemodelan nonlinier dengan tipping point dalam menjelaskan siklus bisnis? Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kaidah pertama tipping point adalah Hukum tentang Yang sedikit yang terkait dengan tiga unsur dalam penyebaran epidemi. Tiga unsur tersebut adalah para penghubung yakni orang-orang yang dapat secara langsung menghubungkan bisnis dengan konsumen.

Unsur ini merupakan unsur pertama dalam upaya perbaikan ekonomi Bangka Belitung. Siapa orang-orang ini? Mereka adalah konsumen yang merupakan mata rantai paling atas dalam kegiatan ekonomi. Indonesia merupakan Negara yang konsumtif sehingga seperti apapun kondisi ekonomi Indonesia, pengeluaran konsumen untuk membeli bahan pokok atau bahan lainnya masih diurutan pertama. Dalam ‘ketok tular’ pengguna Hush Puppies dalam buku Tipping Point ini dimulai oleh para konsumen dalam kelompok kecil yakni anak-anak muda (hipster) di pusat perbelanjaan Manhattan.

Para bijak bestari atau maven adalah seorang yang mempunyai informasi banyak tentang sesuatu dan tidak hanya mengumpulkan informasi tetapi juga dia berperan menyampaikannya juga. Para bijak bestari ini bisa jadi pemerintah yang berperan mengumpulkan informasi dari

banyak tempat. Karena dalam pemerintahan, ada banyak orang yang memiliki pengetahuan dan sumber informasi yang terpercaya. Dalam tipping point pandemi yang mengubah situasi ekonomi dan bisnis, peran pemerintah tidak hanya sebagai pengumpul informasi tetapi juga sebagai penghubung antara para penghubung dan para penjaja.

Penjaja adalah orang yang memiliki kemampuan untuk membujuk orang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan harapan. Para penjaja ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam dunia bisnis. Mereka adalah para pelaku bisnis. Tentu saja orang ini harus memiliki kreativitas untuk menyampaikan pesan yang persuasive. Pertanyaannya adalah bagaimana para pelaku bisnis mampu mempengaruhi orang lain di masa yang tidak terduga dimana kondisi pendapatan sebagian konsumen tidak menentu? Meniru adalah cara yang dapat dilakukan agar orang tertarik. Apa yang dilakukan oleh Negara China sehingga dapat menjadi Negara industry yang besar dan ekonomi tetapi bergeliat di tengah pandemi? Mereka meniru, memodifikasi dan menyebarkan.

Parameter kedua (β_2) untuk memahami tipping point adalah teori faktor kelekatan dimana suatu hal dapat berubah dengan melakukan penyesuaian yang sedikit namun sangat penting untuk mengatasi berbagai kekurangan. Malcolm Gladwell memberikan contoh bagaimana tontonan seperti Sesame Street sebagai sarana pengajaran dan menyampaikan informasi yang disajikan akan mudah diingat. Joan Gantz Cooney sebagai produser memanfaatkan media televisi sebagai kelengkapan tersebut.

Tipping point dari pandemi dan kebangkitan menuju era normal yang baru perlu media. Tipping point dapat mengubah beberapa hal sekaligus termasuk dengan konsep bisnis dan kegiatan ekonomi. Misalnya untuk mengurangi *physical distancing*, orang mulai untuk belanja via online dan menggunakan jasa pengantaran atau pengiriman. Bisnis mulai dapat beradaptasi dengan kondisi ini yang sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum terjadinya pandemi dan meningkat pada saat pandemi.

Kaidah tipping point ketiga (β_3) yakni kekuatan konteks yang mengacu pada lingkungan dan perilaku adalah sebuah fungsi dalam konteks sosial. Dalam teori ini hal-hal kecil berperan mengubah sesuatu. Teori ini menunjukkan bahwa untuk menghapus masalah-masalah besar tidak dengan menghapusnya, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil untuk mencegahnya. Dalam konteks ekonomi, kekuatan konteks ini dapat diartikan sebagai perilaku-perilaku konsumen, pelaku bisnis dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung era normal setelah pandemi.

Model non linier selalu menyertakan (ε) atau error dimana sebuah asumsi kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengukuran. Error dapat terjadi karena kesalahan data, human error, atau kesalahan perhitungan. Error mengindikasikan bahwa teori tipping point untuk menjelaskan fenomena pandemic dan new normal tidak dapat dikatakan 100 persen akurat. Bukan hanya teori tipping point sebagai teori dengan pendekatan sosial yang baru, bahkan teori apapun yang sudah sering diuji masih menunjukkan *confidence level* tidak sampai 100 persen.

D. Strategi Kebangkitan Ekonomi Bangka Belitung

Berdasarkan teori tipping point bahwa perubahan besar yang terjadi secara tiba-tiba harus memenuhi kriteria Hukum tentang Yang Sedikit, faktor kelekatan dan kekuatan konteks. Hukum tentang yang sedikit melibatkan para penghubung, bijak bestari dan penjaja. Faktor kelekatan terkait dengan media yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kekuatan konteks mengacu pada perilaku yang mengurangi dampak akibat masalah besar yang timbul.

Apa yang harus dilakukan dalam rangka membangkitkan ekonomi Bangka Belitung? Bukan hanya stimulus-stimulus jangka pendek yang diberikan oleh Pemerintah pusat, namun stimulus lain yang lebih bermanfaat dalam jangka panjang akan sangat membantu pelaku ekonomi baik dari sisi konsumen maupun produsen sehingga setidaknya kesadaran ekonomi harus dimulai sejak sekarang sampai setelah pandemi berakhir meskipun hingga saat ini belum dapat dipastikan.

Kesimpulan dari teori tipping point adalah bagaimana perilaku individu sangat dipengaruhi oleh perilaku kelompok atau kumpulan. Terkait dengan perubahan kondisi ekonomi di masa pandemi juga sangat bergantung bagaimana perilaku kelompok mempengaruhi perilaku perorangan. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian Bangka Belitung:

1. Pencadangan APBD untuk cadangan ketidakpastian ekonomi

Tipping point menyatakan adanya hukum yang sedikit dimana para bijak bestari memberikan upaya untuk mengurangi kepanikan masyarakat. Para bijak bestari adalah pemerintah daerah yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menganggarkan sejumlah dana untuk hal-hal yang diluar prediksi.

Belanja kesehatan terutama dana cadangan untuk menangani masalah yang tidak terduga seperti pandemi covid-19 tidak hanya dilakukan saat pandemi saja tetapi secara konsisten harus ditetapkan. Selama tahun 2020, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menganggarkan Rp 72,8 miliar (antaranews.com) untuk menangani dampak pandemi yang diharapkan konsisten untuk menjadi dana cadangan penanganan kondisi-kondisi yang tidak pasti.

2. Adopsi teknologi bagi UMKM

Para penjaja atau pelaku bisnis membutuhkan dukungan dari para bijak bestari. Penggunaan teknologi dirasa sangat dibutuhkan pada masa pandemi ini dimana kebanyakan masyarakat memilih untuk menghindari keramaian dan mengurangi untuk keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Huang et al., (2020) menyebutkan bahwa pemerintah China memberikan stimulasi investasi bidang teknologi yang bertujuan untuk memperbaiki supply chain.

Adopsi teknologi bagi pelaku usaha yang didukung oleh pemerintah membantu pelaku usaha untuk keberlangsungan hidup usaha. Pemerintah Bangka Belitung perlu melakukan pendataan desa atau wilayah yang belum tersentuh teknologi terutama komunikasi.

3. Penerapan hidup sehat bagi masyarakat

Pada masa pandemi ini dimana kebiasaan masyarakat berubah. Masyarakat yang tadinya tidak terlalu mempedulikan penggunaan masker ketika keluar rumah dan melupakan kebiasaan mencuci tangan menjadi masyarakat yang sangat memperhatikan kebiasaan tersebut.

Penerapan hidup sehat dapat dikatakan sebagai teori tipping point ketiga dimana kekuatan konteks dalam hal ini lingkungan mempengaruhi kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat sangat mempengaruhi kebiasaan individu di kemudian hari.

4. Pemulihan ekonomi bidang pariwisata

Bangka Belitung merupakan provinsi yang sangat bergantung pada geliat usaha pariwisata. Akibat pandemi, kegiatan berwisata menjadi menurun sangat signifikan termasuk usaha sampingannya seperti produk oleh-oleh dan penyewaan kendaraan.

Teori kedua tipping point menyebutkan bahwa adanya kekuatan konteks yang terkait dengan perubahan yang sedikit akan mengubah perilaku keseluruhan. Artinya perlu dilakukan berbagai penyesuaian dalam kegiatan berwisata agar pariwisata tetap bergeliat meskipun pandemi. Industri pariwisata dapat memfokuskan pada wisatawan domestik (dalam wilayah sendiri) dan mencari ide segar untuk menikmati keindahan pariwisata yang ditawarkan tanpa harus mendatanginya. Bisakah ini terjadi? Bukan hal yang tidak mungkin sebagaimana sebuah pandemi mengubah dunia agar segera beradaptasi.

E. Kesimpulan

Pandemi Covid-19 merupakan tipping point yang memaksa dunia untuk berubah termasuk Indonesia. Berbagai segi bidang harus beradaptasi dengan kondisi saat dan pasca pandemi. Namun, sebaliknya tipping point bisa menjadi momentum perubahan wajah dunia bisnis dan ekonomi. Kita mulai harus memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin saja dapat menjadi pemicu perubahan besar.

Berbagai kebijakan telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang diikuti oleh pemerintah daerah

seperti subsidi untuk tagihan listrik, insentif pajak, pelonggaran kebijakan kredit, bantuan langsung tunai dan penyertaan modal Negara. Meskipun kebijakan tersebut telah dilaksanakan, namun perlu dicatat bahwa kebijakan tersebut hanya untuk jangka pendek. Perlu peran berbagai komponen dalam parameter kaidah tipping point untuk memulihkan perekonomian dalam jangka panjang.

Bagaimana kita tahu parameter ini berperan? Dibutuhkan riset-riset yang kredibel untuk memastikan bahwa parameter tipping point model itu berpengaruh atau tidak. Mencari faktor kelekatan dan kekuatan konteks yang bisa saja ada di sekitar kita tanpa kita sadari. Menemukan kedua faktor tersebut butuh observasi dan upaya dengan pendekatan-pendekatan rasional.

Daftar Pustaka

- Arulanandam, B. V. 2020. Covid-19 Pandemic, New Normal, and Its Impact on the Regional Economics. *International Webinar Series 3*. Victoria Universitas Australia and Universitas Sriwijaya, Indonesia.
- Baldwin, R., & di Mauro, B. W. 2020. *Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes*. CEPR Press. London.
- Bank Indonesia. 2020. *Laporan Perekonomian Provinsi Bangka Belitung Mei 2020*. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bangka Belitung. Provinsi Bangka Belitung. Indonesia.
- Bloomberg. 2020. *Bloomberg Economic Growth Forecast, Juni, 2020*, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-01/indonesia-slashes-growth-forecast-as-virus-pandemic-takes-toll>
- Gladwell, M. 2002. *Tipping Point: Bagaimana Hal-hal Kecil Berhasil Membuat Perubahan Besar*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Huang, Yi., Lin, Chen., Wang, Pengfei., & Xu, Zhiwei. *Saving China from the coronavirus and economic meltdown: Experiences and lessons. Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes*. A VoxEU.org Book. CEPR Press.

MENDUKUNG PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI PARIWISATA DI PROVINSI BANGKA BELITUNG: PENERAPAN MODIFIKASI KONSEP EKOWISATA BERBASIS PENDEKATAN PENTA-HELIX

Arif Darmawan

*Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Lampung
arif.darmawan@feb.unila.ac.id*

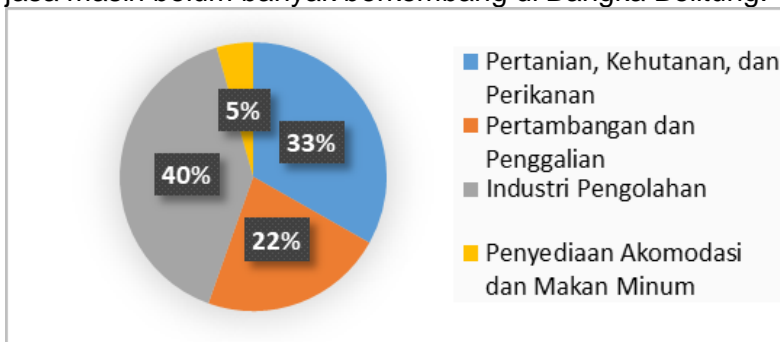
A. Latar Belakang

Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia telah menetapkan 10 destinasi wisata prioritas yang diharapkan dapat menyamai atau bahkan melebihi popularitas Bali sebagai wisata unggulan di Indonesia. Dari 10 destinasi tersebut, empat di antaranya merupakan Kawasan Ekonomi Pariwisata (KEP), yakni Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanjung Kelayang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Morotai di Provinsi Maluku, dan Tanjung Lesung di Provinsi Banten.

Pembangunan KEP bertujuan untuk memudahkan investasi di dalam pembangunan destinasi pariwisata. Dalam hal ini, pembangunan KEP lebih sering menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur yang bersifat fisik, seperti hotel dan tempat rekreasi. Seiring dengan penetapan KEP di keempat tempat tersebut, pembangunan infrastruktur di sekitar kawasan juga semakin gencar. Pengembangan bandara, pelabuhan, dan jalan raya menjadi prioritas utama dalam mendukung pengembangan kawasan pariwisata.

Di sisi lain, pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) di dalam dan luar kawasan wisata juga menjadi hal penting untuk membangun destinasi pariwisata. Di tengah pembangunan infrastruktur penunjang KEP yang menjadi prioritas, kesiapan masyarakat untuk mendukung pariwisata juga selayaknya menjadi perhatian khusus. Pembukaan lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja lokal di bidang pariwisata juga dapat menunjukkan inklusivitas dari KEP.

Apabila dilihat secara lebih seksama, struktur perekonomian Bangka Belitung didominasi oleh industri pengolahan utamanya adalah timah dan diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, Sedangkan, untuk sektor pariwisata, proporsinya hanya mencapai 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonominya banyak terpusat pada akumulasi kapital dan penerapan teknologi tinggi dalam sektor industri pengolahan. Sedangkan, sektor jasa masih belum banyak berkembang di Bangka Belitung.



Gambar 1. Struktur Perekonomian Bangka Belitung Tahun 2020

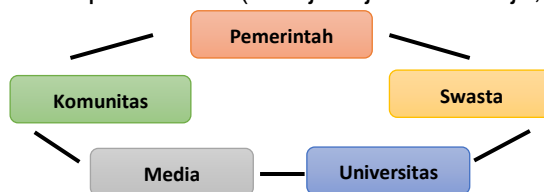
Sumber: BPS, 2020

Dalam meningkatkan perekonomian di sektor pariwisata, perlu adanya strategi khusus guna memberikan implikasi positif kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat Bangka Belitung. Salah satunya adalah dengan penerapan prinsip ekowisata. Menurut Wood (2002), ekowisata adalah bisnis yang menjanjikan, tetapi tetap saja, urusan sosial dan lingkungan adalah target utama dan oleh karena itu diperlukan komitmen untuk memastikan pemenuhan prinsip-prinsip ekowisata ketika menggunakan istilah Ekowisata. Prinsip-prinsip ekowisata menurut Wood (2002: 14) setidaknya bersandar pada beberapa hal. Mengurangi dampak negatif pada alam dan budaya yang dapat merusak tujuan wisata adalah prinsip penting, serta upaya untuk mendidik wisatawan tentang urgensi konservasi. Ekowisata adalah kombinasi dari prinsip pariwisata dan prinsip kelestarian lingkungan. Ini berarti penting untuk memperhatikan bagaimana konteks lingkungan diterapkan dalam industri pariwisata.

Pariwisata bukan hanya urusan bisnis dan pertukaran antara kesenangan dan fasilitas yang disediakan oleh manajemen pariwisata, tetapi lebih dari itu mencakup dimensi yang lebih luas. Berdasarkan studi di atas, penelitian ini merumuskan prinsip-prinsip ekowisata yang relevan. Prinsip-prinsip ini adalah praktik pelestarian lingkungan, upaya untuk mendorong kepedulian wisatawan terhadap lingkungan, atraksi yang mencakup pengalaman lingkungan eksplorasi, praktik pariwisata hijau oleh manajemen pariwisata, dampak pengembangan kawasan wisata terhadap lingkungan, kerentanan wisatawan, konsumsi komoditas yang tidak terbarukan, kontrol dan mendukung pengembangan dari pihak eksternal, dan pemberdayaan masyarakat lokal

B. Upaya/Strategi Kebangkitan Sektor Pariwisata melalui Penerapan Pendekatan Penta Helix

Penetapan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan di Bangka Belitung merupakan modal utama untuk mengembangkan project ekowisata. Ekowisata atau ekoturisme merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Untuk dapat mewujudkan pengembangan project ecowisata di Kepulauan Bangka Belitung diperlukan suatu strategi yang bisa mensinergikan berbagai macam kekuatan. Salah satu strategi yang bisa digunakan ialah Penta Helix Model. Penta Helix Model adalah desain integrasi antara lima sektor yang saling terkoordinasi. Konsep ini merupakan pengembangan dari Teori Quadro Helix untuk Kabupaten/Kota (Hidajat Tjakraatmadja, 2012).



Gambar 2. Konsep Model Pentahelix dalam Optimalisasi Konsep Ekowisata

Sumber: Muhyi, 2017

Gambar diatas menunjukkan pola integrasi sinergis antara lima sektor yang saling melengkapi. Kelima sektor ini adalah (i) Pemerintah, (ii) Swasta, (iii) Universitas, (iv) Media, dan (v) Komunitas. Kolaborasi Penta Helix yang merupakan kegiatan kerjasama antar kelima lini sektor tersebut diketahui akan mempercepat pengembangan perekonomian suatu daerah. Di Indonesia sendiri Penta Helix diterapkan oleh pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata, hal itu karena stakeholders pentahelix dapat dikatakan memiliki unsur-unsur penting didalamnya yang dapat memberi peran dan berpengaruh yang sangat besar dalam pengembangan suatu objek wisata. Berikut peran masing-masing unsur Penta Helix:

1. Pemerintah

Pemerintah pada model pentahelix berperan sebagai regulator. Pemerintah berperan sebagai regulator sekaligus berperan sebagai kontroler yang memiliki peraturan dan tanggung jawab dalam mengembangkan objek wisata. Dalam hal ini melibatkan semua jenis kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, promosi, alokasi keuangan, perizinan, program, Undang-Undang, pengembangan dan pengetahuan, kebijakan inovasi publik, dukungan untuk jaringan inovasi dan kemitraan publik-swasta. Pemerintah juga memiliki peran dalam mengkoordinasi para pemangku kepentingan yang berkontribusi pada pengembangan Kolaborasi tersebut.

2. Swasta

Swasta/Industri pada model pentahelix berperan sebagai enabler. Swasta merupakan entitas yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Swasta berperan sebagai enabler yang menghadirkan infrastruktur, dengan mendukung perubahan pada sumber daya manusia bussines dalam kolaboratif governance selain itu juga berperan sebagai promotor atau seumbangsi anggaran dalam memberikan nilai tambah atau pemasukan berupa pendanaan dalam pengembangan sektor tersebut.

3. Universitas/Akademisi

Akademisi pada model pentahelix berperan sebagai konseptor. Seperti melakukan standarisasi proses pada kegiatan yang dilakukan serta sertifikasi dan ketrampilan sumber daya manusia. Akademisi dalam hal ini merupakan sumber pengetahuan dengan penggunaan konsep, teori-teori terbaru yang relevan dengan kegiatan atau sektor yang dikembangkan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

4. Media

Media pada model pentahelix berperan sebagai expender, dalam hal ini media berperan dalam mendukung publikasi dalam promosi dan membuat brand image. Dalam program pengembangan kerjasama tersebut. Media dapat dikatakan sebagai unsur yang cukup berpengaruh dalam pengembangan wisata, hal itu karena pengaruh perkembangan jaman yang sangat modern sehingga teknologi dan media merajai sehingga apa yang diisukan di media menjadi topik yang cukup berpengaruh dan menimbulkan efek yang sangat bagus dalam pariwisata.

5. Komunitas

Komunitas pada model pentahelix berperan sebagai akselerator. Dalam hal ini komunitas merupakan orang-orang yang memiliki minat yang sama dan relevan dengan bisnis yang berkembang. Komunitas juga bisa bertindak sebagai perantara atau menjadi penghubung antar pemangku kepentingan untuk membantu proses pengembangan sektor tersebut. Komunitas disini bisa termasuk komunitas resmi ataupun masyarakat yang dimana mempunyai peran penting dalam perkembangan kerjasama tersebut.

Sejauh ini pengimplementasian Model Penta Helix telah berjalan dengan baik dan terbukti mempercepat semua bottleneck. Pemerintah selaku salah satu unsur dalam pentahelix telah melakukan berbagai macam dukungan dan perhatian yang konkret dalam mensosialisasikan sektor pariwisata ke masyarakatnya termasuk didalamnya membuat program homestay yang sudah tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) antara Bangka Belitung dengan Bank BTN. Selain itu, pemerintah

daerah juga terus melengkapi fasilitas public yang masih dibawah kapasitas, seperti infrastruktur jalan, listrik air dan telekomunikasi. Tak mau kalah dengan pemerintah Swasta/industri juga langsung tersambung dan bergerak cepat, mereka mengerjakan amenities seperti hotel, convention, resort, restoran, *coffee*, hingga *airlines*. Selain itu, mereka juga melakukan konsorsium dengan pemerintah provinsi untuk mempercepat pengembangan pariwisata di Bangka Belitung. Berbagai komunitas yang ada di Bangka Belitung pun turut mempromosikan budaya, adat istiadat, kuliner dan kesenian mereka untuk menaikkan nilai atraksi kawasan destinasi mereka.

C. Kesimpulan dan Saran

Provinsi Bangka Belitung memiliki potensi yang sangat besar di sektor pariwisata. Potensi yang besar ini tentu saja tidak boleh disia-siakan. Sektor pariwisata di Bangka Belitung sangat strategis untuk dikembangkan dengan pendekatan ekowisata. Pengolahan aset wisata yang baik akan memberikan dampak yang krusial bagi perekonomian daerah, khususnya perekonomian masyarakat. Provinsi Bangka Belitung memiliki kesempatan yang besar untuk mewujudkan pengembangan ekowisata sebagai upaya bentuk pembangunan berkelanjutan, untuk itu diperlukan diperlukan suatu strategi yang bisa mensinergikan berbagai macam kekuatan. Salah satu strategi yang bisa digunakan ialah Penta Helix Model. Penta Helix Model adalah desain integrasi antara lima sektor yang saling terkoordinasi dan saling melengkapi. Kelima sektor tersebut ialah (i) Pemerintah, (ii) Swasta, (iii) Universitas, (iv) Media, dan (v) Komunitas. Kolaborasi Penta Helix yang merupakan kegiatan kerjasama antar kelima sektor tersebut diharapkan akan membantu mewujudkan peningkatan pariwisata di Bangka Belitung, sehingga sektor unggulan pariwisata bisa terwujud.

Daftar Pustaka

- Kementerian Perdagangan. 2014. *Analisis Dampak Kebijakan Ekspor Timah Terhadap Kinerja Timah Indonesia*. Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri: Jakarta.
- Muhyi, Herwan Abdul., Chan, Arianis., Sukoco, Iwan., & Herawaty Tety. 2017. The Penta Helix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City. *Review Integrative Business & Economics Research*. Vol 6 (1), 412-417.
- Nur Firdaus dan Nur Hadiati Endah. 2015. Accelerating The Development of Bangka Island Through Sustainable Tourism by Strengthening The Roles of Multi-Stakeholder. *International Journal of Administrative Science and Organization*, Vol. 22: 3, 171.
- Salim, Emil. 1990. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Sulista. 2019. Peran Masyarakat dan Daya Tarik Ekonomi Bagi Penambang. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*.
- Hidajat Tjakraatmadja, Jann. 2012. Socio-distribution Network Analysis: an Exploratory Study of Indonesian Magazine Distribution Channel. *Jurnal Manajemen Teknologi*. Volume 11 Number 2.
- Wood, Megan Epler. 2002. *Ecotourism: Principles, Practices & Policies for Sustainability*. UNEP & International Ecotourism Society.

Website :

- (1) <https://babel.bps.go.id/dynamictable/2020/02/17/531/-ipg-indeks-pembangunan-gender-ipg-menurut-kabupaten-kota-2010-2019.html> (Diakses pada 28 Juni 2020, 19.45)
- (2) <https://babel.bps.go.id/dynamictable/2017/06/05/357/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-2002-2018-ribu-jiwa-.html> (Diakses pada 28 Juni 2020, 20.05)
- (3) <https://babel.bps.go.id/statictable/2015/06/28/36/produksi-biji-timah-provinsi-kepulauan-bangka-belitung-perbulan-tahun-2008-2014-ton-sn-.html> (Diakses pada 28 Juni 2020, 19.25)

STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM BERDAYA SAING DI ERA NEW NORMAL PANDEMI COVID-19

Juhari

*STIE Pertiba Pangkalpinang
juharitz@gmail.com*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak Covid-19 terutama pada sisi ekonomi. Indonesia yang didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor ini karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional yang cukup besar (Pakpahan, 2020). Hal ini, dapat diperoleh dari berbagai data yang mendukung bahwa eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan angka yang signifikan, yakni mencapai 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Di Indonesia sampai tahun 2018 terdapat sekitar 58,97 juta UMKM dengan rincian jumlah usaha mikro ada sebanyak 58,91 juta unit, usaha kecil 59.260 unit dan usaha menengah 4.987 unit. Dari jumlah tersebut, sektor UMKM mampu menyerap tenaga kerja 116,73 juta orang atau 97,02% dari total angkatan kerja yang bekerja. UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar dan krusial bagi perekonomian kita secara makro. Kementerian Koperasi dan UKM RI melaporkan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62.9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (Ukmindonesia, 2018)

Pada tahun 2017 jumlah UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 225.401 UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM itu tumbuh begitu pesat. Jumlah UMKM yang banyak ini menjadikan UMKM memiliki peran yang strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. UMKM mampu memberikan kontribusi 60,34 persen

terhadap produk domestik bruto (PDB). Tak hanya itu, sektor UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja dengan tumbuh dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen dalam periode lima tahun terakhir (Febriyantoro & Arisandi, 2018). Dengan pesatnya pertumbuhan jumlah UMKM tersebut, maka akan meningkatnya daya saing UMKM untuk tetap eksis menopang ekonomi daerah dan bahkan secara ekonomi bisa memperkokoh perekonomian nasional.

Pemerintah harus cepat untuk mengantisipasi dampak Covid-19 terhadap perekonomian secara keseluruhan (“Revitalization Strategy for Small and Medium Enterprises after Corona Virus Disease Pandemic (Covid-19) in Yogyakarta,” 2020) UMKM dituntut untuk tetap eksis dalam memperkokoh perekonomian bangsa, sehingga harus mematuhi protokol kesehatan Covid 19 yang menjadi tantangan baru untuk bertransformasi dari UMKM tradisional menjadi UMKM digital. Karena, beberapa UMKM yang sudah digital, lebih mampu bertahan dimasa pandemi.

Pandemi Covid-19 ini bisa menyebabkan terjadinya penurunan tingkat penjualan dan bisa memperparah masalah yang dialami UMKM seperti: kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir dan terbatasnya pemasaran (Suci, 2017). Memperhatikan kondisi ini, Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM di Pusat dan Dinas Koperasi dan UKM di daerah perlu untuk mendorong UMKM untuk tetap bertahan, melakukan digitalisasi dalam menjalankan pemasaran produknya dan mengenali peluang usaha baru di masa pandemi, misalnya: pembuatan masker kain dan *handsanitizer*. Sebaliknya, Ada beberapa sektor UMKM yang justru meningkat saat pandemi seperti hobi produk *outdoor* dan *indoor* yang naik hingga 60%, produk kesehatan naik 90% dan produk makanan herbal naik 200% dan bahan baku naik 300% (Masduki, 2020).

Pada era yang serba digital seperti saat ini dan dalam upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19, bisnis dan penjualan produk banyak dilakukan secara online dan e-commerce. Hasil kajian dari (Statista, 2017), bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam penjualan dengan e-commerce pada tahun 2017 lalu mencapai Rp 102 triliun.

Melihat hal tersebut, potensi pasar dengan *e-commerce* sangat besar, khususnya bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing usaha.

UMKM sudah banyak yang menggunakan teknologi digital dan *e-commerce*. Berdasarkan data BPS tercatat 3,79 juta pelaku UMKM yang telah memanfaatkan teknologi digital atau bisnis *e-commerce*. Kebanyakan pelaku UMKM memanfaatkan *platform market place* utama yang ada di tanah air, seperti Tokopedia, bukalapak, blibli, lazada, shopee dan toko online lainnya. Tetapi, melihat data tersebut, masih banyak UMKM yang belum memanfaatkan teknologi digital. Itu berarti, mayoritas pelaku UMKM memiliki daya saing yang masih rendah. Dengan teknologi digital potensi profit ekonomi UMKM sangat besar karena pendapatan bisa meningkat hingga 80%, dan penambahan jumlah tenaga kerja sampai 50%. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi digital dan bergabung dengan *platform digital*, UMKM memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memasarkan produknya dengan jangkauan yang lebih luas dan menghemat biaya iklan. Ekspor produk UMKM nasional masih 14 persen, sementara Malaysia saja sudah di atas 20 persen, melihat perbandingan ini dinyatakan bahwa kemampuan daya saing UMKM masih rendah dibandingkan negara berkembang lainnya.

Pemerintah selaku pemangku kebijakan harus mendorong UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan daya saing tinggi terutama di era pandemic Covid-19. Dengan daya saing tinggi ini, UMKM bisa cepat naik kelas dan dapat menyumbangkan kontribusi yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung khususnya. Pemerintah perlu meningkatkan ekspor produk UMKM. Karena hingga saat ini ekspor UMKM di Indonesia masih cukup rendah jika dibandingkan negara-negara lainnya, sehingga ini tantangan besar bagi Kementerian Koperasi dan UKM untuk meningkatkannya.

Menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat meninjau produk kerajinan di Galery PLUT UMKM, Pangkalpinang, Senin (6/7/20) bahwa potensi Bangka Belitung luar biasa dan harus dikembangkan dengan meningkatkan kualitas produknya. Peningkatan kualitas dan

daya saing agar produk unggulan Bangka Belitung bisa bersaing dipasar global. Menteri Koperasi dan UKM menuturkan bahwa kuliner, produk olahan laut, kerajinan dan lainnya memiliki potensi. Diharapkan pemerintah daerah mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas melalui pelatihan dan kemitraan dengan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) UMKM serta *stakeholders* lainnya.

Berdasarkan fakta, data dan informasi tentang kondisi UMKM di Indonesia dan khususnya di Bangka Belitung, Bagaimanakah formulasi dan strategi pengembangan UMKM yang tepat untuk meningkatkan daya saing usaha di era new normal pandemik Covid-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?.

B. Pengertian UMKM

Pengertian UMKM Menurut (Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, 2008) Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa, pengertian usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro; Usaha kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil; Usaha menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

C. Lima Skema Perlindungan dan Pemulihan UMKM di Era Pandemi Covid 19

Pemerintah menyiapkan lima skema untuk perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ditengah pandemi Covid-19 :

1. Skema pertama diperuntukkan bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang masuk kategori miskin dan rentan terdampak Covid-19. Para pelaku usaha dalam skema tersebut diupayakan agar masuk sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah. Pemerintah memastikan bahwa mereka ini masuk sebagai bagian dari penerima bansos (bantuan sosial) baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), paket sembako, bantuan sosial tunai, BLT (bantuan langsung tunai) desa, maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan Kartu Prakerja.
2. Skema kedua, berbicara mengenai insentif perpajakan yang berlaku bagi para pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Terhadap mereka, pemerintah telah menurunkan tarif PPh final selama enam bulan. Di sini pemerintah telah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5 menjadi 0 persen selama periode enam bulan dimulai dari April sampai September 2020.
3. Skema ketiga yaitu: relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM. Skema ini meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat), UMi (Kredit Ultramikro), PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera), LPDB (lembaga pengelola dana bergulir), hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian.
4. Skema keempat yaitu pemerintah juga akan memberlakukan perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. Dalam skema ini, pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja darurat yang dirancang khusus bagi pelaku UMKM yang merasakan dampak Covid-19.
5. Skema kelima yaitu pemerintah melalui kementerian, lembaga BUMN, dan pemerintah daerah akan bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, utamanya pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi Covid-19. Misalnya BUMN atau BUMD menjadi *offtaker* (penyerap) bagi hasil produksi para pelaku UMKM baik di bidang pertanian, perikanan, kuliner, sampai di industri rumah tangga.

Dari lima skema yang disiapkan oleh pemerintah tersebut, diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi stimulus ekonomi yang menyentuh sektor UMKM. Sehingga, pelaku UMKM mampu bertahan, menjalankan aktivitas produksinya dan tetap eksis untuk meningkatkan daya saing selama pandemi Covid-19.

D. Strategi Pengembangan UMKM Berdaya Saing di Era New Normal Pandemi Covid-19

1. Pelaku UMKM Bangka Belitung harus tetap semangat, kreatif dan inovatif. Kondisi pandemi mendorong pelaku UMKM untuk segera berbenah dan bertransformasi ke digital dengan memanfaatkan *ecommerce* dan media sosial sehingga mampu meningkatkan penjualan produk UMKM, melakukan komunikasi pemasaran dengan konsumen, mengembangkan jaringan pasar yang lebih luas lagi, memajukan usahanya dan meningkatkan daya saing (Elvina, 2019). Pemanfaatan internet khususnya media sosial sebagai suatu media promosi untuk meraih *marketplace* para milenial masih dirasakan sangat efektif. Karena media sosial sebagai media promosi dipandang memiliki kelebihan dibandingkan media lain, antara lain tidak adanya batasan waktu dan tempat, sehingga pasar yang dapat dijangkau lebih luas dan pelaku UMKM mampu memberikan informasi kepada konsumen kapan dan di mana saja. Selain itu, dari segi biaya media sosial jauh lebih murah dibandingkan dengan media promosi lainnya. Menurut (Purwana ES, Dedi, Rahmi, Aditya, 2017) Media sosial seperti website, Facebook, Twitter, Instagram, Path, Youtube, dan Blog merupakan *platform digital marketing* memiliki peranan penting dalam melakukan komunikasi pemasaran produk demi bertahan dan memperluas market-nya (pasar). Media sosial tidak hanya untuk memperkenalkan produk dan menaikkan penjualan saja, tetapi juga bisa digunakan untuk *awarenesses*, *branding*, menarik konsumen baru serta melakukan riset pasar.
2. Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM harus berperan aktif untuk mendorong pelaku UMKM dengan memberikan dan memfasilitasi pelatihan-pelatihan pengembangan kapasitas UMKM, akses permodalan dan

pemasaran dengan *stakeholders*, pendampingan usaha, pendataan UMKM secara online *valid* dan *up to date*, memfasilitasi gedung pusat pemasaran dan promosi yang representatif bagi produk UMKM, menggelar Ayo membeli produk UMKM Bangka Belitung dan kemudahan akses dalam pemasaran secara digital. Pelatihan yang dapat dilakukan adalah: Pelatihan pemasaran online atau *e-commerce*, pelatihan *market place*, pelatihan desain kemasan, pelatihan ekspor produk dan sebagainya. Pelatihan *marketplace* seperti ini akan memberikan wawasan kepada pelaku UMKM untuk aktif memasarkan produknya melalui *marketplace* nasional seperti bukalapak, tokopedia, bli-bli.com, lazada, dan lain-lain. Selain itu, pelaku UMKM bisa membuat video produknya secara sederhana dan menshare informasi usahanya melalui media sosial dan kepada sesama pelaku UMKM atau mitra, sehingga saling mengisi, mendukung dan membantu promosi.

3. Untuk meningkatkan daya saing usaha, pelaku UMKM harus memproduksi secara kontinyu, meningkatkan kualitas produknya dengan nilai tambah (*added value*) menjadi produk unggulan dengan melengkapi: surat izin usaha, P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) untuk usaha makanan dan minuman, Sertifikat Halal dari MUI, izin BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan), pendaftaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual), temu usaha atau kemitraan, desain kemasan yang menarik, SP adalah Sertifikat Penyuluhan untuk usaha yang diawasi Dinas Kesehatan dan kelengkapan dokumen usaha yang lainnya.
4. Strategi peningkatan daya saing UMKM Indonesia, yang tak kalah pentingnya adalah jiwa kewirausahaan yang tak pantang menyerah (Sedyastuti, 2018). Pelaku UMKM harus memiliki jiwa *entrepreneurship* dan *mindset* yang baik dalam menjalankan usahanya sehingga bisa berkembang dan sukses.
5. Pelaku UMKM yang mempunyai daya saing harus aktif mencari informasi mengenai pelatihan, pendampingan, akses modal, akses pasar, akses produksi dan kebutuhan usaha lainnya melalui kemitraan dengan Dinas Koperasi dan UKM, PLUT (Pusat Layanan Usaha

- Terpadu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Forum UMKM, Perbankan dan mitra usaha lainnya.
6. UMKM yang mempunyai daya saing harus berpartisipasi dalam kegiatan pameran produk unggulan daerah, Galery PLUT UMKM dan lomba *Business Plan*, UMKM Babel Academy, Wirausaha Muda Berprestasi, UKM muda yang kreatif, UMKM berprestasi dan lomba-lomba UMKM lokal, nasional maupun internasional.
 7. UMKM harus naik kelas dan bisa menembus pasar ekspor, dengan mempelajari prosedur ekspor agar memenuhi persyaratan kesehatan dan sesuai protokol ekspor, Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM melakukan pembinaan calon eksportir dan pelaku promosi atau misi dagang ke luar negeri mengenai produk unggulan daerah dan meningkatkan jumlah UMKM yang bisa menembus pasar ekspor, Pemerintah Daerah mengupayakan pelabuhan di wilayah Bangka Belitung menjadi pelabuhan ekspor (aspek regulasi dan sarana prasarana penunjang), sekarang ini untuk pasar ekspor bisa dilakukan melalui pemasaran online dan aplikasi peta potensi ekspor dan IMACE (*Indonesian Map of Agricultural Commodities Exports*) serta aplikasi lainnya. Contoh yang terbaru adalah Ekspor lidi nipah menjadi potensi ekonomi baru bagi masyarakat Desa Kota Kapur Kabupaten Bangka yang merupakan sesuatu yang menarik dan kreatif.
 8. Pelaku UMKM agar bisa bersaing dan sukses dalam promosi, harus memperhatikan beberapa hal: 1) Pelaku UMKM perlu memahami target pasar, segmentasi pasar dan posisi pasar produk dengan tepat. 2) Pelaku UMKM yang memanfaatkan media sosial harus ikut berkembang secara dinamis mengikuti trend. 3) Konsistensi; Pelaku UMKM harus konsisten dalam melakukan *update* atau postingan informasi produk pada tiap media sosial yang digunakannya. Konsisten dalam waktu upload, konsisten dalam konten, dan konsisten dalam menjawab pertanyaan. 4) Tingkatkan *engagement* dan jangan beli follower. Follower memang menjadi penting dalam suatu media sosial, namun jangan membeli. Tingkatkan lah follower kita secara organik karena itu lebih menjamin.

9. Pelaku UMKM harus meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) usahanya sehingga bisa meningkatkan daya saing usaha dan meningkatkan jumlah SDM UMKM yang terlatih setiap tahunnya.
10. Pada masa New Normal Covid-19 Pelaku UMKM dapat menjual produk yang berkualitas dengan tetap berupaya mematuhi protokol kesehatan: tetap menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan atau memakai *hand sanitizer* saat bertransaksi, sehingga pembeli merasa aman dan nyaman. (Sudiartini et al., 2020).

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Dari hasil kajian yang penulis lakukan pada kesempatan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat lima skema perlindungan dan pemulihan UMKM di tengah Pandemi Covid 19 yang diimplementasikan oleh pemerintah melalui Kementerian atau Dinas Koperasi dan UKM dengan melibatkan *stakeholders* atau mitra yang bisa membantu pengembangan UMKM di era New Normal Pandemi Covid-19 serta berbagai macam strategi yang dapat diterapkan dan dikembangkan dengan baik oleh para pelaku UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar bisa mandiri, berkembang, berdaya saing untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Strategi pengembangan UMKM yang tepat untuk meningkatkan daya saing usaha di era new normal pandemik Covid-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menerapkan formulasi dan strategi:
 - a) Pelaku UMKM harus semangat, kreatif dan inovatif;
 - b) Perlunya peran Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM untuk berperan aktif dalam mendorong pelaku UMKM dengan memberikan dan memfasilitasi pelatihan- pelatihan pengembangan kapasitas UMKM, akses permodalan dan pemasaran dengan *stakeholders*, pendampingan usaha, pendataan UMKM secara online *valid* dan *up to date*, memfasilitasi gedung pusat pemasaran dan promosi

yang representatif bagi produk UMKM, menggelorakan Ayo membeli produk UMKM Bangka Belitung dan kemudahan akses dalam pemasaran secara digital; c) Pelaku UMKM harus memproduksi secara kontinyu, meningkatkan kualitas produknya dengan nilai tambah (*added value*) menjadi produk unggulan daerah dan ekspor; d) Pelaku UMKM harus memiliki jiwa *entrepreneurship* dan *mindset* yang baik dalam menjalankan usahanya sehingga bisa berkembang dan sukses; e) Pelaku UMKM yang mempunyai daya saing harus aktif mencari informasi mengenai pelatihan, pendampingan, akses modal, akses pasar, akses produksi dan kebutuhan usaha lainnya dengan mitra usaha; f) UMKM harus naik kelas dan bisa menembus pasar ekspor; g) Pelaku UMKM harus meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) usahanya; dan h) Pada masa New Normal Covid-19 Pelaku UMKM dapat menjual produk yang berkualitas dengan tetap berupaya mematuhi protokol kesehatan, sehingga tetap bisa berdaya saing walaupun ditengah pandemi Covid-19.

2. Saran

- a. Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM harus berperan aktif untuk mendorong pelaku UMKM dengan memberikan dan memfasilitasi pelatihan-pelatihan, pendampingan usaha, pendataan UMKM secara online, menggelorakan Ayo membeli produk UMKM Bangka Belitung dan kemudahan akses dalam pemasaran secara digital, sehingga tetap bisa berdaya saing walaupun ditengah pandemi Covid-19..
- b. Perlunya sinergisitas pemangku kepentingan (pemerintah, pelaku usaha, BUMN atau perbankan, perguruan tinggi dan masyarakat) untuk meningkatkan daya saing UMKM, sehingga UMKM bisa naik kelas, go ekspor dan menghasilkan produk unggulan daerah yang berkualitas.

Daftar Pustaka

- Elvina, E. (2019). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Menengah (Ukm). *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*. <https://doi.org/10.36987/ECobi.V2i1.722>
- Febriyantoro, M. T., & Arisandi, D. (2018). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Jmd: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*. <https://doi.org/10.26533/Jmd.V1i2.175>
- Masduki, T. (2020). *Ini Kata Teten Masduki Soal Dampak Covid-19 Bagi Umkm*. Cnbc Indonesia.
- Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jihi: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*. <https://doi.org/10.26593/Jihi.V0i0.3870.59-64>
- Purwana Es, Dedi, Rahmi, Aditya, S. (2017). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (Jpmm)*. <https://doi.org/10.21009/Jpmm.001.1.01>
- Revitalization Strategy For Small And Medium Enterprises After Corona Virus Disease Pandemic (Covid-19) In Yogyakarta. (2020). *Journal Of Xi'an University Of Architecture & Technology*. <https://doi.org/10.37896/Jxat12.04/1149>
- Sedyastuti, K. (2018). Analisis Pemberdayaan Umkm Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancah Pasar Global. *Inobis: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*. <https://doi.org/10.31842/Jurnal-Inobis.V2i1.65>
- Statista. (2017). *Facebook Users Worldwide 2017*. In 2017.
- Suci, Y. R. (2017). Development Of Msme (Micro, Small And Medium Enterprises) In Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*.
- Sudartini, N. W. A., Kardini, N. L., Mulyani, P. A., & Sariyani, N. L. P. (2020). Strategi Bisnis Pedagang Kaki Lima Pada Masa Social Distancing Di Kota Denpasar. *Media Bina Ilmiah*. <https://doi.org/10.33758/Mbi.V14i10.562>

Ukmindonesia. (2018). Potret Umkm Indonesia Si Kecil Yang Berperan Besar UKM Indonesia. *Ukmindonesia.id*.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. (2008). Tentang: Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah. *Sekretariat Negara. Jakarta*.

Website:

- (1) [https://www.presidentri.go.id/Siaran-Pers/Lima-Skema-Perlindungan-Dan Pemulihan-Umkm-Di-Tengah-Pandemi-Covid-19/](https://www.presidentri.go.id/Siaran-Pers/Lima-Skema-Perlindungan-Dan-Pemulihan-Umkm-Di-Tengah-Pandemi-Covid-19/) di akses pada tanggal 21 Juli 2020.
- (2) <http://kukm.babelprov.go.id/> di akses pada tanggal 21 Juli 2020.

MENDORONG EKONOMI BANGKA BELITUNG KE PUNCAK PARIWISATA BARU

Berlian Sitorus

BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
versatilevictory@gmail.com

A. Fakta/ Data/ Informasi

Pendapatan industri pariwisata dunia terpuruk pada semester pertama tahun 2020 ini. UNWTO (organisasi pariwisata dunia) menuliskan catatan khusus Covid-19 di laman resminya (<https://www.unwto.org/tourism-covid-19>). **“...Wabah COVID-19 telah membuat dunia terhenti, dan pariwisata menjadi yang paling parah terkena dampak dari semua sektor ekonomi utama. Dengan latar belakang ketidakpastian yang semakin tinggi, informasi terkini dan dapat diandalkan lebih penting dari sebelumnya, baik untuk wisatawan maupun sektor pariwisata.”** Pariwisata Indonesia tak terhindar dari dampak Covid-19 ini. Tercatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada bulan April 2020 hanya 160 ribu. Dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1,3 juta kunjungan, penurunan tamu pastilah terjadi di semua daerah.

Pariwisata di Bangka Belitung pun nyaris lumpuh total. Sejak terbitnya aturan protokol kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19, penerbangan dibatasi, jam buka restoran dikurangi, hotel sepi dan tutup. Berdasarkan rilis BPS, kunjungan tamu di Bangka Belitung sudah turun drastis pada bulan April 2020. Jumlah kunjungan tamu sepanjang bulan April lalu tak sampai 3000 orang (BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020). Padahal sebelum pandemi, jumlah kunjungan bisa mencapai 47 ribuan. Berarti pendapatan dari industri pariwisata hilang 90 persen lebih.

Tabel 1. Dampak Ekonomi Pariwisata Provinsi Kep Bangka Belitung Tahun 2017

U R A I A N	Output (Rp Juta)	PDB (Rp juta)	Kompensasi TK (Rp juta)	Pajak atas Produksi Neto (Rp)	Kesempatan Kerja (orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Nilai Ekonomi Kep Babel	115,076,406	68,949,852	25,984,332	272,372	701,713
B. Nilai Ekonomi Pariwisata	5,416,463	2,796,063	1,972,193	14,435	27,046
1. Wisnus	1,071,490	515,074	168,368	2,230	5,555
2. Wisnus keluar	111,080	56,503	15,921	175	548
3. Wislok	2,228,235	1,039,513	347,918	4,695	13,206
4. Wisnas	31,069	16,643	6,699	69	181
5. Wisman	74,153	34,865	11,649	164	384
6. Investasi	1,870,236	1,114,601	435,543	7,082	6,990
7. Promosi	30,201	18,865	986,097	20	183

Sumber: BPS Provinsi Bangka Belitung

Penurunan tajam ini berlanjut sampai Mei dan Juni. Kalau kondisi ini tak berubah, maka triliunan rupiah berpotensi hilang dari output Bangka Belitung. Mengacu pada hasil hitungan neraca satelit pariwisata (Nesparda) 2017, dampak konsumsi pariwisata terhadap output Provinsi Bangka Belitung mencapai Rp5,4 triliun (tabel 1).

Ternyata, sekitar Rp1,97 triliun merupakan dampak kompensasi tenaga kerja. Jika dibanding Rp25,9 triliun total kompensasi tenaga kerja diperoleh hasil tujuh persen. Artinya, dalam seratus juta rupiah pendapatan yang berasal dari balas jasa tenaga kerja terdapat sekitar tujuh juta yang merupakan dampak dari pariwisata.

Wajib diperhatikan bahwa pariwisata berdampak pada semua lapangan usaha. Ketika seorang tamu datang menginap di Bangka Belitung maka dampak langsungnya dapat dirasakan pada berbagai usaha, seperti: akomodasi dan restoran, transportasi, perdagangan, industri makanan dan minuman. Pada tahap selanjutnya, usaha lain yang berkaitan akan mendapat dampak tak langsung. Misalnya, usaha perikanan. Nelayan akan merasakan dampak berikutnya ketika restoran membeli ikan untuk disajikan kepada tamu tadi. Itulah yang disebut dampak berganda. Pengadaan listrik, gas, air, konstruksi, hingga jasa kesehatan mendapat dampak berganda dari kunjungan tamu tadi. Dampak Konsumsi Pariwisata Terhadap

Kompensasi Tenaga Kerja tersaji pada tabel 2. Jadi, dampak pariwisata bukan hanya pada perhotelan dan transportasi.

Sekarang, terhitung besarnya kehilangan rupiah kalau pariwisata lumpuh. Kekosongan tamu berdampak pada tutupnya hotel dan restorannya. Karyawan dirumahkan sehingga pendapatan hilang. Mengacu hasil hitungan Nesparda 2017, tercatat dampak ekonomi 7,59 persen terhadap kompensasi tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2. Dampak Konsumsi Pariwisata Terhadap Kompensasi Tenaga Kerja Provinsi Kep Bangka Belitung Tahun 2017 (Juta Rp)

Kode Produk	Rincian	Pengeluaran + Pengembangan
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	228 965
2	Pertambangan dan Penggalian	96 161
3	Industri Pengolahan	344 377
4	Pengadaan Listrik, Gas	10 671
5	Pengadaan Air	620
6	Konstruksi	562 408
7	Perdagangan Besar dan Eceran,	116 465
8	Transportasi dan Pergudangan	138 231
9	Peny. Akomodasi dan Makan Minum	287 548
10	Informasi dan Komunikasi	8 650
11	Jasa Keuangan	10 397
12	Real Estate	5 145
13	Jasa Perusahaan	58 162
14	Administrasi Pemerintahan,	12 278
15	Jasa Pendidikan	11 554
16	Jasa Kesehatan dan Keg. Sosial	41 547
17	Jasa lainnya	39 013
Total		1 972 193

Sumber: BPS Provinsi Bangka Belitung, diolah

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pariwisata Bangka Belitung telah terintegrasikan ke dalam sistem ekonomi regional (Sitorus, 2019). Besaran dampak hadirnya pariwisata terhadap total perekonomian Bangka Belitung saat ini mungkin tak jauh beda dengan tahun 2017. Maka, kalau pariwisata lumpuh, lapangan usaha lain juga

ikut merasakan dampak hilangnya pendapatan. Oleh sebab itu, perlu upaya untuk membangkitkan kembali industri pariwisata ini.

B. Upaya/Strategi Kebangkitan

UNWTO merilis kabar gembira pada 23 Juni lalu di Madrid, Spanyol. Riset organisasi pariwisata dunia ini menunjukkan bahwa 22 persen destinasi dunia telah melonggarkan hambatan (UNWTO, 2020). Pembatasan perjalanan karena pandemi diatur menjadi lebih ringan. Sebagian Bandara yang sebelumnya ditutup, sekarang mulai dibuka kembali. Hal ini tentu menjadi peluang bagi pariwisata Bangka Belitung.

Bandara Depati Amir juga sempat ditutup untuk penumpang. Pada bulan Mei dibuka untuk perjalanan dinas atau tugas khusus. Sekarang, tak perlu menyertakan surat tugas, kita bisa melakukan penerbangan. Pelonggaran aturan-aturan ini tentu tak secepat kilat menaikkan jumlah kunjungan tamu. Namun, lambat laun diharapkan ada peningkatan. Entah kembali sampai 47 ribuan atau di bawahnya tak ada yang bisa menjamin. Inilah yang disebut normal baru.

Secara statistik, terkenal kurva normal berbentuk U terbalik. Data-data yang terpola secara normal, awalnya akan meningkat sampai ke puncak, kemudian turun kembali. Nah, puncak pada normal baru kemungkinan tidak akan sama dengan yang lama. Demikian juga kecepatan menuju puncak mungkin berbeda. Jadi, normal baru bisa jadi kunjungan tamu ke Bangka Belitung di bawah 40 ribuan per bulan. Atau, puncak baru mungkin juga lebih tinggi dari sebelumnya.

Kalau pembatasan sudah semakin longgar maka upaya yang perlu digagas adalah memutus keraguan orang untuk berkunjung. Sebab saya kira orang sudah sangat jenuh berdiam diri, mereka ingin “berwisata”, tetapi karena pandemi Covid-19 ada keraguan tertular. Uji PCR/Swab wajib dilakukan massif (rapid test sebaiknya dihentikan).

Intinya adalah menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan. Untuk itu tentu diperlukan hasil tes yang tidak meragukan. Jadi, Pemerintah dan para pemangku kepentingan bisa membuat kalkulasi. Lebih efisien rapid tes

atau PCR/Swab? Kalau memasukkan dampak dari tumbuhnya kepercayaan dan keyakinan, saya lebih menganjurkan PCR/Swab.

C. Kesimpulan dan Saran

Pariwisata yang menjadi pendorong ekonomi telah mengalami kelumpuhan pada awal tahun ini. Dampaknya di Bangka Belitung, potensi hilangnya pendapatan tenaga kerja sekitar tujuh persen. Normal baru telah dikumandangkan dengan harapan ekonomi yang lumpuh karena pandemi Covid-19 bisa bangkit kembali. UNWTO mencatat 22 persen destinasi dunia telah melonggarkan hambatan. Keraguan wisatawan perlu dihilangkan dengan uji yang lebih meyakinkan dan terpercaya.

Daftar Pustaka

- BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2020). Perkembangan Pariwisata dan Transpotasi. In *BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.
- Sitorus, B. (2019). Pola Pengeluaran Wisatawan Di Bangka Belitung. *Jurnal IPTA*, 7(1), 36.
<https://doi.org/10.24843/ipta.2019.v07.i01.p05>
- UNWTO, O. (2020). *TOURISM NEWS Restrictions on Travel Easing as Europe Leads*.

NORMA BARU UNTUK EKONOMI BARU

Dwi Haryadi dan Muhammad Syaiful Anwar

Dosen Fakultas Hukum UBB

dwi83belitung@gmail.com, m.syaifulanwar@gmail.com

Corona Dalam Angka

Wabah pandemi COVID-19 merambah semua aspek kehidupan masyarakat dunia, tidak terkecuali Indonesia. Ibu Pertiwi merasakan imbasnya disemua lini kehidupan. Dapat dikatakan semua sektor terganggu dan tatanan kehidupan normal yang selama ini kita jalani pun harus berubah total. Dibidang pekerjaan misalnya, sejak maret kemarin semua instansi pemerintah maupun swasta mengeluarkan kebijakan *work from home (WFH)*. Padahal selama ini integrasi bekerja dikantor dan kedisiplinan waktunya menjadi indikator penting, bahkan penilaian kinerja dan profesionalitas. Akibatnya kantor sepi dan hanya terlihat beberapa tenaga keamanan serta kebersihan serta beberapa pegawai piket bergantian. Semua rapat dan pertemuan digelar via daring atau online. Dibidang pendidikan, keriuhan sekolah dan kampuspun seketika menjadi sunyi. Tidak ada lagi kewajiban upacara bendera, kegiatan ekstrakurikuler, seminar, kuliah umum, konferensi dan beragam kegiatan siswa dan mahasiswa yang mengundang keramaian. Dampak sistemik juga terasa pada aspek ekonomi nasional. Disaat protocol pencegahan covid berupa jaga jarak harus dipatuhi mau tidak mau kegiatan keramaian, seperti pasar tradisional, mall, restoran, hotel, destinasi wisata semua harus tutup. Pabrik, pusat-pusat industri juga dibatasi bahkan sebagian gulung tikar.

Pola penyebaran virus Corona di Negeri Serumpun Sebalai ini dapat diketahui melalui infografis yang ditampilkan secara *real time* oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang terintegrasi dengan pola penanganan nasional. Dari data yang diperoleh, per tanggal 28 Juni 2020 menunjukkan bahwa pola penyebaran covid di

Bangka Belitung cukup tinggi dimana yang terkonfirmasi positif mencapai 149 orang, status ODP sebanyak 1.100 orang, PDP sebanyak 125 orang, dan OTG sebanyak 3.017 orang (<http://covid19.babelprov.go.id>).

Merosotnya Ekonomi

Badan Pusat Statistik Indonesia, dalam pemaparan datanya, merilis data terbaru pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I-2020. Ekonomi Indonesia masih tumbuh 2,97% hingga pada Triwulan I-2020 secara year on year (yoy). Pertumbuhan di Indonesia secara prinsip cenderung melambat dan dikhawatirkan akan mengakibatkan resesi ekonomi nasional yang cukup signifikan. Mendasarkan pada data dari data data *Bloomberg*, indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat 3,53 persen ke level 4.986,458 pada akhir perdagangan, Selasa (16/6/2020). Dalam sebulan terakhir, laju indeks tengah berada dalam tren positif dengan menguat 9,49 persen. Akan tetapi, pergerakan IHSG tercatat masih mengalami koreksi 20,84 persen secara year to date (ytd). Kapitalisasi pasar indeks telah menguap Rp1.479 triliun dari posisi Rp7.265,01 triliun per 30 Desember 2019 menjadi Rp5.785,22 triliun per akhir sesi, Selasa (16/6/2020) (<https://market.bisnis.com>).

Apabila melihat dari kaca mata ekonomi nasional tersebut, secara tidak langsung perekonomian kita berangsur mengalami degradasi pendapatan negara secara berkesinambungan dan beruntun akibat Covid-19 tersebut. hal tersebut perlu diwaspadai karena pandemi covid ini belum pasti berakhir kapan. Dikarenakan alasan tersebut, negara mengeluarkan konsep dengan sebutan New Normal. New Normal sendiri merupakan sebuah sistem atau pola di masyarakat dengan merubah pola hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari. Pola New Normal ini juga berimbas pada kehidupan ekonomi di Indonesia termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam pelaksanaan di daerah Bangka Belitung sendiri, mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang secara tidak langsung melegitimasi bahwa faktor Covid-19 ini sangat berdampak pada ekonomi dengan adanya pelemahan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan berimplikasi bukan saja pada faktor ekonomi namun juga pada kesejahteraan masyarakat.

Terkait masalah ekonomi di Bangka Belitung sendiri, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bangka Belitung Tantan Heroika, menyatakan bahwa Pada triwulan I 2020 diperkirakan investasi masih akan tertahan sejalan dengan kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian akibat mewabahnya COVID-19. Hal ini terkonfirmasi dengan kontraksi yang lebih dalam terhadap kredit investasi di Bangka Belitung dan dari hasil liaison menunjukkan bahwa preferensi pelaku usaha untuk melakukan investasi menurun di triwulan I 2020. Purchasing Manager Index (PMI) negara mitra ekspor Bangka Belitung masih menunjukkan tren yang menurun hingga Maret 2020. Dikesempatan itu juga, Bank Indonesia memaparkan terkait permasalahan kredit yang tumbuh melambat, bahwa kredit perbankan pada Februari 2020 tumbuh melambat sebesar 4,46 persen (yoy) dibandingkan pada 2019 yang mencapai 16,21 persen (yoy) (<https://babelreview.co.id>)

Upaya Pencegahan dan Realitasnya

Sejak diumumkan oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada tanggal 2 Maret 2020 tentang adanya virus Corona, langkah-langkah strategis langsung diambil. Pemerintah melalui Gugus Tugas Covid-19 pusat juga melakukan zonasi dan membaginya dalam zona merah, kuning dan hijau. Larangan mudik dan pergeseran libur nasional lebaran juga dilakukan. Kesiapsiagaan Pemerintah Pusat dibantu Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk menanggulangi penyebaran Pandemi menunjukkan tindakan nyata negara untuk melindungi warga negaranya (Anwar, 2020. Tindakan nyata tersebut juga dilakukan oleh semua daerah, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Implementasi penanggulangan pandemi disini sebenarnya sudah banyak yang dilakukan oleh Pemprov maupun Kabupaten/Kota. Beberapa kebijakan *extraordinary* pun sudah dilakukan meskipun menimbulkan pro dan kontra. Mulai dari penghentian arus kunjungan menggunakan transportasi laut, dan udara, mengadakan *Rapid Test* kepada simpul-simpul *public domain*, dan melaksanakan protokol kesehatan di tempat-tempat berbasis ekonomi rakyat (pasar, rumah sakit, instansi pemerintahan dll) serta bioskop sampai saat ini belum tayang. Kemudian larangan terhadap kegiatan keramaian mulai dari yang sifatnya privat seperti pesta perkawinan, sunatan, sampai pada kegiatan formal pemerintahan dan dunia pendidikan seperti rapat besar, seminar, sosialisasi dan lain-lain. Ditingkat lokal atau lingkup yang lebih kecil, ada kebijakan tentang Kampung Tegep Mandiri yaitu kampung yang dibentuk guna membantu penanganan penyebaran penularan wabah Covid-19 khusus di daerah tersebut.

Kebijakan di atas dalam realitasnya berbenturan dan menimbulkan dilematis tersendiri karena disatu sisi masyarakat dihimbau untuk melakukan kegiatan di rumah atau *Work From Home (WFH)*, namun di sisi lain dominasi masyarakat merupakan pekerja informal sebagai nelayan dan petani/peladang, penambang yang apabila tidak mencari atau melakukan kegiatan diluar rumah maka tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Contoh lain yang menarik adalah munculnya fenomena “ketidakpedulian” publik saat menjelang Hari Raya Aidul Fitri 1441 Hijriah beberapa waktu yang lalu dimana pasar-pasar ataupun tempat belanja ramai dikunjungi untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Hal ini secara tidak langsung berbenturan antara himbauan pencegahan covid yang paling sederhana, yakni jaga jarak dengan kebiasaan yang sudah melekat pada masyarakat. Inilah yang disebut Bustami Rahman (2020) sebagai *new normal versus old normal*.

Desain New Norma(L) Ekonomi

Data dan fakta sudah jelas menunjukkan merosotnya pertumbuhan ekonomi baik skala nasional, regional dan di Bangka Belitung sendiri. Meskipun tidak

sampai pada pemberlakuan PSBB, namun realitas menunjukkan bahwa ekonomi lokal terganggu, PHK sudah terjadi, dunia pariwisata lesu dan dampaknya kriminalitas menjadi ancaman (Haryadi, 2020). Disisi yang lain, vaksin virus ini belum berhasil diketemukan sampai hari ini. Ditengah sikap acuh sebagian public dengan protokol kesehatan sementara sektor ekonomi perlahan harus segera keluar dari kebuntuan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, patuh tidak patuh, era new normal harus kita masuki bersama agar ekonomi mulai jalan merangkak dan tidak mati suri. New normal pada dasarnya adalah tatanan norma atau aturan baru dalam kehidupan yang harus kita lakukan bersama diluar dari kebiasaan normal selama ini. Tidak mudah, tetapi harus dimulai agar jantung ekonomi mulai berdetak, mulai dari UMKM sampai ekonomi transnasional.

Pertama, norma jaga jarak. Sebelumnya, unit usaha seperti restoran diperluas, meja kursi diperbanyak, tata ruang diatur sedemikian rupa agar daya tampung pembeli semakin banyak. Bahkan bila perlu menyewa ruko disebelahnya. Beberapa bahkan membuka banyak cabang dibeberapa titik lokasi. Akibat covid, jaga jarak sebagai bagian penting norma dalam new normal yang harus dipatuhi membuat daya tampung hanya 50 persen maksimal boleh terisi. Artinya jika tetap mengharapkan konsumen untuk makan ditempat maka desain tata ruang makan harus sesuai protokol covid. Dibeberapa resto berkreaitifitas dengan menempatkan patung atau boneka dikursi kosong dibandingkan hanya dengan memberi tanda silang. Kreativitas dan ide-ide seperti inilah yang dibutuhkan untuk dapat menarik minat pembeli.

Kedua, norma rajin cuci tangan dan periksa suhu badan plus bermasker. Semua sektor ekonomi, mulai penjual kue, bakso gerobak, resto, mall, tempat wisata, hotel dan lain-lain harus siap dengan ketersediaan tempat cuci tangan dan penggunaan handsanitizer. Artinya, air, sabun dan handsanitizer kini menjadi kebutuhan primer disemua unit usaha sehingga konsumen merasa yakin bahwa kesehatan dan pencegahan covid menjadi visi dari unit usaha/produsen. Begitupula dengan petugas khusus yang aktif untuk memeriksa suhu badan dari pengunjung

yang datang. Ini penting untuk pendeteksi awal. Perihal masker, kebijakan melarang orang masuk karena tidak masker sebaiknya tidak dilakukan. Lebih baik memberikan kewajiban disertai dengan menyiapkan masker sehingga tidak kehilangan konsumen. *Ketiga*, Norma untuk saling melindungi. Disamping upaya pencegahan dengan mewajibkan pembeli/konsumen. Tentu bagi produsen/pelayan unit usaha juga harus memahami dan mematuhi protokol covid. Bahkan harus menjadi contoh. *Ketiga* hal ini merupakan protokol dasar yang jadi norma atau aturan baru yang jika dipatuhi era menuju New Normal Ekonomi Baru dapat mudah diwujudkan. Tidak mudah, namun ekonomi harus kembali bangkit dan semuanya tergantung pada kesadaran kita bersama.

Daftar Pustaka

- Anwar, M. Syaiful, *Siapakah Indonesia New Normal*, Opini Babelpos 3 Juni 2020
Haryadi, Dwi, *Kriminalitas di Tengah Covid 19*, Opini Bangkapos, 30 April 2020

Website :

- (1) <http://ubb.ac.id/2020/05/27/pengamat-sosiologi-penerapan-new-normal-vs-old-normal-terkait-situasi-covid-19>
- (2) <http://covid19.babelprov.go.id/>, diakses pada tanggal 29 Juni 2020 pada pukul 09.15 wib
- (3) <https://market.bisnis.com/read/20200617/7/1253706/sri-mulyani-prediksi-ekonomi-kuartal-ii-minus-bagaimana-nasib-ihsg>, diakses pada tanggal 29 Juni 2020 pada pukul 10.00 wib.
- (4) <https://babelreview.co.id/babel-diserang-covid19-aktivitas-ekonomi-melambat-simak-analisa-bi-babel-ini>, diakses pada tanggal 29 Juni 2020 pada pukul 10.00 wib.

BANGKITAN EKONOMI BABEL DI ERA COVID-19 MELALUI SEKTOR PERTANIAN

Ismed Inonu

*Dosen Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi, Universitas
Bangka Belitung
ismedinonu@yahoo.co.id*

A. Fakta/Data dan Informasi

Penyakit yang disebabkan oleh virus corona dengan nama SARS-CoV-2 yang dikenal dengan Coronavirus disease 2019 atau covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Penyakit ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, sehingga pada 11 maret 2020 ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Di Indonesia sendiri, kasus pertama Covid-19 pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020, di Jakarta dan menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia. Sampai dengan tanggal 5 Juli 2020 jumlah kasus positif Covid-19 tercatat 63.479 kasus, yang mengakibatkan 3.171 orang meninggal dunia dan tercatat ada 453 kabupaten/kota di 34 provinsi yang terdampak (Kompas, 5 Juli 2020). Untuk mencegah penyebaran penyakit ini, maka telah dilakukan upaya-upaya memutus mata rantai penyebarannya melalui sejumlah tindakan pembatasan aktivitas di luar rumah, penutupan fasilitas umum seperti pusat-pusat perbelanjaan, rumah ibadah, sekolah, sarana transportasi, dan sebagainya.

Wabah covid-19 yang telah melanda Indonesia dalam waktu lebih kurang 3 bulan telah berdampak tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga berimbas pada perekonomian nasional dan regional secara umum. Semua sektor pembangunan terkena imbas wabah covid-19. Wabah covid-19 masih terus menjangkit dan belum dapat diprediksi kapan akan berakhir, sementara dampak perekonomiannya semakin parah. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya untuk membangkitkan kembali perekonomian, di tengah-tengah masih berlangsungnya wabah covid-19.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, merupakan salah satu dari-34 provinsi di Indonesia yang terdampak wabah covid-19. Meskipun jumlah kasus positif covid-19 dan jumlah korban meninggal dunia di Provinsi Bangka Belitung relatif rendah, tetapi cukup berimbas pada perekonomian Bangka Belitung secara keseluruhan. Hal tersebut ditunjukkan dalam Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bangka Belitung bulan Mei 2020. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa dalam Triwulan I (Januari-Maret), perekonomian Bangka Belitung hanya tumbuh positif sebesar 1,35% (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar 3,99% (yoy). Selain itu, indikator pertumbuhan kinerja perbankan menunjukkan adanya perlambatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit ke masyarakat. Di bidang ketenagakerjaan, meskipun tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (67,89% menjadi 69,93%), tetapi tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami peningkatan dari 3,39 menjadi 3,41% (Perwakilan BI Bangka Belitung 2020). Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi covid-19 disebabkan menurunnya harga komoditas dan permintaan komoditas. Untuk membangkitkan perekonomian Bangka Belitung di tengah pandemik corona, diperlukan upaya-upaya untuk menggerakkan kembali sektor-sektor yang berpotensi berpengaruh positif terhadap perekonomian.

B. Upaya/Strategi Kebangkitan

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling kecil terkena dampak pandemic covid-19, dibandingkan sektor lain. Di tengah melemahnya ekonomi nasional akibat pandemi virus corona, ekspor pertanian tetap memperlihatkan kinerja yang baik. Tercatat, ekspor pertanian April 2020 sebesar US\$0,28 miliar atau tumbuh 12,66 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Warta ekonomi online 2 Juni 2020). Menurut analisis SGD's Center UNPAD, hal tersebut disebabkan dampak dari pembatasan sosial paling minimal di sektor pertanian, meskipun masih ada risiko dari disrupsi rantai penawaran

dan menurunnya permintaan (Yusuf *et al* 2020). Kecilnya dampak pembatasan sosial di sektor pertanian karena pusat produksi pertanian bukan di wilayah padat penduduk, tetapi di perdesaan. Selain itu, komoditi pertanian memiliki elastisitas permintaan yang rendah, sehingga tidak terjadi lonjakan permintaan dalam waktu singkat. Data perekonomian Bangka Belitung menunjukkan sektor pertanian masih dapat tumbuh positif di era pandemik covid-19. Kinerja ekonomi sektor pertanian tumbuh menguat dari 2,04% (yoy) pada triwulan IV 2019 menjadi 5,31% (yoy) pada triwulan I 2020 (WowBabel.com, 18 Mei 2020).

Melihat fakta dan data yang ada, sektor pertanian merupakan salah satu kandidat andalan dalam menggairahkan kembali perekonomian Bangka Belitung. Sektor ini telah terbukti menjadi buffer sektor di masa krisis moneter tahun 1997-1998. Untuk menjadikan sektor pertanian menjadi sektor unggulan untuk membangkitkan perekonomian Bangka Belitung maka diperlukan sejumlah strategi.

Strategi pertama, pemerintah daerah (pemprov dan pemkab/pemkota) harus menunjukkan keberpihakan yang lebih kepada petani di era pandemi covid-19. Selama ini perhatian terhadap pemulihan dampak pandemic lebih terfokus di perkotaan, seperti sektor perdagangan, usaha kecil dan menengah, pedagang kaki lima dan sebagainya. Sementara petani di perdesaan yang notabene juga terkena imbas kurang mendapat perhatian, padahal sumbangsih mereka dalam menjaga keberlangsungan pasokan pangan di perkotaan di masa pembatasan sosial sangat besar. Di tengah ancaman pandemic covid-19, petani masih produktif untuk memasok beras, sayuran, buah dan produk pangan lain. Perhatian dapat ditunjukkan dengan mengalokasikan anggaran pemulihan covid-19 ke sektor pertanian dengan proporsi yang lebih besar, untuk membantu petani dalam pengadaan sarana produksi seperti benih, pupuk, dan pestisida yang sempat terganggu akibat adanya pembatasan moda transportasi. Selain itu, petani membutuhkan pendampingan untuk memproduksi suatu komoditas.

Strategi yang kedua, perlu dilakukan diversifikasi komoditas yang dapat menjadi andalan baru di era

pandemi. Selain komoditas tradisional seperti lada, kelapa sawit, dan karet, petani perlu diberi alternatif komoditas yang memberi mereka peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar dalam waktu singkat. Di masa pandemik dan normal baru, kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang bergizi semakin baik, karena keinginan untuk meningkatkan imunitas tubuh agar tidak mudah terjangkit virus corona. Berkaitan dengan hal tersebut, komoditas sayuran, buah dan bahan jamu-jamuan perlu ditingkatkan produksinya karena adanya kenaikan permintaan. Selain itu, terganggunya rantai pasok sejumlah komoditas akibat adanya pembatasan transportasi, menyebabkan harga-harga komoditas yang selama ini di datangkan dari luar Bangka Belitung melonjak tinggi. Kondisi ini dapat menjadi peluang (*opportunity*) bagi petani di Bangka Belitung untuk mengisi kekurangan pasokan tersebut dengan tingkat harga yang lebih kompetitif. Petani di Kecamatan Lubuk Besar di masa pandemic berhasil memanen bawang merah dengan produktivitas 10-12 ton per hektar. Dengan harga jual ketika panen sebesar Rp. 40 ribu per kg, dalam jangka waktu 3 bulan petani mampu meraup pendapatan Rp. 40 juta sampai dengan Rp. 48 juta. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sendiri telah mencanangkan kabupaten tersebut sebagai sentra produksi bawang merah di Bangka Belitung (Warta Bangka, 27 Mei 2020). Selain bawang merah, peluang yang sama terdapat juga komoditas yang memiliki prospek yang baik diusahakan karena tingginya pasokan dari luar, seperti cabai besar, tomat, bawang putih, dan kopi.

Di masa pandemic, permintaan bahan baku jamu-jamuan seperti jahe merah, temulawak, kunyit, dan kencur meningkat tajam karena masyarakat mengkonsumsi jamu untuk meningkatkan kesehatan dan imunitas tubuh (Republika, 18 April 2020). Komoditi lain yang tidak kalah menjanjikan adalah tanaman hias dan hidroponik. Masa pembatasan aktivitas (di rumah saja) membuat masyarakat khususnya di perkotaan mencari aktivitas yang menyenangkan di rumah. Membudidayakan tanaman hias menjadi *trend* di masa covid-19. Sejumlah spesies tanaman hias meningkat nilai ekonomisnya, dan ini menjadi peluang

bagi petani untuk mendiversifikasi tanaman yang dibudidayakan.

Pemerintah perlu mendorong masyarakat secara swadaya membudidayakan pangan, melalui program pemanfaatan pekarangan rumah dalam bentuk P2L (Pekarangan Pangan Lestari). Budidaya secara hidroponik menjadi *trend* baru sebagai *urban farming* di perkotaan dan pemanfaatan pekarangan, sehingga terbuka peluang usaha untuk membudidayakan sayuran, menjual produk, dan menjadi distributor sarana produksi hidroponik.

Strategi ketiga, pemerintah harus dapat menjamin tata niaga komoditas pertanian yang berkeadilan dan berpihak ke petani. Petani sebagai produsen harus menikmati keuntungan yang paling besar dibandingkan dengan para pelaku tata niaga lain seperti pedagang pengepul, pedagang besar, dan pengecer. Umumnya petani memiliki keterbatasan modal, teknologi, dan pengetahuan, sehingga mereka tidak dapat menguasai rantai distribusi. Rantai distribusi komoditi pertanian perlu diperpendek untuk mengurangi margin harga antara tingkat petani produsen dengan pengecer ke konsumen.. Salah satu upaya adalah petani dikenalkan dengan pemasaran digital dengan pengenalan dan pelatihan aplikasi tertentu, sehingga produk petani dapat langsung dipasarkan ke konsumen tanpa melalui rantai distribusi yang panjang.

C. Kesimpulan dan Saran

Keterpurukan ekonomi Bangka Belitung sebagai imbas dari pandemic covid-19 perlu segera dibangkitkan. Salah satu sektor yang dapat diandalkan adalah sektor pertanian. Sektor pertanian menafkahi bagian terbesar dari masyarakat yang tinggal di pedesaan, sehingga dengan membangkitkan sektor pertanian berarti juga membuka lapangan pekerjaan di tengah tingginya jumlah pengangguran baru akibat pandemic covid-19. Selain itu sektor pertanian diperlukan untuk tetap menjamin ketersediaan pangan. Diperlukan sejumlah strategi kebijakan pemerintah untuk menstimulasi kebangkitan sektor pertanian di era pandemic covid-19.

Daftar Pustaka

- Perkebunan Topang Ekonomi Bangka Belitung di Tengah Pandemi Corona, Kompas, 5 Juli 2020. <https://money.kompas.com/read/2020/05/26/132140526/perkebunan-topang-ekonomi-bangka-belitung-di-tengah-pandemi-corona?page=all>.
- Bupati Ibnu Dorong Desa Lubukbesar Jadi Sentra Bawang Merah. Warta Bangka, 27 Mei 2020. <https://wartabangka.com/berita/2020/05/27/5544/bupati-ibnu-dorong-desa-lubukbesar-jadi-sentra-bawang-merah>
- New Normal Jadi Momentum Bangkitkan Bisnis Pertanian*. Republika Online, 18 April 2020. <https://republika.co.id/berita/qbur6u349/new-normal-jadi-momentum-bangkitkan-bisnis-pertanian>
- Pandemi Covid-19 Sebabkan Ekonomi Babel Melambat. WowBabel.com, 18 Mei 2020. <https://wowbabel.com/2020/05/18/pandemi-covid-19-sebabkan-ekonomi-babel-melambat>
- Yusuf AA, Suganda T, Hermanto, Mansur F, Hadisoemarto P. 2020. Strategi Ekonomi Sektor Pertanian di Tengah Pandemi Covid-19. dgcenter.unpad.ac.id/strategi-ekonomi-sektor-pertanian-di-tengah-pandemi-covid-19/
- Tahan Banting dari Covid-19, Ekspor Pertanian Tumbuh 12,66 Persen*. Warta Ekonomi Co.id tanggal 02 Juni 2020. <https://www.wartaekonomi.co.id/read288115/tahan-banting-dari-covid-19-ekspor-pertanian-tumbuh-1266-persen>

STRATEGI PENGUATAN EKONOMI DI ERA NORMAL BARU PANDEMI COVID-19: OPTIMALISASI POTENSI KELAUTAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Lovaditya Dhika Primaganis

Staf Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kab. Belitung
lovadityad@gmail.com

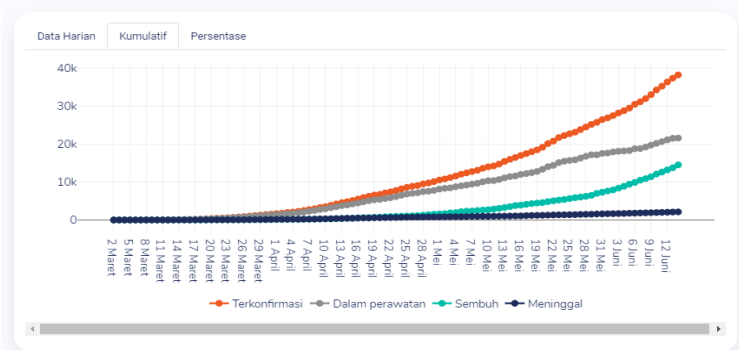
A. Fakta/Data/Informasi

1. Tren kasus pandemi COVID-19 di Indonesia

Memasuki akhir triwulan I, tepatnya pada 2 Maret 2020, Presiden Indonesia Joko Widodo pertama kali mengumumkan bahwa terdapat dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Sejak kejadian tersebut, angka pasien terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan. Per 14 Juni 2020, merujuk pada data rilis Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 adalah 38.277 kasus, dengan rincian 21.612 sedang dalam masa perawatan, 14.531 sembuh, dan 2.134 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Kurva kumulatif perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia sendiri dapat dilihat pada gambar 1.

Grafik Kasus COVID-19 Indonesia

Sumber: covid19.go.id / Last update: 14 Juni 2020



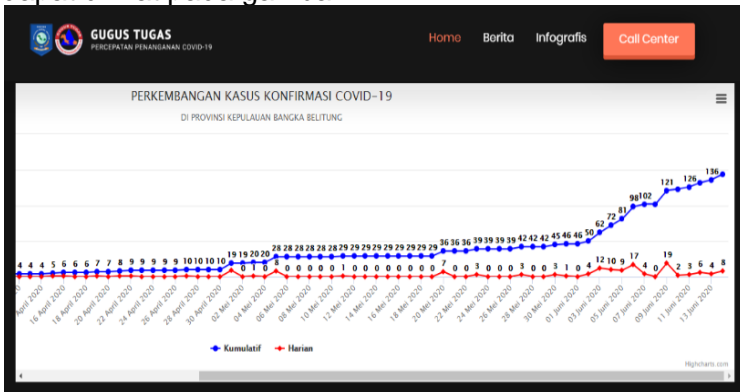
Gambar 1. Kurva Kumulatif kasus COVID-19 di Indonesia

Sumber: <https://covid-19.bps.go.id/>

Dari Gambar 1 dapat kita ketahui bahwa tren kasus COVID-19 pada skala nasional masih terus menanjak dan belum menunjukkan tanda-tanda akan melandai (*flatten*).

2. Tren Kasus Pandemi COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sejalan dengan apa yang terjadi di Indonesia, Provinsi Kepulauan (Prov. Kep.) Bangka Belitung juga mengalami tren peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19. Dilansir dari *website* resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, per 14 Juni 2020, terdapat 144 kasus terkonfirmasi COVID-19, dengan rincian 80 sedang dalam masa perawatan (masih positif), 63 sembuh, dan 1 orang dinyatakan meninggal. Kurva kumulatif dan penambahan harian kasus COVID-19 di Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Kurva Kumulatif dan Harian kasus COVID-19 di Bangka Belitung

Sumber: <http://covid19.babelprov.go.id/>

Dari Gambar 2 dapat kita ketahui bahwa tren kasus COVID-19 di Bangka Belitung juga masih terus menanjak dan belum menunjukkan tanda-tanda akan melandai (*flatten*). Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa: selama beberapa waktu ke depan, masyarakat Bangka Belitung belum bisa leluasa untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Terutama dalam menjalankan kegiatan ekonomi, yang

kemungkinan besar masih harus tunduk kepada aturan pembatasan interaksi dan pemenuhan protokol kesehatan.

3. Pemberlakuan Era Normal Baru Pandemi COVID-19

Selama kurang lebih tiga bulan sejak COVID-19 menyerang Indonesia, pemerintah pusat maupun daerah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk menekan persebaran wabah tersebut. Seperti halnya himbauan penerapan *physical distancing*, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bahkan, beberapa daerah di Indonesia seperti Kota Tegal dan Kota Tasikmalaya sempat menerapkan kebijakan karantina wilayah.

Per 14 Juni 2020, strategi terkini dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia dinyatakan secara tidak langsung oleh Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, 6 Mei 2020 melalui laman resmi Presiden RI. Presiden menyampaikan bahwa hingga ditemukannya vaksin yang efektif, kita (masyarakat) harus hidup berdamai dengan COVID untuk beberapa waktu ke depan (presidenri.go.id).

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kemudian mengeluarkan protokol peralihan dari PSBB menuju *new normal* (normal baru) sebagai pedoman bagi pekerja dan dunia usaha melalui keputusan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 pada 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024, Dr. H. Jazilul Fawaid, turut menanggapi hal tersebut melalui tulisannya yang berjudul Cermat Menerapkan *New Normal* (2020). Dalam tulisannya, ia menyatakan bahwa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama tiga bulan terakhir telah menimbulkan guncangan yang cukup hebat (turbulensi) terhadap perekonomian nasional. Ia juga berpendapat bahwa dapat disimpulkan, kebijakan *normal baru* muncul sebagai kalkulasi rasional terhadap

prakiraan kondisi ekonomi nasional, kompromi terhadap rentang waktu yang cukup lama hingga vaksin ditemukan, serta pemahaman realistis bahwa kemungkinan besar COVID-19 tidak akan pernah hilang dari muka bumi, sehingga masyarakat harus menjajaki kemungkinan untuk hidup berdampingan secara damai.

Hal inilah yang kemudian menjelaskan mengapa meskipun kurva perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia maupun Bangka Belitung belum menunjukkan tanda-tanda akan melandai (*flatten*) sebagaimana terlihat pada Gambar 1 dan 2, namun cepat atau lambat aktivitas ekonomi masyarakat pasti akan segera kembali bergerak. Hidup berdampingan dengan COVID-19 tentu memiliki tantangan tersendiri, penerapan protokol kesehatan di berbagai lini kegiatan ekonomi tidak akan terelakkan. Sistem kerja baru seperti *work from home* atau pergantian *shift* kerja di perkantoran juga mau tak mau menjadi suatu keharusan. Tidak hanya itu, saling ketergantungan ekspor-impor baik antardaerah maupun antarnegara juga berpotensi menemui batu sandungan berupa regulasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik.

Maka dari itu, penting bagi pemerintah daerah serta pemangku kebijakan setempat untuk berkonsolidasi membangun dinding pertahanan yang kokoh guna melindungi seluruh entitas ekonomi dari gelombang normal baru yang sewaktu-waktu dapat menghantam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .

4. Kondisi Terkini Perekonomian Provinsi Bangka Belitung

Sebagaimana telah disinggung pada poin sebelumnya, pandemi Covid-19 memiliki dampak yang luar biasa bagi perekonomian. Tidak hanya berdampak pada level nasional ataupun daerah, pandemi ini juga mengguncang perekonomian dunia. Pada triwulan-I 2020, sejumlah negara seperti Tiongkok, Hongkong, bahkan Singapura mengalami kontraksi ekonomi hingga pertumbuhannya mencatatkan angka minus.

Tak terkecuali di Indonesia. Menurut data BPS, selama triwulan-I 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sebesar 2,97 persen (*y-on-y*). Meskipun tetap

positif, namun pertumbuhannya melambat sebesar 2,1 persen apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan-I 2019 yang sebesar 5,07 persen.

Selanjutnya kita akan beralih pada kondisi perekonomian di wilayah Bangka Belitung sendiri. Pada 5 Mei 2020, BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merilis angka pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung pada triwulan-I 2020 adalah sebesar 1,35 persen (*y-on-y*). Mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan-I 2019 yang sebesar 2,81 persen. Sedangkan apabila dibandingkan dengan triwulan-IV 2019 (*q-to-q*), perekonomian Bangka Belitung di triwulan-I 2020 mengalami kontraksi yang lebih dalam yaitu sebesar 3,66 persen.

Secara agregat tahunan, pergerakan pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung juga menunjukkan tren perlambatan. Berikut ditampilkan sebuah infografis untuk menggambarkan keadaan perekonomian Bangka Belitung selama 3 tahun terakhir dari 2017 hingga 2019:



Sumber: <https://belitungkab.bps.go.id/>; <https://babel.bps.go.id/>

Dari infografis di atas, dapat kita ketahui bersama bahwa tren pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung cenderung melambat dalam kurun waktu 3 tahun ke belakang. Di tambah, fenomena pandemi Covid-19 masih berpeluang menambah beban berat bagi kinerja perekonomian baik pada tingkat nasional maupun daerah. Maka dari itu, merupakan langkah yang tepat bagi pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kep. Bangka Belitung, untuk segera menyusun dan merealisasikan strategi perbaikan perekonomian guna mengantisipasi gempuran yang mungkin membayangi sektor perekonomian Bangka Belitung di masa mendatang.

Secara lebih terperinci untuk melihat gambaran kinerja perekonomian daerah, berikut disajikan tabel yang memuat data nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) serta laju pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung selama 5 tahun terakhir:

Tabel 1. Kondisi Perekonomian Bangka Belitung 2015-2019

Uraian (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018* (5)	2019** (6)
PDRB ADHK 2010 (Juta Rupiah)	45,962,304	47,848,372	49,985,154	52,215,418	53,951,052
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,08	4,10	4,47	4,46	3,32

Ket.:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Sumber: <https://babel.bps.go.id/>

Untuk menyusun strategi penguatan ekonomi yang tepat sasaran, tentu pemerintah daerah harus memetakan sektor utama yang menunjang perekonomian Bangka Belitung hingga nilai dan pertumbuhannya dapat mencapai sebagaimana tertera pada Tabel 1. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, didapatkan 5 sektor terbesar yang menunjang perekonomian selama kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Sektor Penunjang Perekonomian Bangka Belitung 2015-2019

Urutan Kontribusi	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Industri Pengolahan	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Industri Pengolahan		
2	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Industri Pengolahan	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		
3	Perdagangan Besar dan Eceran				
4	Pertambangan dan Penggalian				Konstruksi
5	Konstruksi				Pertambangan dan Penggalian

Sumber: <https://babel.bps.go.id/>, diolah

Besaran nilai dari kontribusi tiap sektor didapatkan dari hasil bagi antara nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sektoral dengan nilai total PDRB ADHB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun yang bersesuaian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor yang ditampilkan pada Tabel 4.2 adalah sektor yang memiliki nilai tambah paling besar bagi perekonomian Bangka Belitung selama lima tahun terakhir.

Dalam jangka waktu 2015 hingga 2019, tercatat hanya terjadi pergeseran sektor penunjang perekonomian sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2016 dan pada tahun 2019. Di mana pada 2016, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menggeser posisi sektor Industri Pengolahan dalam memberikan nilai tambah paling besar bagi perekonomian Bangka Belitung. Sedangkan pada tahun 2019, sektor Konstruksi bertukar posisi dengan sektor Pertambangan dan Penggalian dan menjadi kontributor terbesar keempat penyumbang PDRB Bangka Belitung.

Meskipun demikian, dari tabel tersebut kita dapat menggaris bawahi bahwa lima besar sektor penopang perekonomian Bangka Belitung relatif sama dari tahun ke tahun. Kelima sektor tersebut adalah:

- a. Industri Pengolahan
- b. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- c. Perdagangan Besar dan Eceran
- d. Pertambangan dan Penggalian
- e. Konstruksi

Maka dapat kita ketahui, perekonomian Bangka Belitung dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak menunjukkan tanda-tanda akan adanya kemungkinan mengalami pergeseran (*shifting*) struktur ekonomi di masa mendatang. Sehingga dapat kita simpulkan, apabila pemerintah fokus untuk menunjang keberlangsungan aktivitas pada kelima sektor utama, hal tersebut dapat menjadi strategi penguatan ekonomi yang tepat sasaran bagi Provinsi Kep. Bangka Belitung.

5. Potensi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan bagi Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di masa Normal Baru Pandemi Covid-19

Sebagaimana yang kita ketahui, pada Tabel 2 kita dapat melihat bahwa sektor Industri Pengolahan sangat dominan perannya dalam menunjang perekonomian Prov. Kep. Babel. Namun demikian, berdasarkan data yang bersumber dari BPS Prov. Babel, sejak 2010, subsektor yang menjadi penyumbang terbesar pada sektor tersebut adalah subsektor Industri Logam Dasar. Sebagai contoh yang terjadi pada 2019, kontribusi subsektor tersebut pada sektor Industri pengolahan mencapai 48,34 persen.

Di sisi lain, kita juga mengetahui bahwa hasil dari pengolahan logam dasar sebagian besar orientasinya adalah sebagai barang ekspor, baik dengan target pasar luar daerah di Indonesia maupun luar negeri. Dengan karakteristiknya tersebut, maka penguatan di bidang Industri Pengolahan bisa menjadi strategi yang kurang efektif karena di era normal baru pandemi Covid-19, regulasi transaksi ekspor impor yang berlaku baik antardaerah di Indonesia maupun antarnegara kemungkinan besar belum kembali leluasa sebagaimana sebelum terdapat situasi pandemi.

Maka dari itu, kita dapat menggeser perhatian pada sektor penunjang terbesar kedua di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Selain karena alasan yang telah dipaparkan, terdapat keunggulan lain yang dimiliki sektor ini apabila dibandingkan dengan sektor Industri Pengolahan, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menghasilkan produk-produk yang tergolong ke dalam

kebutuhan pokok dan sudah pasti dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Sejak adanya pandemi Covid-19, isu ketahanan pangan telah menjadi momok tersendiri, bukan hanya bagi Indonesia, melainkan juga bagi seluruh negara di dunia yang sedang berupaya menghadapi wabah tersebut. Pada akhirnya, manusia tetap membutuhkan makan, tidak peduli apakah pasokan makanan pokok dari dalam maupun luar daerah sedang terkendala atau tidak. Maka merupakan strategi yang tepat apabila pemda Prov. Kep. Babel dapat memberikan dukungan penuh pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, karena tidak hanya dapat menjadi tulang punggung perekonomian, penguatan di sektor ini juga dapat membantu pemerintah menanggulangi isu ketahanan pangan yang membayangi di masa mendatang.

6. Potensi subsektor perikanan bagi Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di masa Normal Baru Pandemi Covid-19

Jika kita teliti kembali, ada indikasi fenomena menarik pada sektor ini. Meskipun kontributor terbesar dalam sektor tersebut adalah subsektor pertanian, namun berdasarkan data dari BPS Prov. Kep. Babel, subsektor Perikanan justru menjadi subsektor dengan laju pertumbuhan tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Berturut-turut, laju pertumbuhan subsektor perikanan adalah 8,11 persen dan 5,87 persen; melebihi laju pertumbuhan subsektor pertanian yang sebesar 4,17 persen dan 1,42 persen pada 2018 dan 2019.

Bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang 79,90 persen wilayahnya terdiri atas laut (Pemprov Babel, 2014), informasi di atas tentu saja adalah sebuah kabar gembira. Dengan wilayah laut yang terhampar seluas 65.301 km² (Pemprov Babel, 2014), potensi kelautan yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagaimana yang diungkapkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, selama ini kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dilakukan dengan kurang profesional dan belum

memedulikan aspek kelestarian. Beliau juga menyatakan bahwa bukan tidak mungkin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu mengkapitalisasi posisi geoekonomi yang strategis dengan membangun kawasan industri berkelas dunia berbasis ekonomi kelautan, seperti yang terjadi pada Singapura, Qatar, dan Dubai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada bagian selanjutnya akan diuraikan mengenai strategi kebangkitan ekonomi yang dapat diimplementasikan oleh Prov. Kep. Babel dalam era normal baru pandemi COVID-19 melalui optimalisasi kelautan yang dimiliki.

B. Strategi Kebangkitan Ekonomi Bangka Belitung Di Era Normal Baru Pandemi Covid-19

1. Laut Kita, Harta Kita yang Berharga

Upaya pertama yang dapat dilakukan oleh pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah menjaga kebersihan dan kelestarian laut serta mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian laut adalah dengan menggalakkan aturan (sebagaimana terdapat dalam peraturan perundangan) mengenai larangan buang sampah sembarangan, terutama di sungai dan pantai baik yang dikomersilkan sebagai tempat wisata maupun tidak. Juga dengan penegakkan aturan mengenai alat yang tidak boleh digunakan untuk nelayan dalam menangkap ikan. Selain itu, bisa juga dengan mendorong penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai bahan bakar kapal nelayan.

Pemerintah pusat harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah kab/kota dan pengelola tempat wisata atau ketua satuan lingkungan setempat dalam melakukan pengawasan serta evaluasi efektivitas kebijakan. Dapat dilakukan dengan adanya pertemuan rutin antara penanggung jawab dengan pemda. Jangan segan untuk menindak tegas pihak yang lalai terhadap peraturan tersebut. Untuk menciptakan ekonomi kelautan yang berkelanjutan, dibutuhkan pondasi yang kuat berupa sinergi antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berkomitmen dalam

menjaga kelastarian laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Petani Tambak

Upaya kedua yang dapat dilakukan oleh pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah memberdayakan rumah tangga perikanan tangkap/budidaya. Rumah tangga perikanan tangkap/budidaya diartikan sebagai rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual (Badan Pusat Statistik). Pemberdayaan dapat dilakukan dengan pemberian bantuan berupa mesin olahan pakan ikan untuk menghaluskan kulit rajungan, alat perebusan pakan, atau dengan melaksanakan program bantuan benih ikan. Pemerintah juga dapat menjamin keberlangsungan sistem *Resi Gudang* bagi masyarakat kelompok tani yang lingkup usahanya masih relatif kecil dan memiliki keterbatasan dalam penyediaan modal.

Selain itu, pemerintah juga dapat membuat satu kegiatan yang bertujuan untuk menunjukkan apresiasi bagi kelompok-kelompok petani tambak yang produktif. Dengan adanya penghargaan-penghargaan yang diberikan, diharapkan antarkelompok masyarakat petani tambak memiliki daya saing dan motivasi yang tinggi untuk terus meningkatkan produksinya baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Upaya lain yang dapat dilakukan oleh pemprov Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah berkoordinasi dengan pemda untuk membangun sebuah sistem distribusi hasil produksi petani tambak yang sistematis dan terintegrasi. Terutama di era normal baru pandemi COVID-19, konsumen berpeluang besar untuk memanfaatkan media sosial dalam melakukan transaksi jual beli. Ini merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk berlomba menciptakan sebuah *platform* bagi konsumen agar dapat mengakses berbagai produk petani tambak lokal dengan praktis dan ekonomis.

3. Serukan *Campaign* #OlahanIkanAkhirPekan

Upaya ketiga yang dapat dilakukan oleh pemda Prov. Kep. Babel adalah meningkatkan konsumsi ikan perkapita. Dalam hal ini, konsumsi perkapita masyarakat mencerminkan tingkat permintaan (*demmand*) masyarakat terhadap komoditas itu sendiri. Dengan meningkatnya *demmand*, harapannya akan menjadi pemicu bagi produsen untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi ikan sebagai komoditas yang ditawarkan (*supply*). Hubungan timbal balik jangka panjang antara keduanya diharapkan akan menjadi bahan bakar utama dalam menggerakkan roda perekonomian yang berkelanjutan pada subsektor perikanan.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan menyerukan *campaign* #OlahanIkanAkhirPekan. Pertimbangan dari adanya upaya ini adalah tingginya jumlah masyarakat yang mengakses media sosial selama masa pandemi. Selain itu, selama menghabiskan waktu di rumah untuk *social distancing*, memasak adalah salah satu kegiatan yang juga banyak dilakukan oleh masyarakat untuk mengisi waktu luang.

Campaign ini sendiri bertujuan mengajak masyarakat Prov. Kep. Babel untuk mengunggah foto atau video hasil mengolah makanan dengan bahan dasar ikan setiap akhir pekan (Sabtu dan Minggu). Selain mengunggah *campaign* melalui media sosial yang banyak diakses masyarakat, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan *influencer* lokal untuk menyerukan *campaign* ini. Strategi lainnya yang bisa dilakukan adalah dengan membangun suasana yang interaktif dengan masyarakat, contohnya dengan memilih 1 resep paling menarik dari hasil unggahan masyarakat, kemudian mengunggah resep tersebut di media sosial resmi milik pemprov Kep. Babel.

Selain dengan meningkatkan konsumsi masyarakat, pemerintah juga dapat berupaya meningkatkan *demmand* akan hasil laut (ikan) dari sisi perusahaan. Contohnya dengan memberikan investasi pada industri yang bergerak dalam bidang kelautan atau membutuhkan hasil laut sebagai bahan baku utama.

Dengan demikian, secara tidak langsung akan meningkatkan *demmand* yang diharapkan diikuti oleh peningkatan *supply* dari sisi produsen.

C. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan paparan informasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah harus bersiap menghadapi gelombang normal baru pandemi COVID-19
2. Lima sektor terbesar penunjang perekonomian Prov. Kep. Babel 2015-2019 adalah sektor Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; Pertambangan dan Penggalian; Konstruksi
3. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor strategis untuk menopang perekonomian Prov. Kep. Babel karena mampu menjawab dua hal, yaitu penguatan ekonomi dan isu ketahanan pangan
4. Subsektor perikanan merupakan subsektor yang paling potensial untuk dikembangkan baik ditinjau dari segi pertumbuhan maupun segi kondisi geografisnya. Di mana 79,90 persen wilayah Prov. Kep. Babel terdiri atas laut

Dari uraian pada bagian strategi kebangkitan ekonomi, maka yang dapat menjadi saran untuk untuk Pemerintah Provinsi Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Menegakkan peraturan perundangan mengenai penjagaan kebersihan dan kelestarian laut dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem;
2. Memberdayakan kelompok masyarakat petani tambak;
3. Meningkatkan *demmand* komoditas perikanan baik dari sisi konsumen (meningkatkan konsumsi perkapita) maupun dari sisi produsen (investasi pada industri perikanan atau menggunakan bahan baku utama perikanan).

Daftar Pustaka

- Data Jumlah Kasus Kumulatif Covid-19 di Indonesia. 2020. Badan Pusat Statistik. <https://covid-19.bps.go.id/>
- Data Jumlah Kasus Kumulatif Covid-19 di Prov. Kep. Babel. 2020. Laman Resmi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. <http://covid19.babelprov.go.id/>
- Data PDRB ADHB 2010-2019. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. <https://babel.bps.go.id/>
- Data PDRB ADHK 2010-2019. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. <https://babel.bps.go.id/>
- Data PDRB ADHK 2010-2019. Badan Pusat Statistik Kab. Belitung. <https://belitungkab.bps.go.id/>
- Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulanan (seri 2010). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/>
- Data Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulanan (seri 2010) . Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. <https://babel.bps.go.id/>
- Data Laju Pertumbuhan Subkategori PDRB 2010-2019. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. <https://babel.bps.go.id/>
- Fawaid, Dr. H. Jazilul. 2020. *Cermat Menerapkan New Normal*. <https://news.detik.com/kolom/d-5036963/cermat-menerapkan-new-normal>
- Pemerintah Provinsi Babel. 2014. Rokhmin Damuri Ungkap Potensi Laut Bangka Belitung. <https://www.babelprov.go.id/content/rokhmin-damuri-ungkap-potensi-kelautan-bangka-belitung>
- Video Presiden: Pemberlakuan *New Normal* oleh Presiden RI. 2020. Laman Resmi Presiden RI. <https://www.presidentri.go.id/video/tanggapan-presiden-joko-widodo-soal-pelaksanaan-psbb/>

MENUMBUHKEMBANGKAN EKONOMI KREATIF DALAM MASA NEW NORMAL

Muhammad Syaiful Anwar

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
m.syaifulanwar@gmail.com*

A. Dasar Kebijakan Penanganan Pandemi

Ekses pandemi Corona Virus mengakibatkan kelumpuhan diberbagai sektor, baik sektor skala mikro maupun skala makro. Kerawanan ekonomi ini didasarkan pada berbagai hal yang secara langsung berdampak pada perekonomian masyarakat. Sejak diumumkan oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada awal bulan maret terkait adanya virus Corona tersebut, secara massive menyebar ke seluruh wilayah nusantara. Kesiapsiagaan Pemerintah Pusat yang berkoordinasi dengan Pemerintah daerah baik provinsi maupun daerah untuk menanggulangi penyebaran Pandemi tersebut merupakan langkah nyata dan langkah cepat dari pemerintah dalam melindungi warga negaranya.

Perlindungan negara terhadap warga negaranya tidak terlepas dari tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam paragraf ke empat, yang secara tidak langsung menginstruksikan tentang konsep tujuan negara untuk melindungi segenap warga negara. Negara dalam menanggulangi Covid-19 ini, mendasarkan juga pada Konstitusi yang dijadikan sebagai petunjuk bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Yang bisa dijadikan Dasar konstitusional terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dimana menyebutkan bahwa sistem perekonomian Indonesia diharapkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang sistem perekonomian Indonesia ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dibidang ekonomi. Dalam mendasarkan hal tersebut, maka negara melalui Pemerintah bisa melakukan hal-hal yang secara taktis menanggulangi Pandemi Covid-19 yang berimbas pada sektor ekonomi

yang terpuruk. Tindakan nyata yang diambil oleh pemerintah guna menjaga kestabilan ekonomi dan roda perekonomian masyarakat, dilakukan di seluruh wilayah atau daerah, tidak terkecuali di Provinsi Bangka Belitung yang cukup “lumayan” terkena imbas corona tersebut.

B. Ekses Pandemi Corona Terhadap Ekonomi Bangka Belitung

Menurut data Bank Indonesia melalui Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mei 2020 menyebutkan bahwa, Perekonomian Bangka Belitung triwulan I 2020 tumbuh positif sebesar 1,35% (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,99% (yoy). Penyebaran COVID-19 secara global berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung khususnya dari sisi penurunan harga komoditas dan penurunan permintaan ekspor komoditas. Kinerja Lapangan Usaha (LU) pertambangan dan industri pengolahan mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan permintaan logam timah global sehingga berdampak pada penurunan harga komoditas. Namun demikian, peningkatan kinerja LU pertanian khususnya perkebunan kelapa sawit yang didorong oleh faktor cuaca dan harga komoditas yang relatif masih baik, berhasil menahan perekonomian Bangka Belitung sehingga tidak melambat lebih dalam. Dari sisi pengeluaran, kondisi ekonomi global, nasional, dan Bangka Belitung yang kurang stabil selama penyebaran pandemic Covid-19 menyebabkan investor menunda dan membatalkan rencana investasi sehingga kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terkontraksi. Namun demikian, konsumsi rumah tangga tercatat masih tumbuh stabil dan ekspor luar negeri mengalami peningkatan kinerja meskipun masih terkontraksi. Pada triwulan II 2020, pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung diproyeksikan tumbuh melambat dibandingkan triwulan I 2020 disebabkan oleh dampak Covid-19 diperkirakan lebih tinggi sehingga berdampak pada penurunan harga komoditas dan pembatasan kegiatan ekonomi khususnya sektor informal. Pada triwulan I 2020, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat mengalami inflasi sebesar 1,82% (yoy), tekanan inflasi menurun

dibandingkan dengan triwulan IV 2019 yang mengalami inflasi sebesar 2,62% (yoy). Tekanan inflasi pada triwulan I 2020 mengalami penurunan karena rendahnya tekanan inflasi hampir diseluruh komoditas pembentuk kelompok barang terutama kelompok transportasi. Kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar 3,72% (yoy) karena menurunnya permintaan angkutan udara dan laut akibat dampak pengurangan operasional bandara dan pelabuhan untuk orang sebagai upaya penanganan Covid-19. Secara spasial pada triwulan I 2020, Kota Pangkalpinang tercatat mengalami inflasi sebesar 1,95% (yoy), sedangkan Kota Tanjungpandan mengalami inflasi sebesar 1,59% (yoy). Berdasarkan hal tersebut, pemerintah memutuskan beberapa kebijakan terkait ekonomi yang secara tidak langsung melatarbelakangi munculnya kebijakan terkait sebuah pola baru dalam pola kehidupan masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai New Normal.

C. Pengembangan Ekonomi Kreatif Masa New Normal

Secara prinsip, pemerintah sudah mulai menggunakan pola atau sistem New Normal. Pengertian New Normal sendiri merupakan diksi yang merujuk pada pola perubahan perilaku dalam bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan aspek kehidupan sosial lainnya dengan penyesuaian aktivitas masyarakat. Pandangan yang secara komprehensif disebutkan oleh Prof. Dr. Rahayu Surtiati, seorang ahli dan pakar bahasa dari Universitas Indonesia menyebutkan bahwa Badan Bahasa sudah memberikan penafsiran terhadap New Normal dalam istilah Indonesia yaitu Kenormalan Baru. Badan Bahasa kemudian membuat padanannya menjadi Kenormalan. Karena kalau normal adjektiva kata sifat, jadi Kenormalan Baru.

Pola new normal ini membuat banyak masyarakat memanfaatkan Work From Home (WFH) untuk menciptakan peluang mendapatkan pundi-pundi keuangan yang bisa dilakukan melalui rumah ataupun ide kreatif yang bisa dilakukan dari rumah. Konsep ekonomi kreatif sudah muncul dengan segala berbagai macam jenis kreativitas yang menjanjikan. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Andri Irawan, berjudul "*Ekonomi Kreatif Sebagai Suatu Solusi Mensejahterakan Masyarakat Dalam Meningkatkan*

Tingkat Perekonomian” (Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Ahmad Yani), bahwasanya Pengembangan Ekonomi Kreatif telah berkembang menjadi sebuah fenomena dalam menghadapi perkembangan dan tantangan globalisasi. Faktor teknologi informasi membuat perkembangan ekonomi kreatif menjadi lebih cepat. Sehingga ekonomi kreatif dapat menjadi sebuah jawaban atas tantangan dalam mensejahterakan masyarakat selain itu juga ekonomi kreatif dapat menurunkan tingkat pengangguran. Ekonomi kreatif akan memberikan nilai tambah baik pada proses produksi maupun kepada sumber daya manusia sehingga system ekonomi kreatif diyakini akan menjawab tantangan dari berbagai permasalahan yang ada saat ini serta akan menggeser system yang ada seperti ekonomi komunikasi, ekonomi pertanian, ekonomi industri (Azizah dan Muhflatun, 2017).

Ekonomi kreatif yang digadang-gadang sebagai bentuk alternatif sumber ekonomi yang sangat potensial untuk digali lebih lanjut. Menurut Suparwoko, dalam tulisannya mengutip dari tulisan Dr. Mari Elka Pangestu dalam Konvensi Pengembangan Ekonomi Kreatif menyebutkan beberapa alasan mengapa industri kreatif perlu dikembangkan di Indonesia, antara lain (Suparwoko, 2010):

1. Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan,
2. Menciptakan iklim bisnis yang positif,
3. Membangun citra dan identitas bangsa,
4. Berbasis kepada sumber daya yang terbarukan,
5. Menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa,
6. Memberikan dampak sosial yang positif.

Yang menarik dalam industri ekonomi kreatif yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini adalah daya tarik tujuan wisatanya, khususnya terkait kemaritiman (kelautan). Di Provinsi Bangka Belitung masih belum tumbuh berkembang berkaitan dengan industri kreatif berkaitan dengan ciri khas atau merchandise yang berkaitan dengan dunia kelautan di Bangka. Masih belum maksimalnya pola penanganan zonasi ekonomi kreatif yang bertumpu pada kekuatan lokal. Untuk pola pengembangan wisata, setidaknya mempunyai

beberapa komponen-komponen tujuan wisata, diantaranya yaitu:

1. Obyek/atraksi dan daya tarik wisata,
2. Transportasi dan infrastruktur,
3. Akomodasi (tempat menginap),
4. Usaha makanan dan minuman,
5. Jasa pendukung lainnya (hal-hal yang mendukung kelancaran berwisata misalnya biro perjalanan yang mengatur perjalanann wisatawan, penjualan cinderamata, informasi, jasa pemandu, kantor pos, bank, sarana penukaran uang, internet, wartel, tempat penjualan pulsa, salon dll).

Pola pengembangan ekonomi kreatif wisata yang bisa dilakukan di Bangka Belitung harus di-*Upgrading* dengan pola yang lebih terencana dan terstruktur sehingga memiliki daya tarik tertentu untuk dilihat dan dikembangkan lebih lanjut. Terdapat bentuk pengembangan ekonomi kreatif sebagai penggerak sektor wisata, menurut Yozcu dan Icoz menyebutkan bahwa Kreativitas akan merangsang daerah tujuan wisata untuk menciptakan produk-produk inovatif yang akan memberi nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah tujuan wisata lainnya.

Ekonomi kreatif yang dilaksanakan di bangke Belitung secara prinsip sudah berjalan namun terdapat beberapa hal yang secara tidak langsung belum “tersentuh” dalam pelaksanaan di lapangan, diantaranya adalah:

1. Terkait dengan moda transportasi ke tempat wisata yang ada di Bangka Belitung;
2. Belum dimaksimalkannya ruang ekonomi kreatif (produk andalan daerah) di setiap simpul-simpul wisata;
3. Keterbatasan jaringan telekomunikasi di Bangka Belitung;
4. Obyek wisata pantai sangat bergantung pada alam dan perawatannya;
5. Belum adanya konsep atau perencanaan induk pengembangan pariwisata terpadu.

D. Grand Desain Ekonomi Kreatif Masa Pandemi Covid-19

Dalam peningkatan sejahtera masa pandemi Covid-19, secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau inherent dengan konsep kehidupan masyarakat. Masa pandemi ini akan memperlihatkan “celah” ekonomi yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang secara tidak langsung berkeja dari rumah (WFH). Hal ini penting dilakukan oleh para pemangku kepentingan dari pusat sampai daerah untuk menumbuhkembangkan ekonomi kreatif melalui kebijakan dan pemberian ruang kepada kreator daerah agar bisa berkembang. Di Provinsi Bangka Belitung yang secara faktanya merupakan wilayah kelautan atau kemaritiman yang bisa dieksploitasi wisatanya dengan memperhatikan beberapa unsur yang harus dilengkapi oleh para pemangku kebijakan.

Dalam menjalankan hal tersebut, penulis memberkan beberapa usulan atau saran terkait dengan pengimplementasian konsep ekonomi kreatif dalam masa Pandemi ini, memang tidaklah mudah, diperlukan langkah yang kongkrit dan berkelanjutan terkait dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dari pola ekonomi kreatif tersebut. Pola peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kreatif ini berkaitan dengan beberapa hal yang bisa dilakukan oleh para pemangku kepentingan, diantaranya yaitu:

1. Peningkatan Pemasaran *Handycraft* Asli Bangka Belitung;

Ekonomi masyarakat Bangka Belitung secara eksplisit masih bergantung pada eksploitasi dan eksplorasi barang tambang dan mineral, pemikiran tentang berpaku pada barang tambang sudah harus berubah, sejalan berkurangnya cadangan material mineral tersebut. Hal ini menjadikan masyarakat perlu beralih pada pola ekonomi kreatif yang bersumber dari hasta karya/souvenir atau handycraft yang berasal dari alam atau lingkungan sekitar yang raw material-nya mudah didapatkan di wilayah Bangka Belitung serta menjadi karya asli warga Bangka Belitung di wilayah wisata. Yang perlu diperhatikan adalah pola pemasaran

yang bisa dilakukan secara tradisional dengan membuat jalur atau pusat handycraft yang merupakan asli Bangka Belitung dan diperjual belikan di setiap wilayah wisata Bangka Belitung, yang harus mamulai dengan Pemanfaatan Teknologi Untuk Promosi Wisata Pasca Pandemi. Teknologi media sosial melalui Youtube, Facebook, Instagram, Blogger, Flyer, Poster, dan media lain yang bisa dishare-kan melalui daring sehingga mempercepat promosi pemasaran Handycraft asli Bangka Belitung.

2. Adanya Pusat Manajerial Ekonomi Kreatif

Hasil produk ekonomi kreatif masyarakat Bangka Belitung diharuskan memiliki wadah atau naungan yang bisa dibentuk melalui sebuah sekretariat dibawah pengembangan Dinas Pariwisata Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang bertugas untuk mengakomodir hasil cipta karya kreatif masyarakat Bangka Belitung. Manajerial ini difungsikan sebagai bentuk apresiasi kepada para kreatif Bangka Belitung untuk memfokuskan pada konsep pengembangan yang sebaiknya digunakan ataupun tidak digunakan dalam konsep ekonomi kreatif Bangka Belitung. Diperlukan juga pembentukan dewan hak atas kekayaan intelektual Bangka Belitung yang berguna melindungi hasil karya cipta dan kreasi atas kekayaan budaya Bangka Belitung sehingga akan lebih terlindungi dari sisi hukumnya. HaKI ini juga bertujuan sebagai bahan inventaris jenis karya yang bernilai ekonomis yang dihasilkan oleh para kreator Bangka Belitung.

3. Adanya Perencanaan Eco-Wisata Terkait Wisata Kemaritiman Bangka Belitung

Sinergitas konsep ekonomi kreatif dengan wisata kemaritiman di Bangka Belitung merupakan ujung tombak atas pemanfaatan alam khususnya wista kemaritiman. Sektor wisata kemaritiman di Bangka Belitung merupakan syurga bagi para wisman maupun wisnu untuk melihat keindahan laut di Bangka Belitung. Kegiatan wisata pantai dengan adanya Master Plan Eco-Wisata yang merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari program wisata yang menjadi andalan Bangka Belitung. Perencanaan ekonomi laut yang

mendasarkan pada Eco-Wisata Laut merupakan hal positif yang bisa dilakukan dari hulu ke hilir. Dimulai dari sisi sarana dan prasarana yang harus ada di dalam eco-wisata (parkir, kios souvenir, tempat makan, toilet, tempat ibadah, dll), kemudian diusahakan digunakan acara budaya lokal yang menyedot wisatawan dengan mengikuti protokol kesehatan, mensosialisasikan terhadap masyarakat sekitar eco-wisata tentang kepariwisataan yang akan menunjang ekonomi masyarakat, dan yang terpenting adalah kepedulian masyarakat, pemerintah dan para pemangku kepentingan atas kebersihan dan keberlanjutan eco-wisata yang ada di Bangka Belitung, ini penting dilakukan untuk bisa menumbuh kembangkan ekonomi kreatif dalam eco-wisata tersebut.

Ketiga hal ini merupakan elemen yang bisa digunakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa new normal bisa dijalankan dengan cara yang berkelanjutan. Walaupun banyak pihak yang masih mengkhawatirkan terkait pandemi ini, namun ekonomi masyarakat harus kembali bangkit agar tidak terus menerus terpuruk dan semuanya tergantung pada cara pandang masyarakat untuk keberlanjutan ekonomi masyarakat Provinsi Bangka Belitung.

Daftar Pustaka

- Azizah, SN dan Muhflatun. 2017. *Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Pandanus Handicraft Dalam Menghadapi Pasar Modern Perspektif Ekonomi Syariah* (Study Case di Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta), APLIKASIA, Ejournal UNI SUKA, Volume 17, No. 2, 2017, Yogyakarta.
- Suparwoko. 2010. *Pengembangan Ekonomi Kreatif Sebagai Pengerak Industri Pariwisata Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*, Simposium Nasional : Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif, SMA Negeri Purworejo, Jawa Tengah, 2010

Website:

- (1) <https://news.detik.com/berita/d-5034719/tentang-new-normal-di-indonesia-arti-fakta-dan-kesiapan-daerah>, diakses pada tanggal 30 Juni 2020 pada pukul 10.30 wib.
- (2) [https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/babel/Pages/Laporan Perekonomian-Provinsi-Kepulauan-Bangka-Belitung-Mei-2020-New02.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/babel/Pages/Laporan%20Perekonomian-Provinsi-Kepulauan-Bangka-Belitung-Mei-2020-New02.aspx), diakses tanggal 29 Juni 2020 pada pukul 10.30 wib.

USAHA PENGUATAN EKONOMI MELALUI TEKNOLOGI TEPAT GUNA PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI PROVINSI BANGKA BELITUNG DIMASA PANDEMI COVID-19

R. Priyoko Prayitnoadi dan Firly Rosa
*Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik,
Universitas Bangka Belitung*
priyokoprayitnoadi@gmail.com, firlyarosa@gmail.com

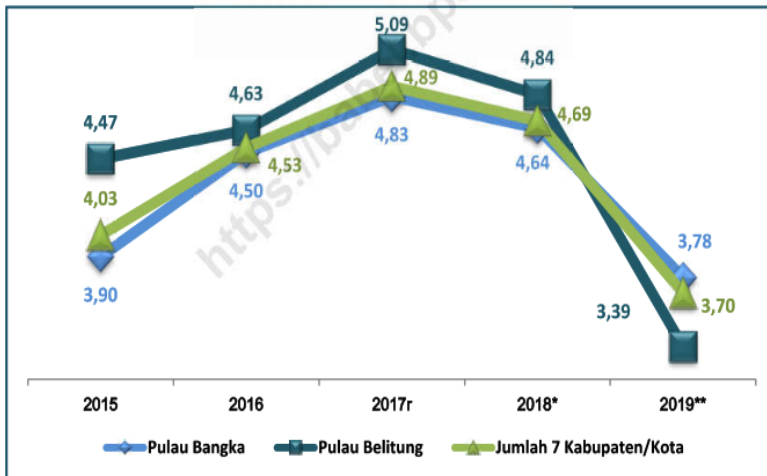
A. Perkembangan Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Di Pulau Bangka kontributor terbesar perekonomian adalah Industri Pengolahan yang dominan dalam mengolah hasil tambang timah, sementara di Pulau Belitung kontributor terbesar perekonomian berasal dari Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang didominasi oleh pengolahan asil perkebunan kelapa sawit dengan hasil berupa *Crude Palm Oil* (CPO) dan pengolahan hasil penangkapan ikan (Badan Pusat Statistik, 2020)



Gambar 1. Struktur Perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015 dan 2019 (Produk Domestik Regional Bruto 2015-2019, BPS Provinsi Bangka Belitung, 2020)

Menurut BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2020), kondisi perekonomian secara umum pada tahun 2015 hingga 2017 mempunyai kecenderungan meningkat, tetapi cenderung menurun atau mengalami perlambatan di tahun 2018 dan 2019. Hal peningkatan laju perekonomian pada tahun 2015 dan 2017 terpengaruh dari perekonomian global yang membaik setelah krisis yang terjadi di tahun 2013 sehingga menyebabkan permintaan akan beberapa komoditas lokal seperti timah, karet dan kelapa sawit menjadi meningkat. Sementara itu, penurunan perekonomian ditahun 2018 dan 2019 terjadi akibat adanya peraturan pemerintah yang menyebabkan terhambatnya ekspor logam timah. Hal ini berdampak kepada penurunan produktivitas pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan akibat rendahnya harga komoditas strategis perkebunan seperti kelapa sawit, karet dan lada.



Catatan: ^r Angka revisi

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015-2019 (Produk Domestik Regional Bruto 2015-2019, BPS Provinsi Bangka Belitung, 2020)

Dilihat dari struktur ekspor dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Delapan puluh persen ekspor pada tahun 2019 berasal dari komoditas timah dengan total ekspor timah sebesar US\$ 1,1 miliar dan total ekspor non-timah

sebesar US\$ 265,2 juta. Namun jika dibanding tahun 2018 ekspor timah turun 18,58 persen dan ekspor non-timah turun 35,91 persen (Badan Pusat Statistik, 2019).

Saat ini, dimasa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Indonesia sejak 31 Maret 2020 menimbulkan dampak besar bagi perekonomian khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PSBB bisa diartikan sebagai *lockdown* parsial yang merupakan intervensi pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus SARS-Cov-2, penyebab COVID-19. Himbuan kebijakan untuk menjaga jarak (*physical distancing*) membatasi mobilitas masyarakat sehingga berdampak pula kepada produktivitas usaha dan tentunya bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

B. Teknologi Tepat Guna Bagi UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah atau disingkat UMKM adalah usaha-usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Tercatat hingga Februari 2018 jumlah UMKM sebanyak 180.509 dengan kucuran dana dari DAK dan APBD sudah hampir Rp.5 miliar di tahun 2019. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 60,34 persen dengan serapan tenaga kerja 97,22 persen. Disinyalir bahwa kondisi Covid-19 ini menyebabkan turunnya produktivitas UMKM. Usaha-usaha yang membutuhkan tenaga kerja yang bersifat memproduksi secara masal dengan jumlah tenaga kerja yang relatif banyak akan mengurangi produktivitasnya. Dahulu ketika krisis 1998 dan 2008, UMKM masih bisa bertahan namun saat ini, sektor UMKM yang paling terkena dampaknya. Bagi UMKM, produktivitas harus tetap dijaga dan bahkan ditingkatkan untuk memajukan kesejahteraan selain juga memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas.

Salah satu upaya mempertahankan produktivitas usaha adalah dengan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG). Secara garis besar, TTG adalah sebuah teknologi yang dirancang bagi masyarakat tertentu yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan, sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakatnya (Sianipar et al., 2013). UMKM

memerlukan sentuhan TTG dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat disamping untuk menghadapi program pencegahan penyebaran virus Covid-19 yang mengharuskan adanya jaga jarak antara pekerja yang akan membatasi gerak langkah para pekerja. Melalui TTG, beberapa pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh banyak orang akan dikerjakan oleh sedikit orang saja. Hal ini akan mencegah terjadinya interaksi antar pekerja dan menghindari penyebaran wabah virus tersebut tanpa mengurangi produktivitas usaha.

C. Peran Universitas Dalam Meningkatkan Perekonomian Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna

Didalam kurikulum pendidikan sarjana strata satu, terdapat mata kuliah Skripsi. Skripsi adalah sebuah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program sarjana dari hasil penelitiannya. Skripsi wajib dibuat oleh mahasiswa sebagai persyaratan akhir dari pendidikan akademisnya. Untuk mendukung ide tema skripsi mahasiswa, selain fokus dengan peminatan, mahasiswa juga bisa mendapatkan ide dari saat mahasiswa melakukan Kerja Praktik (KP) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kerja Praktik (KP) adalah matakuliah yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang atau jurusan tertentu secara langsung di lapangan. Kerja praktik dilaksanakan dengan cara magang kerja di suatu instansi atau lembaga terkait dengan tujuan memberi wawasan kepada mahasiswa tentang dunia kerja yang sebenarnya. Sementara itu, KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara satu sampai dua bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tri dharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa yang melakukan KP dan KKN akan terlibat dengan masyarakat disuatu daerah. Salah satu tugas dalam program KP dan KKN adalah mencari suatu masalah yang diharapkan dapat

menjadi tema untuk melakukan perbaikan dengan pendekatan keilmuan yang mahasiswa dapatkan di semester sebelumnya.

Didalam struktur pembuatan skripsi, mahasiswa diharuskan melakukan pemecahan masalah atas permasalahan disuatu keadaan baik terhadap teori-teori keilmuan maupun kondisi nyata dilapangan pada saat mahasiswa program KP dan KKN. Dari sanalah mahasiswa dapat memecahkan permasalahan dilapangan yang terjadi akibat penerapan protokol kesehatan yang sedikit banyak mengurangi produktivitas usaha masyarakat. Melalui penerapan TTG, masyarakat dapat melakukan usahanya dengan bantuan teknologi sederhana yang mampu menggantikan kerja manusia dan atau mengurangi jumlah manusia dalam melakukan proses produksi. Hal ini sejalan dengan usaha pencegahan penyebaran virus Covid-19.

Sebagai gambaran, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung telah menghasilkan sejumlah skripsi yang mengarah kepada penyelesaian masalah yang berhubungan dengan TTG. Berikut disampaikan contoh judul-judul Skripsi yang berhubungan dengan TTG dari Tahun 2016 hingga 2020 yang diambil dari Data judul Skripsi Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Judul-judul tersebut telah disortir sesuai dengan tema TTG

Tabel 1. Judul Skripsi Mahasiswa Teknik Mesin Fakultas Teknik UBB Tahun 2016 hingga 2020

Tahun	Judul
2016	Mesin Penggiling Daun Gambir Dengan Daya Motor Listrik 1 PK
	Rancang Bangun <i>Punch</i> Dan <i>Dies</i> Untuk Proses <i>Embossing</i> Kerajinan <i>Pewter</i> Dengan Variasi Kedalaman Kontur Tulisan Pada <i>Punch</i> 2°
	Rancang Bangun Mesin Cetak Kericu Sederhana Dengan Penggerak Motor Listrik ¼ PK
	Rancang Bangun Mesin Penghancur Sabut Kelapa Menjadi <i>Cocopeat</i> Untuk Media Tanam
2017	Rancang Bangun Mesin Pencetak Keripik Bentuk Akar Kelapa Dengan <i>Screw Press</i>

Tahun	Judul
	Rancang Bangun Mesin Pengupas Kulit Bawang Putih Dengan Sistem <i>Rotary</i>
	Modifikasi Mesin Pencacah Rumput Gajah <i>System Reel</i>
	Rancang Bangun Mesin Pengering Lada Dengan Mekanisme Pergerakan Rak Translasi
	Rancang Bangun Mesin Pencampur Bumbu Keripik Dengan Penggerak Motor Listrik
	Rancang Bangun Mesin Pengupas Kulit Lada Sederhana Dengan Penggerak Motor Listrik
	Modifikasi Mesin Penghancur Sabut Kelapa Menjadi <i>Cocopeat</i> Untuk Media Tanam
	Rancang Bangun Mesin Pencacah Daun Gaharu Untuk Dijadikan Teh
2018	Rancang Bangun Prototipe Mesin Pembuatan Tapai Kapasitas 1 Kilogram
	Rancang Bangun Mesin Perajang Wortel Menggunakan Mesin 1/2 HP
	Rancang Bangun Mesin Pencetak Pelet Ikan dengan Daya 7 PK
	Rancang Bangun Mesin Pengering Daun Gaharu Menggunakan Elemen Pemanas dengan Sistem <i>Rotary</i>
	Rancang Bangun Mesin Pengupas Sabut Kelapa Skala Rumah Tangga Sistem Pencekam
	Rancang Bangun Mesin Penghalus Lada dengan Daya 1/2 HP
	Rancang Bangun Mesin Penggiling Daun Gambir Sistem Vertikal Daya Motor 1 PK
	Rancang Bangun Mesin Penumbuk Sagu Ubi Kayu untuk Proses Pembuatan Beras Aruk dengan Motor Listrik 0,5 HP
2019	Rancang Bangun Mesin Parut Kelapa Untuk Pakan Ternak Ayam Sistem Pisau Horizontal
	Rancang Bangun Mesin Perajang Kentang Dengan Pisau Horizontal Bergelombang dan Daya Motor 0,25 hp
	Rancang Bangun Mesin Pengupas dan Pamarut Nanas

Tahun	Judul
	Rancang Bangun Alat Bantu Pelepasan dan Pemasangan Universal Joint Propeller Shaft
	Rancang Bangun Mesin Penggiling Daging gunakan Motor 1/2 HP Skala Rumah Tangga
	Rancang Bangun Mesin Pencetak Empiang dengan Metode Roll Cetak
	Rancang Bangun Mesin Pencuci Kerang dan Siput Gonggong dengan Daya Motor 0,5 hp
	Rancang Bangun Mesin Pembelah Pinang Sederhana menggunakan Motor Listrik 0.5 HP
	Modifikasi Mesin Pencetak Bakso dengan Daya 180 Watt untuk Industri Rumah Tangga
	Mesin Pemecah Biji Jagung Untuk pakan Ternak Menggunakan Tenaga Motor Bakar
	Modifikasi Mesin Pengaduk Dodol dengan Daya motor 0,5 HP Skala Rumah Tangga
	Rancang Bangun Mesin Pengupas Sabut Kelapa
	Modifikasi Mesin Penggiling Kacang Tanah Menggunakan Motor Bakar
2020	Modifikasi Mesin Pamarut dan Pemeram Santan kelapa skala Besar
	Rancang Bangun Mesin Pencacah Tangkai Buah Lada
	Modifikasi mesin penipis dan pencetak mie berpengerak motor listrik 1/5 hp
	Modifikasi mata pisau mesin pencetak bakso
	Modifikasi mesin pencetak bakso
	Rancang Bangun Mesin Pemotong Kentang Bentuk Kubus
	Modifikasi Rancang Bangun Mesin Pengupas Kulit Bawang Putih Sistem Rotary
Modifikasi mesin pemipil jagung	

Sumber: Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, UBB 2020

TTG yang diimplementasikan oleh mahasiswa dibawah bimbingan para dosen pembimbing, dapat melakukan pemodifikasian mesin atau alat yang disesuaikan dengan usaha pencegahan penyebaran Covid-19 khususnya pada tahun ajaran 2020/2021 ketika periode

program pencegahan wabah Covid-19 dimulai. Bekerjasama dengan Laboratorium Teknik Mesin dan Pusat Kajian dan Pelayanan Rekayasa Keteknikan, agar TTG yang dihasilkan oleh para mahasiswa dapat lebih sempurna secara keilmuan dan implementasinya.

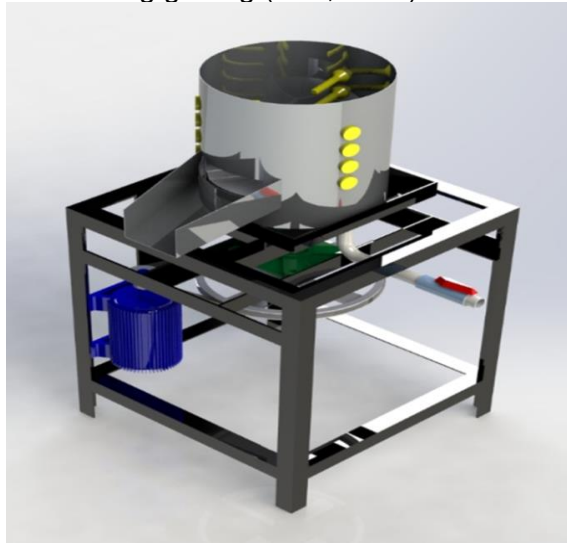
Sebagai contoh, satu Skripsi mahasiswa Teknik Mesin telah menghasilkan mesin pamarut sagu yang telah digunakan di Desa Belilik Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah untuk membantu usaha masyarakat dalam menghasilkan pakan ternak. Penelitian ini adalah tentang mesin parut sagu, yang merupakan modifikasi dari mesin parut kelapa dengan metode yang mirip metode *reverse engineering*. Mesin yang dihasilkan adalah mesin parut dengan daya motor 2Hp dengan sistem transmisi *pulley* dan *v-belt*. Sistem kerja mata parut yang berputar dengan kecepatan 1400Rpm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mesin hasil modifikasi mampu memarut bongkahan batang sagu sebanyak 227,7Kg/jam. Dengan efisiensi pamarutan 90%. Mesin ini memungkinkan menghasilkan pakan ternak dengan hanya melibatkan satu orang operator saja (Achmad, 2020).



Gambar 3. Mesin parut sagu (Achmad, 2020)

Contoh lain, Mesin pengupas bawang merah dengan sistem vertikal menggunakan poros piringan 3 sirip telah berhasil dibangun dengan penggerak utama berupa motor listrik berdaya 0.5 hp memiliki kecepatan putaran akhir 233 rpm. Sistem kerja dari proses pengupasan adalah bawang merah diputar oleh piringan 3 sirip yang dihubungkan

langsung dengan poros dan bersentuhan dengan karet pengupas pada dinding *hopper*. Hasil pengujian dengan bahan uji sebanyak $\frac{1}{2}$ kg dengan waktu 15 detik, rata-rata hasil bawang yang terkelupas sempurna sebanyak 200 gram, bawang yang terkelupas sebagian sebanyak 213 gram, bawang yang tidak terkelupas sebanyak 60 gram, sedangkan kulit yang terbuang sebanyak 26 gram. Kapasitas produksi mesin ini adalah 48 kg/jam dengan efisiensi mesin 40 %. Mesin ini mampu mengupas bawang merah dalam jumlah cukup banyak dengan tanpa menggunakan aktivitas manual (dengan tangan dan pisau). Kegiatan ini selain digunakan oleh ibu-ibu dalam menyiapkan makanan dalam jumlah besar, juga digunakan oleh UMKM dalam usaha pembuatan bawang goreng (Joni, 2020).



Gambar 4. Mesin pengupas bawang merah (Joni, 2020)

Meskipun upaya pembuatan TTG bagi UMKM terus dilakukan secara terprogram, akan tetapi sesuai sifatnya, skripsi tidak selalu menghasilkan alat/mesin yang unggul mengingat banyak keterbatasan yang terjadi seperti waktu program dan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa. Upaya pemerintah daerah untuk menggalakkan penggunaan TTG juga telah ada seperti pameran dan perlombaan TTG tingkat daerah yang akan memicu dan mendorong peningkatan penggunaan TTG pada UMKM.

Oleh karena itu, untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas usaha UMKM dalam semua sektor, perlu ada upaya-upaya dari semua pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat dan dunia pendidikan. Upaya itu antara lain:

1. Adanya komunikasi yang efektif antara dunia pendidikan dengan masyarakat yang berkecimpung dalam usaha perorangan maupun skala kecil atau UMKM. Dari dunia pendidikan, dalam hal ini universitas maupun politeknik yang ada di Pulau Bangka Belitung dapat menyediakan informasi seluasnya perihal produk-produk yang dapat dihasilkan baik produk maupun jasa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
2. Pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan penguatan ekonomi UMKM dengan mendorong UMKM yang ada di Provinsi Bangka Belitung untuk berkolaborasi dengan Universitas dan atau Politeknik. Kolaborasi tidak hanya untuk persoalan TTG semata tetapi juga dalam hal pengelolaan usaha. Hubungan UMKM dengan universitas atau Politeknik lebih kepada hubungan konsultasi teknis namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kerjasama saling menguntungkan.
3. Peningkatan mutu penelitian TTG dengan melakukan kerjasama dengan antar perguruan tinggi lokal di Provinsi Bangka Belitung dalam rangka penguatan kualitas penelitian TTG.

D. Simpulan/Saran

Beberapa usaha mengimplementasikan TTG terhadap UMKM sebenarnya telah berjalan sejak lama dimulai dari program perkuliahan mahasiswa yang mengarah kepada kemudahan pengoperasian alat atau mesin. Namun dengan kondisi saat ini UMKM dituntut untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan produktivitas usahanya. Oleh karena itu maka perlu ada modifikasi atas rancang bangun mesin agar dapat mengakomodir usaha pencegahan penyebaran virus Covid-19. Selain itu penguatan kualitas penelitian TTG dan kualitas komunikasi antara pemerintah daerah, masyarakat UMKM dan dunia pendidikan harus dilakukan untuk mengaktualisasikan peningkatan ekonomi UMKM yang pada akhirnya akan

mendongkrak perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan adanya TTG bagi UMKM, maka diharapkan produktivitas UMKM akan tetap terjaga bahkan dapat ditingkatkan meskipun dalam situasi penanggulangan wabah virus Covid-19.

Daftar Pustaka

- Achmad, F. (2020). *Modifikasi mesin parut sagu untuk proses pembuatan pakan ternak dengan motor bensin 2 HP*. Universitas Bangka Belitung.
- Badan Pusat Statistik, K. B. B. (2019). *Perekonomian Makro Babel 2019.pdf* (B. Oktarizal (ed.)). Badan Pusat Statistik Prov.Kep. Bangka Belitung.
- Badan Pusat Statistik, K. B. B. (2020). *Produk Domestik Regional Bruto Babel 2015-2019.pdf*. Bad.
- Joni, I. (2020). *Modifikasi mesin pengupas bawang merah*. Universitas Bangka Belitung.
- Sianipar, C. P. M., Dowaki, K., Yudoko, G., & Adhiutama, A. (2013). Seven Pillars of Survivability: Appropriate Technology with a Human Face. *European Journal of Sustainable Development*, 2(4), 1. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2013.v2n4p1>

SEKTOR INFORMAL SEBAGAI BATU LONCATAN KEBANGKITAN EKONOMI BABEL PASCA PANDEMI COVID-19

Royhan Faradis

*Fungsional Statistisi Pertama BPS Kabupaten Belitung Timur
rohyan.faradis@bps.go.id*

Zaman sudah berubah, *mindset* bekerja pun ikut berubah. Jika zaman “*old*” bekerja didefinisikan dengan memakai seragam berangkat pagi pulang siang/sore maka zaman “*now*” bekerja yang penting dinamis, bebas berekspresi dan tidak terikat dengan waktu yang mengekang. Banyak orang merasa jenuh jika bekerja harus diatur-atur, berada di bawah tekanan dan memiliki sedikit ruang untuk berinovasi di bidang yang digeluti. Oleh karena itu banyak orang keluar dari zona nyamannya untuk bekerja di sektor informal.

Pandemi Covid-19 semakin membuat *mindset* bekerja menjadi berubah drastis. Selain karena sebagian tenaga kerja harus menyesuaikan waktu kerja yang lebih dinamis, sebagian justru harus terdepak dari pekerjaannya. Pandemi ini telah merubah tatanan kehidupan dan ketenagakerjaan. Hal ini terjadi di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan bahwa setidaknya 3.342 orang tenaga kerja di sini mengalami dampak secara langsung. Dari 3.342 itu, sebanyak 2.986 orang terpaksa harus dirumahkan dan 356 sisanya diberhentikan (PHK)⁵. Kabupaten Belitung menjadi kabupaten yang terkena dampak paling masif, tercatat dari 48 perusahaan yang beroperasi, mereka harus merumahkan 1.232 karyawannya dan memberhentikan 63 orang lainnya. Kondisi ini direlease pada 22 April 2020 lalu, tentu saja angka ini terus bertambah dari hari ke hari mengingat hingga pertengahan tahun ini penambahan kasus terpapar Covid-19 semakin meningkat. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan dan tidak bisa dibiarkan

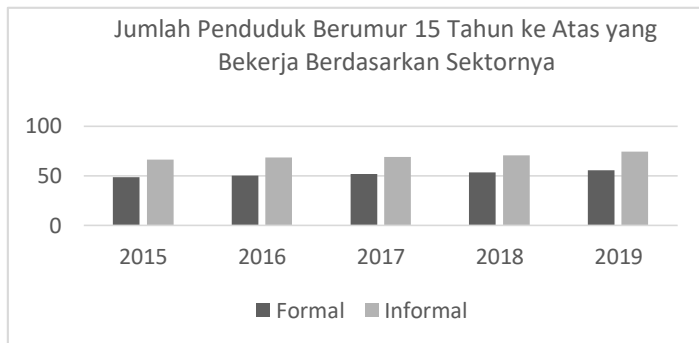
terus menerus. Krisis ekonomi dan pengangguran yang menjadi-jadi akan menyebabkan trauma berkepanjangan jika tidak ada “sepon” penyerap tenaga kerja sementara bagi mereka yang telah diberhentikan dan dirumahkan.

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengisyaratkan bahwa saat ini kita berada dalam posisi yang memprihatinkan. Pertama dari data perkiraan Indeks Tendensi Konsumen Triwulan I-2020 jatuh di bawah level 100 yakni mencapai 85,90 perihal rencana pembelian barang-barang tahan lama, rekreasi, dan pesta hajatan. Ini menunjukkan adanya penurunan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian di masa pandemi seperti sekarang ini. Jika keinginan untuk mengeluarkan uang menjadi berkurang, perputaran uang akan melambat yang mengakibatkan macetnya bisnis di berbagai sektor. Tentu data jumlah karyawan dirumahkan dan diberhentikan yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Pengangan Covid-19 merupakan imbas dari pola pengeluaran konsumen saat ini. Kedua, data Angkatan Kerja per Februari 2020 mencapai 777.010 orang, naik sebanyak 39.803 orang dibandingkan Februari 2019. Artinya agar pengangguran tidak terlalu tinggi, pemerintah dan sektor bisnis di tahun 2020 seharusnya memperluas lapangan kerja. Alih-alih menyediakan lapangan pekerjaan, Covid-19 membuat pemerintah harus mengernyitkan dahi memotong berbagai anggaran, sektor bisnis tertekan dan tidak sedikit yang harus gulung tikar. Terbukti adanya kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2020, dibandingkan Februari 2019 yang mencapai 3,41 persen atau naik 0,02 poin. Cukup rasanya data-data ini menggambarkan fakta bahwa saat ini pemerintah serta sektor ekonomi dan bisnis berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan.

Belajar dari pengalaman krisis yang terjadi pada tahun 1998 dan *Finacial Mortgage Crisis 2008*, sektor informal selalu hadir memberikan solusi jangka pendek untuk mengatasi pengangguran. Sektor ini merupakan sektor yang “robust” terhadap goncangan ekonomi, menyerap tenaga kerja yang banyak walaupun kurang memberikan nilai tambah bagi perekonomian secara makro. Namun, sektor ini selalu bisa dijadikan andalan saat krisis

datang. Sektor informal identik dengan usaha rumah tangga dengan setidaknya sebagian dari hasil produksi dijual/dibarter. Usaha ini tidak teregistrasi/terdaftar di institusi/ lembaga manapun. Sektor informal tidak juga terhubung ke perbankan secara resmi. Konsep ini mengacu pada *International Labor Organization (ILO)*. Dikarenakan alasan kemudahan yang didapat dari sektor ini, banyak orang berbondong-bondong membuka usaha rumahan/usaha kecil dan mikro yang disesuaikan dengan kreasi dari pemilik usaha. Dengan modal minim seperti gerobak kecil atau lahan teras rumah saja sudah cukup untuk menghidupkan ekonomi rumah tangga. Sebut saja outlet-outlet kebab, olahan makroni, garmen kecil pembuatan masker hingga yang lagi booming saat ini yaitu barista mini yang menyajikan olahan kopi. Bukan hanya di sepanjang jalan kota-kota besar seperti Pangkalpinang dan Tanjung Pandan saja, jalanan di sepanjang Manggar, Toboali dan Koba dapat ditemui jenis-jenis usaha yang telah disebutkan diatas. Usaha rumahan yang dikategorikan sebagai sektor informal oleh ILO ini seolah menjadi oasis di tengah keringnya gurun perkerjaan formal yang resmi. Terlebih, internet membuat penyebaran informasi dari berbagai jenis usaha ini menjadi semakin mudah dan murah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor informal mendominasi pekerjaan di Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Ketenagakerjaan Nasional Februari 2019, penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informal sebanyak 74 juta jiwa. Di lain sisi, penduduk yang bekerja di sektor formal hanya mencapai 55,3 juta jiwa saja. Artinya lebih dari 57 persen penduduk Indonesia yang bekerja berkecimpung di sektor informal.



Sumber : SAKERNAS 2019

Update data terbaru dari sumber yang sama belum direlease oleh BPS namun dapat dipastikan dominasi sektor informal akan lebih menonjol di tahun 2020. Hal ini tidak lain karena banyaknya sektor formal yang harus gulung tikar dan merumahkan karyawannya, sementara selama ini karyawan-karyawan tersebut menggantungkan hidupnya dari pekerjaan tersebut. Tidak banyak yang bisa diperbuat bagi mereka yang harus di PHK atau dirumahkan. Sebagian terpaksa harus pulang ke kampung halaman, sebagian ada yang bertahan memanfaatkan tabungan yang ada untuk menggeluti usaha rumahan yang tergolong ke dalam usaha di sektor informal.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menghitung persentase penduduk usia kerja yang bekerja menurut status pekerjaannya. Terbukti per Agustus 2019, setidaknya 46.19 persen berstatus pekerja informal sementara sisanya berstatus pekerja formal sebagai buruh/karyawan atau berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Bisa dipastikan akan ada lonjakan status pekerja informal di 2020, karena Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengalami dampak yang serupa dengan berbagai provinsi lainnya akibat pandemi Covid-19. Dampak yang paling terasa adalah lesunya perekonomian dan kekhawatiran lonjakan pengangguran di seluruh kabupaten/kota. Perlu adanya sebuah batu loncatan untuk bisa selamat dari krisis ini, dan batu loncatan yang kasat di hadapan kita adalah sektor informal.

Perkembangan sektor informal bagaikan dua mata pisau yang memiliki kontradiksi persepsi. Secara klise kehadiran sektor informal cukup membawa angin segar dengan menampung para pekerja yang terdepak dari sektor formal. Perkembangan teknologi dan ekonomi digital memacu tumbuhnya wiraswasta secara online dan mandiri. Inspirasi dan ide untuk usaha sektor informal dapat ditemukan di jejaring media sosial, kemudahan dalam pendistribusian barang produksi dapat diselesaikan lewat jasa antar-kirim barang, apalagi dengan hadirnya internet, beriklan menjadi urusan gampang. Dalam teori *Post Disruption*, konsumen milenial memiliki peran bukan hanya sebagai tujuan akhir suatu barang tetapi juga berperan aktif sebagai *super participant* yang selalu memberikan komentarnya terhadap barang yang sudah dibeli. Ini menjadi keuntungan sendiri bagi para pengusaha di sektor informal untuk mengiklankan barang dagangannya. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan tadi, waktu bekerja yang lebih fleksibel juga menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum milenial untuk menggeluti sektor informal.

Sisi berbeda yang harus diperhatikan akibat menjamurnya sektor informal adalah tidak ada yang bisa mendaftarkan usaha-usaha ini dan pertumbuhannya tidak bisa dibendung. Dikarenakan sektor informal tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar maka sulit bagi pemerintah untuk mengatur arah bisnis ataupun memfasilitasi usaha mikro kecil ini. Selain itu kehadiran beberapa sektor informal yang “kurang” disiplin bisa jadi menambah polemik sosial di masyarakat seperti halnya kemacetan jalan, infrastruktur kota yang dirusak dengan kehadiran usaha-usaha yang tidak ramah lingkungan hingga penipuan dikarenakan bentuk usaha yang fiktif. Tantangan terbesar yang dihadapi dari geliat kehadiran sektor informal ini adalah kurang maksimalnya penarikan pajak yang didapat pemerintah. Padahal sejak 1 Juli 2013 telah muncul adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Alih-alih membayar pajak, bisa bekerja saja bagi mereka merupakan sebuah anugrah. Tidak sedikit dari mereka yang terjun ke sektor ini dengan motif asalkan mendapat pekerjaan.

Strategi Kebangkitan Perekonomian

Pada Triwulan I 2020, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bangka Belitung mengalami kontraksi hingga level 3,66 persen (q-to-q). Ini merupakan laju pertumbuhan dengan kontraksi terdalam dalam satu dekade terakhir. Secara geografis, provinsi ini tidak dibentuk untuk mengenal istilah *lockdown* atau pembatasan mobilitasi penduduknya. Butuh akses keluar masuk yang fleksibel untuk mensuplai kebutuhan dari luar dan mengeksport timah, lada, CPO serta hasil bumi lainnya untuk menciptakan nilai tambah bagi perekonomian. Membiarkan jumlah pengangguran terus meningkat hanya akan menambah masalah berkepanjangan. Butuh peredam atau wadah yang dapat menyerap tenaga kerja yang terdepak dari sektor formal agar ekonomi tetap stabil. Peredam itu adalah kehadirannya sektor informal.

Sektor informal dapat menjadi sepon penyerap tenaga kerja yang efektif. Sektor ini butuh dukungan perhatian dan kemudahan permodalan. Memberikan kredit tanpa riba demi berkembangnya usaha bisa menjadi salah satu solusi. Jika ini terasa sulit, maka peran pemerintah dibutuhkan untuk mengedukasi masyarakat bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang digelontorkan pemerintah pusat dapat diputar dan menjadi modal dalam merintis usaha baru. Perlu ruang dan kesempatan bagi sektor usaha rumahan untuk berkembang dan pemerintah dapat memfasilitasinya. Tidak menerapkan retribusi sekecil apapun bagi usaha baru bisa menjadi “lampu hijau” bagi pengusaha untuk terus berinovasi. Tentu saja dengan tetap menerapkan protokoler kesehatan dan meminimumkan interaksi.

Kesimpulan

Periode *New Normal* yang saat ini sedang Indonesia jalani bukanlah bahan lelucon. Jika masih berkegiatan seperti biasa, maka kita sedang menuju kondisi seperti yang terjadi di Italia dan Ekuador beberapa bulan lalu. Fasilitas kesehatan tidak memadai, sementara penambahan jumlah positif Covid-19 terus menunjukkan tren yang menanjak. Dengan melakukan aktifitas dengan interaksi minimum, menjaga jarak, dan mematuhi protokol kesehatan adalah

sebuah keniscayaan guna mencegah ini semua semakin tidak terkendali. Bersama kita tumbuhkan geliat ekonomi sebisa yang kita mampu, minimal terus berinovasi melalui sektor informal.

Pro kontra tentang geliat sektor informal akibat pandemi Covid-19 akan terus ada tergantung dari sudut pandang mana melihatnya. Pada akhirnya menarik untuk ditunggu apakah pemerintah akan membina sektor informal untuk masuk ke sektor formal, atau justru membiarkan sektor ini menjamur dan bersaing sesuai dengan keinginan pasar. Satu hal yang pasti adalah kita patut untuk mengapresiasi kehadiran sektor informal karena berkat kehadirannya tingkat pengangguran menjadi rendah untuk sementara waktu. Tidak perlu gengsi untuk memulainya dari bawah, karena sektor informal tidak akan pernah ada habisnya untuk tetap eksis dan terus menopang kegiatan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bumi Serumpun Sebalai.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik.2019.Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2019
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.2019.Profil Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Badan Pusat Statistik.2020.Berita Resmi Statistik :Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2020 no 33/05/20/ThXIV
- PP no 46 Tahun 2013
- <https://wowbabel.com/2020/04/21/dampak-covid-19-sebanyak-356-pekerja-di-phk> diakses pada hari Sabtu, 13 Juni 2020 jam 16.00

MITIGASI PEREKONOMIAN ERA COVID-19 BERBASIS POTENSI LOKAL BABEL

Uswatun Nurul Afifah

*Staf Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS
Kabupaten Belitung Timur
uswatunnurula@bps.go.id*

Pandemi *Covid-19* tengah mewabah di hampir seluruh belahan dunia. Berawal dari Cina pada awal tahun 2020, virus ini kemudian menyebar sampai dengan hari ini. Berdasarkan situs *worldmeter* per 14 Juni 2020, terdapat lebih dari 8 juta kasus *Corona* di dunia dengan tingkat kematian sebesar 10 persen. Dampak yang ditimbulkan adalah porak-porandanya berbagai stabilitas sistem mulai dari kesehatan, sosial, dan perekonomian.

Para pakar ekonomi menyatakan bahwa mayoritas negara di dunia telah bersiap dengan suatu krisis jika krisis keuangan tersebut bersifat “biasa” seperti yang telah terjadi sebelumnya, misalnya *Subprime Mortgage Crisis* 2008 dan krisis moneter 1998. Akan tetapi, kali ini krisis 2020 diawali oleh krisis kesehatan yang tidak diprediksi sebelumnya kemudian merembet ke berbagai aspek. Oleh karena itu, negara dengan kekuatan ekonomi yang besar seperti Amerika Serikat dan Cina pun ikut terkena dampak negatif yang luar biasa.

Menurut Denny Irawan, seorang *PhD in Economics* dari *The Australian National University* dan Kadiv Kajian Komisi Ekonomi, terdapat perbedaan antara krisis kesehatan dengan krisis keuangan, perang, dan bencana alam. Krisis kesehatan dari *Covid-19* atau “*Corona Shock*” memiliki beberapa karakteristik yaitu mencakup seluruh dunia (*world coverage*), berdurasi lama (*long term*), berdampak langsung dengan berbagai sektor riil perekonomian (*impacted riil sectors*), membatasi ruang gerak secara fisik (*cut of connectivity*) dan belum bisa ditentukan kapan berakhir. Karakteristik tersebut menyebabkan pemerintah sulit mengambil kebijakan.

Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah di setiap negara adalah memberikan dukungan fiskal untuk menjaga stabilitas perekonomian. Masing-masing negara menggelontorkan besaran stimulus yang berbeda-beda dari total Produk Domestik Bruto (PDB)-nya. Jepang, Amerika Serikat, Australia, Singapura, dan Malaysia misalnya mengeluarkan stimulus dengan kisaran di atas 10 persen dari total PDB mereka. Sementara itu, Indonesia mengeluarkan Rp 405,1 triliun atau sekitar 2,5 persen dari PDB.

Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, anggaran tersebut dialokasikan antara lain untuk jaringan pengaman kesehatan yang diperuntukkan untuk layanan kesehatan dan intensif tenaga medis; jaringan pengaman sosial diperuntukkan untuk program keluarga harapan, program makanan pokok/sembako, pembebasan biaya listrik untuk pelanggan 450VA, intensif perumahan, dan program padat karya; jaringan pengaman ekonomi untuk eskpansi stimulus fiskal kedua dan subsidi bunga; dan terakhir adalah program pemulihan ekonomi nasional untuk paket stimulus di bidang keuangan. Stimulus tersebut diambil setelah pemerintah mengambil kenijakan *counter cyclical* atau kontra siklus. Artinya, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan fiskal yang rencananya sebesar 1,76 menjadi 2,5 persen dari total PDB. Hal ini merupakan bukti bahwa negara tidak tinggal diam dalam merangkul perekonomian di era *Covid-19*.

Kasus pertama positif Covid-19 di Indonesia tekonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020 (bulan terakhir TW-1). Akan tetapi, imbas Covid-19 terhadap perekonomian di negeri yang pernah *denial* pada awal kemunculan Covid-19 ini telah terasa. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I 2020 hanya sebesar 2,97 persen. Angka ini melambat jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019. Perlambatan ini tidak lepas dari dampak negatif *Covid-19* yang membatasi pergerakan antar orang sehingga menghambat proses produksi dan pengiriman barang.

Dampak Covid-19 pada Perekonomian dan Pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel)

Melemahnya perekonomian imbas dari *Covid-19* juga dialami oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan rilis BPS, pertumbuhan ekonomi TW I 2020 (*y-o-y*) di provinsi serumpun sebalai ini hanya sebesar 1,35 persen, sekaligus menjadi yang terendah di Pulau Sumatera. Lambatnya perekonomian dipicu oleh kontraksi ekspor sebesar 41,90 persen dibandingkan dengan tahun 2019 di periode yang sama.

Sebagian besar produk ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah timah. Peranan ekspor timah terhadap keseluruhan ekspor sebesar 81,27 persen. Sementara itu, aktivitas produksi di negara-negara tujuan mengalami penghambatan akibat *Covid-19* yaitu di Singapura, Amerika Serikat, Korea Selatan, India, dan Tiongkok. Kelima negara tersebut merupakan negara tujuan ekspor timah terbesar di Bangka Belitung. Dampaknya,, permintaan ekspor timah di Bangka Belitung menurun drastis dan harga timah pun anjlok sehingga membuat penambang timah di Bangka Belitung enggan menambang.

Tercatat sebanyak 144 kasus positif Corona di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per tanggal 14 Juni 2020. Bangka Belitung bukanlah provinsi dengan jumlah pasien positif Corona terbesar di Indonesia, akan tetapi dampak dari *Covid-19* sangat terasa mengganggu stabilitas perekonomian. Situasi perekonomian saat ini membuat pemerintah Bangka Belitung harus siap dengan beberapa skenario guna mengatasi dampak negatif yang lebih besar.

Pengangguran di Bangka Belitung akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah datangnya *Covid-19* meningkat signifikan. Hal ini dipicu oleh pembatasan kegiatan yang diatur oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah guna memutus rantai penyebaran *Covid-19*. Disnaker Bangka Belitung mengutarakan sampai dengan awal Mei terdapat sebanyak 3.531 pekerja yang harus dirumahkan. Beberapa diantaranya merupakan karyawan hotel. Industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terpukul karena *Covid-19*.

Treatment pada Tenaga Kerja Non-Work From Home sebagai Langkah Penyelematan Ekonomi

Tabel 1. memuat sebaran tenaga kerja menurut sektor lapangan usaha di Provinsi Bangka Belitung. Dengan diberlakukannya *Work From Home* akibat *Covid-19*, tidak semua sektor mampu beradaptasi bahkan tidak mungkin untuk menerapkan *WFH*. Beberapa sektor yang secara harfiah mampu menyesuaikan dengan ritme *Work From Home* yaitu Informasi Komunikasi, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa lainnya (diblok abu-abu). Artinya, hanya sekitar 19,32 persen dari total tenaga kerja di Bangka Belitung yang mampu mengikuti anjuran pemerintah untuk bekerja dari rumah.

Tabel 1. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Febuari 2020

Kegiatan Utama	Persentase
Sektor Primer	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,89
Pertambangan dan Penggalian	15,57
Sektor Sekunder	
Industri Pengolahan	8,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,71
Bangunan	4,41
Sektor Tersier	
Perdagangan	18,00
Transportasi dan Pergudangan	1,99
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,01
Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real estat	1,36
Jasa Perusahaan	1,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,33
Jasa Pendidikan	4,87
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,71
Jasa lainnya	4,05

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah penulis)

Di sisi lain, kita tidak boleh melupakan fakta bahwa sektor yang memungkinkan untuk *WFH* seperti yang telah disebutkan di atas hanya menyumbang 19,95 persen dari total perekonomian Bangka Belitung di TW I 2020. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan langkah konkrit untuk tetap menjaga sekitar 81,68 persen tenaga kerja agar tetap aman dan berjalan sehingga 81,05 persen dari total PDRB di Bangka Belitung bisa diselamatkan. Upaya awal yang perlu dilakukan yakni mengawal program kebijakan yang telah diteken pemerintah pusat terkait pekerja setelah dampak Covid-19.

Pemerintah daerah Bangka Belitung memastikan stimulus untuk pekerja yang terdampak telah tepat sasaran. Misalnya sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mampu mendekati kondisi dari industri pariwisata, tenaga kerja yang dirumahkan pada sektor ini perlu mendapatkan stimulus. Selain itu, sektor industri pengolahan UMKM juga perlu mendapat stimulus.

Memastikan program dari pemerintah pusat telah tepat sasaran dan memantau pelaku ekonomi taat protokol kesehatan adalah upaya umum yang perlu dilakukan untuk menjaga pekerja *Non-Work From Home*. Selanjutnya, disampaikan upaya-upaya atau mitigasi dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi di Bangka Belitung pada era Covid-19 dengan memperhatikan potensi lokal dan karakteristik dari daerah sebagai berikut:

Mitigasi Penguatan Sektor Primer

Harapan yang bisa menyelamatkan kita dari hancurnya ekonomi global adalah kita memiliki sektor primer yang bisa diandalkan. Seperti yang disampaikan oleh ekonom UNPAD dalam analisis pemodelannya mengenai dampak ekonomi dari Covid-19, menyimpulkan bahwa sektor primer yakni pertanian akan mendapatkan dampak yang paling kecil dibandingkan sektor lain. Sektor primer akan menjaga kita dari ketergantungan produk luar negeri (industri manufaktur) yang saat ini produksinya terhambat bahkan mandeg. Di Bangka Belitung sendiri, terdapat sebanyak 28,46 persen dari total tenaga kerja bekerja di sektor primer yakni sektor pertanian, perikanan, dan perhutanan, serta sektor pertambangan dan penggalian.

Meskipun sektor pertambangan dan penggalian dalam posisi yang kurang profit saat ini, kita tidak bisa melupakan bahwa kita memiliki sektor perikanan dan sektor kehutanan. Di samping itu, sektor perkebunan hortikultura juga bisa menghidupkan perekonomian di Bangka Belitung. Paling tidak, sektor-sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan dasar kita. Kuatnya sektor pertanian juga dibuktikan dengan meningkatnya ekspor pertanian Indonesia pada Maret 2020 saat Covid-19 mulai masuk. Selain itu, data menunjukkan bahwa sektor dengan *share* terbesar terhadap perekonomian di Bangka Belitung adalah sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan yang pada Triwulan I 2020 memiliki andil sebesar 19,07 persen.

Contoh *real* yang bisa dimaksimalkan oleh pemerintah Bangka Belitung yakni dukungan untuk petani madu di sektor kehutanan. Madu merupakan salah satu produk bonafit yang saat ini menjadi salah satu “senjata” penting dalam menjaga kesehatan. Madu dapat meningkatkan imunitas yang diharapkan mencegah Covid-19 masuk ke tubuh kita sehingga konsumsi madu di era Covid-19 diproyeksikan meningkat. Dengan sentuhan teknologi dan informasi untuk proses pemasaran yang kreatif dan mumpuni, produk madu akan mampu bersaing di pasaran.

Sejarah mencatat, sektor pertanian merupakan sektor yang mampu bertahan pada krisis moneter 1997-1998 di Indonesia bahkan menampung kembali tenaga-tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan di perkotaan. Pada krisis kali ini, peluang sektor pertanian sebagai *buffer sector* (sektor penyangga) bisa jadi kembali terulang. Oleh karena itu, stimulus pada sektor primer perlu menjadi salah satu fokus utama jika Bangka Belitung ingin mengandalkan sektor ini untuk menjaga stabilitas perekonomian.

Mitigasi Daya Tahan Tubuh dengan Vitamin D Alami

Sistem daya tahan tubuh adalah garis pertahanan pertama menghadapi mikroorganisme termasuk virus. Sebagian besar pasien yang terinfeksi Covid-19 menunjukkan gejala pada pernapasan seperti demam, batuk, bersin, dan sesak napas. Beberapa literatur menyebutkan bahwa daya tahan tubuh sangat penting untuk

mencegah saluran napas. Salah satu suplemen yang bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh yakni vitamin D (Susilo dkk, 2020). Dalam kesimpulannya, suatu meta-analisis dan telaah sistematik menunjukkan bahwa suplementasi vitamin D dapat secara aman memproteksi terhdap infeksi saluran napas akut.

Sebuah penelitian dari *Northwestern University* juga menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kematian *Covid-19* dengan kekurangan vitamin D. Seperti yang dilansir pada situs *Detik Health*, para peneliti melakukan analisis statistik data dari rumah sakit dan klinik di seluruh China, Perancis, Jerman, Italia, Iran, Korea Selatan, Spanyol, Swiss, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Para peneliti mencatat bahwa pasien dari negara-negara dengan tingkat kematian COVID-19 yang tinggi, seperti Italia, Spanyol dan Inggris, memiliki tingkat vitamin D yang lebih rendah dibandingkan dengan pasien di negara-negara yang tidak terkena dampak parah.

Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) UGM, Prof.dr. Madarina Julia, Sp.A(K),MPH.,Ph.D., mengatakan tubuh manusia memerlukan sinar matahari untuk membantu meningkatkan produksi vitamin D di dalam tubuh. Sinar matahari ini menjadi sumber utama vitamin D alami, sementara hanya sedikit sekali yang berasal dari makanan.

Sekitar 80 persen vitamin D yang dibutuhkan manusia berasal dari sinar matahari. Pernyataan ini merupakan sebuah keuntungan bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Memiliki banyak pantai menjadikan wilayah di Bangka Belitung tidak kekurangan sinar matahari. Seperti halnya hasil penelitian yang dimuat di *Jurnal Environment Internasional 2014* menyimpulkan bahwa wilayah pesisir memiliki kandungan vitamin D yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Bangka Belitung dalam menjaga stabilitas ekonomi yaitu dengan menghimbau kepada tenaga kerja *Non Work From Home* yang tetap bekerja tentang pentingnya Vitamin D. Himbauan diharapkan mengandung pengetahuan informatif bahkan tidak menutup kemungkinan untuk dijadikan peraturan. Dengan himbauan

yang serius, masyarakat akan merespon dengan baik sehingga aktivitas perekonomian terus bergerak namuni risiko terkena *Covid-19* dapat diminimalkan.

Kesimpulan dan Saran

Dampak *Covid-19* bagi aktivitas ekonomi yaitu membatasi kegiatan ekonomi dan menjalankannya di rumah atau bekerja dari rumah (*Work From Home*). Akan tetapi, tidak semua lapangan pekerjaan dapat dilakukan dari rumah. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, seluruh lapangan pekerjaan *Non-Work From Home* tidak harus berhenti total. Faktanya, sebesar 81,05 persen perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercipta dari sektor *Non-Work From Home* salah satunya yaitu sektor primer. Oleh karena itu, disamping tetap menjalankan dan meneruskan kebijakan yang telah dibuat pemerintah pusat, Pemerintah Bangka Belitung diharapkan mampu menjalankan kebijakan sesuai dengan karakteristik daerah sendiri. Mitigasi ini dimaksud untuk mengamankan stabilitas ekonomi karena kondisi perekonomian pada Triwulan I yang sudah melemah.

Pertama, Bangka Belitung dapat mengakomodir sektor *Non-Work From Home* khususnya sektor primer agar tetap produktif. Sektor tersebut meliputi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini dikarenakan dampak *Covid-19* terhadap sektor primer relatif lebih rendah dibandingkan sektor lainnya. Sektor primer di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpotensi untuk membangkitkan perekonomian terutama di sektor perikanan dan kehutanan. Data membuktikan bahwa sektor terbesar penyumbang perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung adalah pertanian, perikanan, dan kehutanan. Jadi, penguatan sektor primer oleh pemerintah sangat diperlukan.

Selain itu, Bangka Belitung juga mendapat *point plus* karena berada di wilayah dengan banyak sinar matahari. Artinya, masyarakat di Bangka Belitung berkesempatan memperoleh banyak asupan Vitamin D sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan meminimalisir *Covid-19*. Aset lokal seperti ini perlu dimaksimalkan dengan panduan kesehatan yang benar misalnya pengetahuan

tentang waktu terbaik untuk berjemur dan himbuan resmi dari pemerintah.

Daftar Pustaka

- Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik No.39/05/Th. XXIII
- Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.32/05/20/Th.XVIII
- Media Keuangan Kementerian Keuangan Volume XV/No. 154/JUNI 2020
- PPI Sharing vo.4 “Analisa Kebijakan Penanggulangan Covid-19 di Indonesia: Pendekatan Lintas Bidang”

Website :

- (1) <https://www.worldometers.info/coronavirus/>
- (2) https://www.researchgate.net/publication/340925534_Dampak_COVID-19_terhadap_Tenaga_Kerja_di_Indonesia
- (3) <https://covid19.babelprov.go.id/>
- (4) <https://ugm.ac.id/id/berita/19207-berjemur-sinar-matahari-mampu-meningkatkan-kekebalan-tubuh>
- (5) <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=862332&va=13819&title=Peran%20Vitamin%20D%20Dalam%20Regulasi%20Sistem%20Imunitas%20Melalui%20Sel%20Dendritik>
- (6) <https://koran.tempo.co/read/ilmu-dan-teknologi/364836/tinggal-di-pantai-kadar-vitamin-d-lebih-tinggi?>
- (7) <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/18/090200523/vitamin-d-disebut-berkaitan-dengan-angka-kematian-covid-19-kok-bisa->
- (8) <http://sdgcenter.unpad.ac.id/strategi-ekonomi-sektor-pertanian-di-tengah-pandemi-covid-19/>
- (9) <https://covid19.go.id/p/berita/langkah-pemerintah-dalam-mitigasi-covid-19-di-sektor-ketenagakerjaan>

**BAYANG-BAYANG KEJAYAAN TIMAH DAN GELIAT WISATA
PULAU BELITUNG (SUCCESS STORY AKTIVIS LINGKUNGAN
KPLB DALAM EKSPLORASI WISATA ALAM DAN MEMBINA
KOMUNITAS WISATA DI BELITUNG
SAAT PANDEMI COVID-19)**

Irvani

*Jurusan Teknik Pertambangan, Universitas Bangka Belitung
bujangbabel@yahoo.co.id*

A. Fakta/Data/Informasi

Pulau Belitung memiliki catatan sejarah panjang pertambangan timah, sebagai bagian dari *The Indonesiaan Tin Islands*. Menurut Sujitno (2015a) dalam buku yang berjudul “Sejarah Penambangan Timah Indonesia”, keberadaan dan penggalian bijih timah diidentifikasi tim ekspedisi kapal perang VOC pada abad ke-17, walaupun tidak menarik minat VOC untuk mengeksploitasinya. Pada pertengahan abad ke-19 dilakukan penambangan secara resmi, menjadikan Belitung sebagai Pulau Timah kedua setelah Pulau Bangka. Terhitung selama ratusan tahun komoditas logam timah, dan perkakas olahan logam besi menjadi produk perdagangan ke luar Pulau Belitung. Hasilnya menopang perekonomian disamping hasil hutan, kebun dan laut. Komoditas tersebut kemudian mengakar dalam sendi kehidupan masyarakat Belitung.

Pada era kemerdekaan, penambangan timah dilakukan secara monopoli. Menurut Sujitno (2015b), Perusahaan Timah berjaya selama puluhan tahun. Akan tetapi menjelang tahun 1990an kejayaan timah runtuh. Perubahan tatanan global dan persaingan pasar tidak dapat dihindari. Harga logam timah terjun bebas. Biaya produksi jauh lebih besar daripada harga jual logam. Beberapa negara produsen timah menutup tambang. Perusahaan Timah (PN Timah) terus merugi. Keadaan finansial PN Timah menjadi semakin genting, sehingga dilakukan restrukturisasi. Akan tetapi restrukturisasi PN Timah pada tahun 1990an dengan memusatkan kegiatan di Pulau Bangka, menimbulkan gelombang pemutusan kerja (PHK)

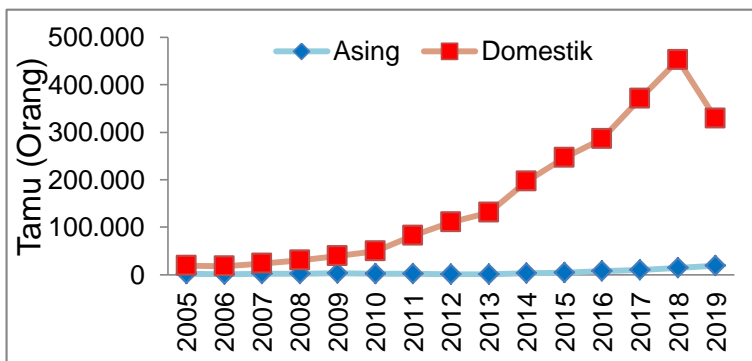
besar-besaran. Ribuan orang di Belitung kehilangan pekerjaan. PHK secara sistemik menimbulkan keterpurukan ekonomi. Terlebih PHK dilakukan tanpa penyiapan alternatif pekerjaan baru. Bermunculan semacam “traumatis psikologis” masyarakat Belitung, merasa ditinggalkan begitu saja oleh PN Timah.

Seiring waktu geliat perekonomian mulai menanjak perlahan. Momentum fenomenal film *Laskar Pelangi* pada tahun 2008, menyingkapkan keindahan surga pantai berwarna putih berbatu granit yang dimiliki Pulau Belitung. Menakjubkan para pemirsa Indonesia hingga seantero dunia. Trend kunjungan wisatawan domestik dan internasional menjadi berkali lipat dari sebelumnya. Sektor pariwisata menjadi primadona baru selain sektor pertambangan dan perkebunan. Pada akhir tahun 2011, Pemerintah Indonesia menetapkan Belitung sebagai bagian destinasi wisata nasional.

Pemerintah Indonesia menetapkan Belitung sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) pada tahun 2016. Berbagai stimulus diberikan, berikut pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Program-program pariwisata tingkat nasional dan lokal telah diluncurkan. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang, dan program Geopark menjadi prioritas. Pada tahun 2017 Pulau Belitung secara resmi masuk dalam Geopark Nasional. Langkah selanjutnya adalah menjadikan Belitung sebagai bagian Geopark Dunia UNESCO. Perjuangan tersebut masih terus berlangsung sampai dengan sekarang.

Berdasarkan tabulasi data Belitung Dalam Angka (BPS Kabupaten Belitung, 2010, 2013, 2015, 2017, 2019 dan 2020), sebagaimana diilustrasikan oleh Gambar 1, dari tahun 2005 sampai 2019 menunjukkan trend peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan asing. Walau kunjungan wisatawan domestik mengalami penurunan pada tahun 2019. Secara khusus, jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2018 untuk pertama kali mencapai rekor tertinggi, yaitu sebesar 467.571 orang. Kegiatan pariwisata berpengaruh positif terhadap perkembangan sektor lain. Menurut BPS Kabupaten Belitung (2019), status Kabupaten Belitung sebagai destinasi wisata nasional telah

meningkatkan gairah perkembangan industri pangan, seperti aneka ragam makanan olahan dari ikan, termasuk sektor transportasi dan konstruksi.



Gambar 1. Trend Peningkatan Kunjungan Wisatawan Domestik Dan Manca Negara 2005-2019 di Pulau Belitung
Sumber: BPS Kabupaten Belitung (2010, 2013, 2015, 2017, 2019 dan 2020)

Pada Tahun 2019, terjadi penurunan kunjungan wisatawan domestik sebesar 25,54% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan harga tiket pesawat yang signifikan, serta pembatasan bagasi oleh beberapa maskapai penerbangan diperkirakan menjadi faktor penyebab. Pada tahun 2020 angka kunjungan wisatawan semakin terjun bebas dibandingkan tahun 2019. Indikator penurunan terlihat dari jumlah penumpang udara masuk Belitung melalui Bandara Udara H.As. Hanadjoeddin untuk Bulan Januari-Mei 2020 tercatat hanya sebesar 87.310, turun sebesar 40,44% dibandingkan Januari-Mei 2019 (BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020a).

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia menjadi penyebab penurunan tersebut. Banyak negara melakukan lockdown, karantina wilayah untuk Indonesia. Penutupan bandara dan pelabuhan penumpang, pengurangan penerbangan dan pelayaran kapal berlangsung secara global. Arus perpindahan masuk dan keluar orang dan barang dibatasi. Demikian juga aktivitas di luar rumah jauh berkurang. Fokus dan sumberdaya dicurahkan pada penanganan Pandemi Covid-19. Secara

langsung berimbas pada kelesuan perekonomian global, termasuk Negara Indonesia.

Sektor pariwisata di Belitung turut menjadi lesu oleh penurunan minat wisatawan berkunjung. Secara sistemik, sektor lain juga mengalami kelesuan, terutama sektor-sektor yang berhubungan dengan pariwisata. Permasalahan baru yang muncul berupa gulung tikar para pelaku dan penyedia jasa usaha pariwisata. PHK karyawan menjadi pilihan sulit untuk tetap bertahan. Berakibat jumlah pengangguran semakin meningkat. Inflasi juga tidak dapat dihindarkan ditengah semakin lemah daya beli masyarakat. Berdasarkan BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2020b), Kabupaten Belitung mengalami inflasi sebesar 1,83% pada bulan Juni 2020 jika dibandingkan satu tahun sebelumnya.

Menariknya, ditengah kelesuan kunjungan wisatawan dan perekonomian, masih dijumpai aktivitas pembangunan destinasi wisata alam baru di Pulau Belitung. Gerakannya sederhana, berupa tim-tim kecil, tetapi terarah, terukur serta kontinuitas. Tidak dijumpai pengerahan masa, dan cenderung terlihat *silent*. Protokol Covid dijalankan dalam setiap misi yang diemban. Diantara mereka yang dikenal berasal dari Kelompok Peduli Lingkungan Belitung (KPLB). Kelompok dan tim kecil ini tetap menginspirasi geliat kebangkitan wisata Belitung saat Pandemi Covid-19. Mereka terlihat nyata memiliki survaibilitas tinggi dan tidak gagap menghadapi New Normal.

Tim KPLB diketuai oleh Budi Setiawan sarat akan pengalaman. Fokus pada pelestarian lingkungan, dan terlibat pada berbagai even nasional dan internasional. Berbagai *success story* dalam konservasi alam telah berhasil ditorehkan dan direplikasikasi. Sebagai putra asli Belitung, Budi Setiawan merupakan peraih berbagai penghargaan bergengsi tingkat dunia, berupa Equator Price Award 2014 dan Tourism for Tomorrow Award 2019. KPLB tercatat sejak tahun 1997an turut aktif dalam konservasi alam dan sekaligus membentuk destinasi wisata. Kelompok ini menjadikan karantina wilayah saat Pandemi Covid-19, sebagai peluang menyiapkan berbagai destinasi wisata baru.

Program utama KPLB berupa konservasi terumbu karang dan Penyu di Pulau Kepayang, Konservasi hewan

langka Tarsius “Pelilean” di Batu Mentas, Konservasi mangrove di Pulau Mindanau “Selat Nasik”, serta memberikan edukasi dan pendampingan kepada komunitas masyarakat. Kondisi *limited budget* dan *limited network* tidak menjadi halangan. Kerjasama dilakukan secara terbuka, cukup banyak akademisi terlibat secara sukarela. Pusat-pusat konservasi dibentuk, sekaligus dikembangkan sebagai pusat edukasi dan destinasi wisata. Berbagai atraksi dan tema wisata alam disuguhkan. Kesuksesan program-program tersebut direplikasikan kepada komunitas di kampung-kampung, dan pulau-pulau sekitar Pulau Belitung.

Sekarang telah terbentuk lebih dari 20 komunitas binaan. KPLB aktif mendampingi masyarakat membentuk “*community base tourism* yang berkelanjutan”. Target setiap tahun 1000 anak teredukasi, telah berjalan mandiri selama empat tahun. Replikasi penangkaran penyu telah berjalan pada beberapa komunitas, termasuk konservasi mangrove di beberapa tempat. Tercatat delapan komunitas binaan telah mengelola hutan kemasyarakatan “*social forestry*”.

Dampak penurunan kunjungan wisatawan akibat Pandemi Covid-19 juga dialami komunitas yang didampingi KPLB. Tetapi faktanya mereka mampu *survive*. Disebutkan diantara komunitas malahan bersyukur. Sepi kunjungan memberikan waktu luang untuk mengolah lahan yang terbengkalai. Sebagai contoh, Komunitas Nelayan Sungai Tebak Rasau Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur. Komunitas Tebak Rasau menggantungkan hidup dari “Sungai Purba” Lenggang, telah mengembangkan paket destinasi ekowisata dan destinasi wisata gastronomi. Wisatawan diajak berpetualang “*adventure*” menangkap ikan di Sungai Lenggang secara tradisional, kemudian mencari rempah di hutan sebagai bumbu, memasak, menyajikan dan menyantap ikan secara tradisional. Saat sepi kunjungan mereka memanfaatkan untuk mengolah lahan menjadi kebun sayuran, mencetak kolam ikan pada genangan air. Pondok-pondok cantik “rumah kebun” dipersiapkan untuk wisatawan berkunjung jika keadaan normal kembali.

Suatu pulau di Kecamatan Membalong Belitung turut berbenah ditengah karantina wilayah mandiri. Komunitas

Pulau Seliu didampingi KPLB telah berprogres selama dua tahun. Rawa “bekas Kawah Zaman Jepang” yang ditumbuhi gulma seluas ratusan hektar disulap menjadi destinasi wisata *community resort* bernama Purun Resort. Pembangunan destinasi Purun Resort menggunakan dana desa. Pulau Seliu dikenal memiliki keindahan pantai berbatu granit, air laut yang jernih, rumah-rumah tradisional, aneka olahan makanan laut dan keripik melinjo.

Contoh lain, tidak ketinggalan tim komunitas wisata Selat Nasik Kecamatan Selat Nasik bersama KPLB bergerak mengeksplorasi destinasi wisata bahari baru. Selat Nasik memiliki mangrove luas terjaga baik, hasil laut berlimpah, spot memancing, area snorkling dan diving yang cukup banyak. Pada beberapa spot terdapat kapal karam dari berbagai Dinasti Kekaisaran Cina. Informasi terbaru, eksplorasi bahari Batu Dinding, telah menjumpai batuan sedimen-metasedimen berwarna kemerahan-hitam, terlihat eksotis, dari arah lautan membentuk dinding batuan memanjang berwarna kemerahan. Menariknya, sedikit ke arah daratan dijumpai lagoon, tempat hidup terumbu karang dan aneka jenis ikan. Tidak berhenti begitu saja, hutan yang menyusun daratan menyembunyikan gua di dalamnya. Potensi geodiversity dan biodiversity yang kaya berhasil dihimpun melalui eksplorasi bahari tersebut.

Berbagai destinasi dan atraksi wisata baru lain juga tengah disiapkan saat karantina wilayah. Berbagai kearifan lokal yang memudar berupa kesetiakawanan sosial dan gotong royong menguat kembali. Di tengah penurunan daya beli masyarakat, barter hasil bumi antara masyarakat dihidupkan kembali. Hasil kebun, hutan dan laut serta produk olahan lain menjadi alat tukar. Ukuran nilai tidak hanya bergantung kepada uang, tetapi lebih beragam. Lock down saat pandemi menghidupkan humanisme, dan menguatkan akar budaya. Diharapkan setelah semua ini berlalu, pada saat keadaan kembali normal, akan menjadi catatan manis dari *success story*.

Tabel 1. Berbagai Destinasi Wisata yang dibangun dan dibina KPLB



Ekowisata & Konservasi Tarsius Batu Mentas



Konservasi Penyu Pulau Kepayang



Eksplorasi Gua & Lagoon Batu Dinding



Purun Resort & Rumah Adat Pulau Seliu



Destinasi Ekowisata & Gastronomi Sungai Lenggang

B. Upaya/Strategi Kebangkitan

Menurut Budi Setiawan, turisme dewasa ini sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat. Potensi turisme Belitung sangat besar untuk dikembangkan. Walaupun ditengah Pandemi Covid-19, pada saat hari libur, kita cenderung mencari tempat untuk berlibur bersama keluarga. Berbagai objek wisata tetap ramai dikunjungi. Protokol Covid-19 menjadi prosedur baru yang dijalankan.

Masa pandemik sekaligus menjadi ajang pembuktian bagi predikat *the real sustanaible tourism*. Komunitas yang mempertahankan profesi semula mampu bertahan. Destinasi wisata yang akan berkembang pada era New Normal lebih kepada wisata *adventure*, wisata *experience* (bertemu masyarakat), wisata kesehatan berupa jamu-jamuan, dan herbal lokal (sebagai contoh masyarakat Belitung telah mengenal aneka herbal dari Kayu Sepang, akar Kayu Muhammad, Teh Pelawan, dll).

Pola peminatan wisatawan/traveller kedepan di era New Normal akan cenderung ke arah *special interest tourism* bukan *mass tourism*. Pola perjalanan akan bersifat :

1. Cenderung *smal group trip*, menghindari *open trip*.
2. Trip cenderung dilakukan hanya dengan orang-orang yang dikenal.
3. Trip dilakukan disekitar tempat tinggal. Diperkirakan pada Pandemi Covid-19 akan sulit mendatangkan wisatawan dari luar Pulau Belitung.

Lebih lanjut Budi Setiawan menyatakan, keunikan alam yang dimiliki Belitung merupakan daya tarik. Masyarakat yang “tune in” dengan potensi daya tarik tersebut, mampu mencetak kegiatan wisata bernilai ekonomis. Akan tetapi, sejatinya pariwisata adalah bonus, sehingga pariwisata tidak boleh mencabut eksistensi tataran budaya. Masyarakat harus tetap menjadi professional di bidang masing-masing. Petani dan peladang tetap menjadi petani dan peladang, nelayan tetap menjadi nelayan, dan seterusnya. Mereka dapat menjadi bagian turisme, memandu dan menyajikan berbagai atraksi bagi wisatawan tanpa harus meninggalkan profesi semula.

Kesalahan selama ini yang dilakukan adalah mendoktrinisasi komunitas menjadi pekerja turisme dengan iming-iming uang besar. Menyebabkan mereka

meninggalkan profesi tradisional yang digeluti. Dampaknya, ketika rantai pariwisata putus akibat Pandemi Covid-19, mereka turut menjadi kolaps. Kebingunganpun terjadi, karena tidak lagi memiliki alternatif sumberdaya yang diandalkan.

Berbagai langkah dan strategi yang dijalankan oleh tim KPLB dalam menghidupkan potensi wisata baru di Belitung :

1. Mengajak masyarakat tidak hanya bergantung pada tambang timah melalui proses edukasi, dan memberikan contoh.
2. Mentransformasi pekerja tambang menjadi pelaku wisata, walaupun ini sulit dilakukan, karena pariwisata membutuhkan hospitality (kenyamanan dan standard pelayanan).
3. Menjadikan pariwisata sabagai *tool* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus melestarikan lingkungan.
4. Laskar Pelangi merupakan momentum awal, selanjutnya dibutuhkan usaha lebih dalam menggali potensi wisata sebagai *new alternative lively hood*. Belitung terkenal bukan hanya karena pantai atau laskar pelangi, tetapi juga kekayaan geodiversity, biodiversity, budaya, spot memancing, keindahan bawah laut, kapal tenggelam, jalur rempah, bekas tambang timah dsb.
5. Pendampingan komunitas wisata dilakukan melalui *radical listening* atau mendengar secara mendalam, menemukan mimpi besar masyarakat. Pembangunan dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat, bukan hanya diimingkan uang banyak.

C. Kesimpulan dan Saran

Pada era Pandemi Covid-19, *special interest tourism* dalam kelompok kecil *small group trip* akan lebih menjanjikan dikembangkan daripada *open mass tourism*. Pemberdayaan komunitas pariwisata diarahkan bersifat partisipatif, tidak mendoktrin, serta tidak boleh mencabut akar kehidupan/budaya yang telah ada sebelumnya. Replikasi dilakukan berdasarkan program-program yang telah sukses sebelumnya.

Daftar Pustaka

- BPS Kabupaten Belitung, 2010, Belitung Dalam Angka 2010. Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung.
- BPS Kabupaten Belitung, 2013, Belitung Dalam Angka 2013. Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung.
- BPS Kabupaten Belitung, 2015, Belitung Dalam Angka 2015. Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung.
- BPS Kabupaten Belitung, 2017, Belitung Dalam Angka 2017. Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung.
- BPS Kabupaten Belitung, 2019, Belitung Dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung.
- BPS Kabupaten Belitung, 2019, Statistik Daerah Kabupaten Belitung 2019. Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung.
- BPS Kabupaten Belitung, 2020, Belitung Dalam Angka 2020. Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung.
- BPS Kabupaten Belitung, 2020, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Belitung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019. Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung.
- BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2020b. Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Kota Tanjungpandan. Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 40/07/20/Th.VII, 01 Juli 2020.
- BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2020. Perkembangan Ekspor dan Impor Kepulauan Bangka Belitung Mei 2020. Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 43/07/20/Th.XVIII, 1 Juli 2020.
- Sujitno, Sutedjo, 2015a, Sejarah Penambangan Timah Indonesia. Penerbitan 2. Penerbit PT Bina Prestasi Insani. Jakarta.
- Sujitno, Sutedjo, 2015b, Timah Indonesia Sepanjang Sejarah. Penerbitan 3. Penerbit PT Javastar Creative Tangerang.